



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IV DPR RI
DENGAN
ESELON I KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAN KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, DAN
KELAUTAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: II (dua)
Rapat Ke	: 5
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa/4 Februari 2020
Waktu	: Pukul 10.42-17.45 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Jl. Jend Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat	: Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
Acara	: 1. Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020; 2. Perbahan Komposisi Pagu Anggaran Tahun 2020.
Sekretaris Rapat	: Budi Kuntaryo (Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI)
Hadir	: A. Anggota DPR RI: 39 dari 54 orang Anggota Komisi IV dengan rincian: 1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) 8 dari 12 orang Anggota 1. Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI 2. Drs. I Made Urip, M.Si. 3. Ir. Effendi Sianipar 4. H. Yadi Srimulyadi 5. Ir. Mindo Sianipar 6. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si. 7. Dr. H. Sutrisno, S.E., M.B.A. 8. Riezky Aprilia, S.H., M.H.

- 2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)**
6 Dari 8 orang Anggota
 1. H. Dedi Mulyadi, S.H./Wakil Ketua
 2. H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M.
 3. A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra, S.H., M.H.
 4. Ichsan Firdaus
 5. Budhy Setiawan
 6. Alien Mus
- 3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)**
5 dari 6 orang Anggota
 1. G. Budisatrio Djiwandono/Wakil Ketua
 2. Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, M.M.
 3. Ir. Endor Hermono, M.B.A.
 4. Ir. Sumail Abdullah
 5. Dr. Azikin Solthan, M.Si.
- 4. Fraksi Partai Nasional Demokrasi (F-NasDem)**
2 dari 5 orang Anggota
 1. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.
 2. Yessy Melani, S.E.
- 5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)**
3 dari 6 orang Anggota
 1. Daniel Johan/Wakil Ketua
 2. H. Muhtarom, S.Sos.
 3. Drs. H. Ibnu Multazam.
- 6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)**
4 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. Suhardi Duka, M.M.
 2. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
 3. Hj. Nur'Aeni, S.Sos, M.Si.
 4. Muslim, S.Hi., M.M.
- 7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)**
4 dari 5 orang Anggota
 1. drh. H. Slamet
 2. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.
 3. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
 4. H. Johan Rosihan, S.T.
- 8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)**
1 dari 4 orang Anggota
 1. Haerudin, S.Ag., M.H.
- 9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)**
1 dari 2 orang Anggota
 1. K. H. Asep A. Maoshul Affandy, M.Pd.I.
- 10. Sekretariat Jenderal**

B. Pemerintah

1. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK));
2. Laksmi Wijayanti (Irjen KLHK);
3. Ir. Wiratno, M.Sc. (Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK);
4. Ir. Hudoyo, M.M. (Plt. Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung KLHK);
5. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Plt. Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KLHK);
6. Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr. (Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan KLHK);
7. Drs. M. R. Karliansyah, M.Sc. (Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK);
8. Rosa Vivien Ratnawati, S.H, M.Sc. (Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya KLHK);
9. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK);
10. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK);
11. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM. (Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK);
12. Helmi Basalamah, M.M. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KLHK);
13. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi KLHK);

14. Ir. Nazir Foead, M.Sc. (Kepala BRG); dan
15. Ir. Hartono Prawiraatmadja (Sekretaris BRG).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

... 2020 yang telah diputuskan dalam Rapat Badan Musyawarah tanggal 16 Desember 2019 dan keputusan Rapat Internal Komisi IV DPR RI tanggal 15 Januari 2020 pada hari ini Selasa, 4 Februari 2020 Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan para pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut. Dalam rangka menindaklanjuti Rapat Kerja tanggal 19 November 2019 membahas Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020 dan Perubahan Komposisi Pagu Anggaran tahun 2020.

Menurut laporan Sekretariat Komisi IV DPR RI saat ini Rapat Dengar Pendapat telah dihadiri dan ditandatangani oleh 13 Anggota dan 6 Fraksi. Untuk itu, sesuai dengan Tatib DPR RI, maka rapat ini diskors dulu 5 menit.

Setuju?

Dan rapat ini terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DISKORS)

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.42 WIB)

Bapak dan Ibu sekalian.

Ini ada Anggota baru yang menggantikan mantan Ketua Komisi IV DPR RI Bapak Eddy Prabowo. Silakan Bapak memperkenalkan diri termasuk Dapilnya, supaya nanti ada bagiannya Pak.

F-GERINDRA (Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.):

Terima kasih Ketua.

Ketua dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati,
Bapak Sekjen beserta rombongan.

Saya Azikin Solthan, A-129 Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I yang meliputi Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Azikin.

Semoga Bapak berkelanjutan rajin datangnya pagi Pak, karena Anggota kalau sudah kelamaan biasanya datangnya agak-agak siang, alasannya jalan macet karena hujan.

Bapak dan Ibu.

Rapat Dengar Pendapat hari ini dimulai 10.30 WIB dan akan diakhiri pada pukul 16.30 WIB. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 225 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI atau atas kesepakatan bersama. Dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantara Ketua Rapat;
2. Penjelasan Eselon I KLHK;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI;
4. Jawaban Eselon I KLHK;
5. Kesimpulan Rapat;
6. Penutup.

Apakah acara ini dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020, anggaran belanja Kementerian Lembaga Tahun Anggaran 2020 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp9.319.325.816.000,- termasuk didalamnya anggaran belanja Badan Restorasi Gambut sebesar Rp312.995.525.000,-

Sehubungan dengan hal tersebut pada Rapat Dengar Pendapat hari ini, Komisi IV DPR RI ingin mendapatkan penjelasan secara mendetail rincian program per eselon I serta Badan Restorasi Gambut dengan titik berat kepada program pemberdayaan masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan.

Selanjutnya dalam kesempatan ini, Komisi IV DPR RI juga ingin mendapatkan penjelasan mengenai isu-isu terkini terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan, antara lain impor sampah ilegal yang berdampak pada pencemaran lingkungan, pencegahan penanggulangan bencana banjir dan longsor, konflik satwa liar dengan manusia, serta isu-isu penting lainnya.

Bapak dan Ibu, kalau kita lihat disini anggaran LKH Rp 9 triliun ini amat miris sekali. Anggaranya sangat kecil sekali, maka saya minta dengan hormat teman-teman Anggota Komisi IV DPR RI yang merangkap di Badan Anggaran untuk akan datang kalau bisa harus diatas Rp12 triliun sampai Rp13 triliun. Tujuannya apa? karena dengan dana Rp9 triliun ini mana mungkin

mencukupi untuk penghijauan. Apalagi kita tahu semua hampir semua wilayah terjadi banjir, longsor dan lain-lain.

Kita lihat juga nanti disini secara rinci bagaimana inspektorat mau bekerja kalau anggarannya hanya sekian ratus miliar. Karena saya sangat menyoroti Inspektorat Jenderal adalah hal yang paling penting. Kemudian kita lihat juga Gakkum, Gakkum kalau dananya hanya sekian bagaimana mau menurunkan inteligennya, bagaimana mau ketemu pelakunya, bagaimana mau menangkapnya. Seperti hal kemarin di Jambi, ada sekian ribu log pemiliknya tidak ada, tahu-tahu hilang. Begitu Pak Roy, yang di Jambi waktu kita kunjungan kebakaran hutan itu kan ada sekian ribu log pemiliknya sampai hari ini tidak ada. Jadi ini juga harus diperkuat untuk Gakkum termasuk harus inteligennya turun kelapangan.

Demikian pengantar yang kami sampaikan, selanjutnya kami persilakan kepada Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala BGR untuk menyampaikan penjelasan terkait hal-hal tersebut di atas.

Silakan Bapak Sekjen yang mengatur jalannya, siapa yang dahulu dan siapa yang belakangan.

Terima kasih.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati Bapak Pimpinan Komisi IV DPR RI,
Yang kami hormati Anggota Komisi IV DPR RI,
Rekan-rekan pejabat Eselon I dan jajaran KLHK.

Pertama-tama kita bersyukur pada yang maha kuasa atas terselenggaranya Rapat Dengar Pendapat Kementerian LHK dengan Komisi IV DPR RI ini. Dan kami atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengucapkan terima kaih atas kesempatan untuk menyampaikan tentang kegiatan KLHK tahun 2020. Sebagaimana arahan Pimpinan, kami ingin mengatur pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat dari jajaran KLHK dan seperti biasa kami akan tampilkan, akan tayangkan bagaimana rencana kerja ataupun kegiatan di tahun 2020 sekalipun sudah pernah dilaporkan oleh Ibu Menteri dan juga pada kesempatan Rapat Dengar Pendapat yang lalu.

Dan nantinya akan ditindaklanjuti secara teknis oleh pejabat Eselon I. Dan mohon ijin khususnya mengenai isu lingkungan yang Bapak Pimpinan sampaikan, untuk impor sampah nanti Ibu Dirjen PSLB3 yang akan khusus meng-*update* perkembangan kebijakan dan implementasi dan langkah-langkah. Demikian juga nanti pencegahan penanggulangan banjir ini Dirjen

PDASHL yang tentunya baru saja ada arahan dari Bapak Presiden tindaklanjut dari penanganan bencana banjir dan longsor kemarin. Dan juga nanti konflik satwa yang disampaikan Bapak Pimpinan, ada Bapak Dirjen KSDAE yang juga sudah menguatkan dalam kaitan dengan PSL ini. Dan isu-isu lainnya kalau diperlukan ada pengendalian Karhutla, karena isu itu yang sementara ini menjadi perhatian kami di Kementerian LHK.

Dan untuk penyampaian materi terkait dengan kegiatan dan anggaran 2020 dan penekanannya berbasis masyarakat, kami sudah siapkan beberapa *seat* untuk menunjukkan bahwa Ditjen-Ditjen yang terkait dengan pengelolaan kegiatan dan anggaran berbasis masyarakat atau Tapak akan kami sampaikan. Secara cepat ijin kami mendahului untuk memaparkan bagaimana rencana kerja anggaran tahun 2020.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Tentunya arah dari pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020 ini sudah mengikuti dari visi Presiden, yang selama ini menekankan bagaimana. Langsung kepada arah karena ini yang akan menentukan selama 5 tahun bagaimana KLHK turut serta untuk mendukung pembangunan khususnya di bidang LHK.

Untuk point yang pertama, ini tentunya tidak lepas dari tata kelola dan kepastian hukum untuk mendukung perekonomian terkait dengan investasi dan ekspor. Dan kami disini tentunya mempercepat regulasi-regulasi yang didorong dengan dukungan iklim usaha.

Yang kedua, ini juga terkait dengan program Eselon I yang sangat menjadi perhatian Pemerintah, yaitu pengentasan kemiskinan. Ini didorong nanti dengan Tora dan PS ada dua Dirjen yang sangat terkait disini untuk mengakselerasi dan tentunya targetnya juga sudah ada.

Dan yang ketiga, ini yang sangat tepat sekali ketika memang Komisi IV DPR RI untuk menjadikan mitra kerja dari Pemerintah, karena tidak lepas dari bagaimana kualitas lingkungan hidup dan kehutanan ini beberapa Dirjen yang terkait disini Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya tidak lepas dari DAS Rehabilitasi, perlindungan dan pengamanan kawasan, pengendalian pencemaran, pengolahan sampah, penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta restorasi lahan gambut. Butir tiga inilah yang nampaknya perlu ada peningkatan dari sisi penganggaran, karena dengan beban tugas yang besar dan permasalahan dilapangan yang dihadapi dan juga pencapaian kualitas lingkungan hidup ini menjadi point besar ketika KLHK menjadi mitra kerja Komisi IV DPR RI. Dengan isu strategis yang disampaikan Pimpinan tadi, semua berada di butir tiga.

Dan untuk yang keempat, ini terobosan dari Pemerintah dalam kaitan dalam infrastruktur. Prioritas nasional yang dikembangkan tentunya Dirjen KSDAE nanti akan nampak disini Pimpinan, bahwa point yang keempat kanan atas inilah anggaran yang terbesar setelah Ditjen PDASHL, jadi ketika nanti

Ditjen lain juga akan mengimbangi di arah pembangunan butir tiga, ini akan menambah pagu yang *insya allah* melalui Rapat Dengar Pendapat ini akan terlihat point-point nama saja yang harus diusulkan kembali. Terus terang jujur memang 9 itu angka yang hampir sama dengan tahun lalu di tahun 2019, karena ini awal tahun dari kabinet kerja rasanya evaluasi masih bisa dilakukan.

Yang terakhir bagaimana SDM menjadi perhatian Bapak Presiden dalam kaitan dengan KLHK ini BP2SDM yang diharapkan oleh Ibu Menteri untuk menguatkan seluruh kebutuhan khususnya pendidikan vokasional dan bagaimana penciptaan lapangan kerja ini akan diawali dengan penguatan dari kelembagaan dan SDM di tingkat Tapak. Dari sinilah sebenarnya kita bisa menerobos untuk mendukung usulan kebijakan, kegiatan dan anggaran di tahun-tahun berikutnya.

Secara cepat sebagaimana yang Ibu Menteri sampaikan dalam RKP 2020, ini temanya sumber daya manusia untuk pertumbuhan berkualitas. Dari 5 prioritas nasional KLHK berada di prioritas nasional satu, prioritas nasional tiga dan prioritas nasional empat. Dari prioritas nasional memang sudah dalam rangkaian untuk ditindaklanjuti di tingkat bawah, kita mengenal yang namanya program prioritas. Sehingga kita selalu berjuang Pimpinan, bagaimana kegiatan-kegiatan di lapangan ini sangat harus bisa muncul di prioritas nasional ini dan sementara kita hanya tiga yang pertama pembanguna manusia dan pengentasan kemiskinan ini kita masuk di program prioritas empat pengentasan kemiskinan. Kemudian di prioritas nasional tiga, nilai tambah sektor riil industrialisasi dan kesempatan kerja kita ada dua program prioritas dan dua program prioritas inilah sebenarnya upaya KLHK untuk menciptakan lapangan kerja yang ada di tingkat Tapak dan industry.

Kemudian untuk di prioritas nasional empat, ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup sekalipun hanya dua program prioritas, yaitu peningkatan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup justru di prioritas nasional empat inilah anggaran terbesar dari tiga prioritas nasional ini dan inilah yang terus kita gali bagaimana bisa ditambah dari setiap program Eselon I yang mendukung.

Dari gambaran ini kami secara cepat ingin menunjukkan bahwa dalam dukungan KLHK untuk 2020, tadi sudah ditayangkan KLHK punya 3 prioritas nasional, punya 5 program prioritas, punya 11 kegiatan prioritas, punya 32 prioritas nasional dan ada proyek prioritas Kementerian LH, kita sementara 106. Dalam kaitan dengan usulan anggaran kita berusaha untuk tetap mengikuti dari format yang ada ini, karena terus terang belum bisa kita isi kegiatan-kegiatannya karena hasil evaluasi kita belum masuk seluruhnya untuk masuk di dalam program prioritas ini.

Nah, secara cepat contohnya di dalam RKP 2020, dari PN1, PN3, dan PN4 program prioritas kita sebagaimana yang diawal tadi saya sampaikan itu hanya 5, itu terbagi di PN1 satu, PN3 dua, PN4 dua. Demikian juga kegiatan prioritasnya yang mana disini peluang untuk mengusulkan kembali ini bertahap dari mulai proyek prioritas kementerian harus bisa masuk dulu

kegiatan strategisnya baru nanti bisa naik keatas dengan tetap tidak melepaskan diri dari kegiatan prioritas, secara cepat seperti itu.

Kemudian bagaimana isi dari kegiatan prioritas dari setiap PN1, 3 dan 4, dan juga anggaran yang terbagi ini yang pertama untuk PN1 manusia dan pengentasan kemiskinan di KLHK ada Rp392.035.236.000,00 hanya satu di program prioritas 4 pengentasan kemiskinan dan kegiatan priotasnya juga hanya reforma agraria dan perhutanan sosial. Jadi seandainya di KP4 ini dari hasil Rapat Dengar Pendapat dengan Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada penguatan yang harus didorong untuk Ditjen PKPL dan Ditjen PSKL ataupun program yang lain kita akan dorong, akan masuk di kotak ini, sementara kotak yang lain nampaknya masih jauh dibandingkan dengan yang kita prioritaskan.

Bagaimana contoh dari pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. Dari Peraturan Pemerintah atau program prioritas pengentasan kemiskinan, yang hanya 1 KP tapi bisa memunculkan dari kegiatan prioritas ini adalah proyek prioritas nasional yang sudah kita masukkan mulai dari penguasaan dan mendirikan Tora dan seterusnya. Ini yang kita perjuangkan dalam 2020-2024 bahwa reforma agrarian dan perhutanan sosial ini harus masuk dalam RPJMN dan harus masuk dalam PN1 dan akhirnya masuk di pengentasan kemiskinan dan berbeda dengan RPJMN yang lalu. Dari sinilah kita bisa yakin bahwa harapan untuk keadilan bagi rakyat untuk mengelola kawasan hutan itu bisa tercapai melalui kegiatan prioritas reforma agraria.

Demikian juga untuk prioritas nasional 3, berkaitan dengan nilai tambah riil industrialisasi dan kesempatan kerja, kita dianggarkan Rp412.048.200.000,00 ada di 3 program prioritas seperti yang saya sampaikan tadi, inipun juga kegiatannya tidak lepas dari contohnya KP2 peningkatan kualitas dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi. Ini di PN3 seperti apa isi PN3, kitapunya 5 program prioritas kaitan dengan nilai tambah sektor riil. Ini semua ada di Direktorat Jenderal yang sangat terkait dan dalam kaitan untuk optimalisasi hasil hutan.

Kemudian di prioritas nasional 4, yang saya katakan tadi bahwa terbesar anggaran dari KLHK Pimpinan dan Anggota yang kami hormati. PN4 ini banyak kementerian terkait disini sehingga ketika bicara integrasi program dan kegiatan, ini akan menjadikan program ini akan kuat. contohnya, program prioritas 2 peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air ini tidak lepas dari bagaimana penataan kawasan hutan, pmeliharaan pemulihan dan konservasi dan juga ada contoh Citarum Harum juga masuk disini. Inilah kegiatan prioritas yang masuk juga program prioritas keempat juga terbanyak disini untuk dua Dirjen termasuk Dirjen PPKL, Ditjen PSLB3, Ditjen Gakkum, kemudian Ditjen PPKL itu menempati di Peraturan Pemerintah 4.

Dan kalau kita lihat dari tugas besar di KLHK di seluruh Indonesia sebenarnya peningkatan anggaran bisa masuk di dalam PN4 ini karena KLHK banget. bagaimana nanti eksisting dilapangan yang memang harus ada percepatan ini bisa masuk dalam usulan tambahan kegiatan sebagai contohnya penegakan hukum itu juga bisa masuk KP4 dan juga bagaimana

kebakaran hutan juga bisa masuk di PP4 didalamnya ada penanggulangan dan kerusakan dan seterusnya.

Ini sebagai contoh PN4 ketahanan pangan energi dan lingkungan hidup, gambarnya seperti ini dari KP proyek prioritas nasionalnya ini ada di setiap penjelasan, sebagai contoh KP2 pemeliharaan pemulihan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya. Ini Ditken PDASHL dan Ditjen KSDAE terbesar anggarannya disini dan juga kegiatan pengelolaan terpadu berbasis pemanfaatan teknologi juga ada.

Nah, kemudian yang lain saya rasa sama bagaimana program prioritas 4 ini atau PN4 ini ada beberapa program prioritas. Akhirnya pagu anggaran 2020 dari skema yang sudah dibangun oleh Bappenas dan Kementerian/Lembaga juga sama ada 13 program Eselon I ditambah BRG dengan angka-angka sebagaimana yang ada di halaman 16. Totalitas hanya, bukan hanya, jadi totalitas Rp9.319.325.816.00,00 ini terbagi dua besar untuk BRG Rp312.995.525.000,00 dan KLHK Rp9.006.330.391.000,00. Kalau bisa kita lihat dari program 4 dan program 5 inilah kontribusi terbesar anggaran di KLH hampir sebesar Rp4,7 triliun. Dan program-program Eselon I rata-rata Rp300 miliar sampai Rp400 miliar. Untuk Inspektorat Jenderal ini juga hanya Rp86 miliar. Dan yang dukungan saya rasa itu tergantung dari bagaimana penguatan kelembagaan dan sebagainya.

Dan point hari ini dari 13 program nanti yang berbasis masyarakat dimanakah programnya itu ada penjelasan yang dibelakang nanti. Kemudian kontribusi dari Rp9 triliun ini Pimpinan, sebagaimana yang sudah dilaporkan juga oleh Ibu Menteri, itu sudah berkurang belanja pegawai Rp2 triliun, sehingga tinggal Rp7 triliun. Kemudian belanja operasional Rp789 sehingga tinggal Rp6,5 triliun. Nah, di belanja non operasional inilah Rp6,5 triliun ini sudah habis terpakai di prioritas nasional yang tadi kami sajikan didepan dengan PN1, PN3, PN4 sebesar Rp4.927.834.971.000,00 dan ada prioritas bidang disini hanya Rp1.590.000.000,00 dan disinilah sebenarnya kalau dalam struktur anggaran itu proyek prioritas Kementerian Lembaga yang masih diharapkan bisa tambah dari hasil analisis kita dalam tahun 2020 ini untuk usulan 2021. Bahkan kami juga berharap di tahun 2020 ini bisa usulkan tambahan anggaran untuk mencapai kinerja yang sudah kita harapkan.

Selanjutnya atas nama teman-teman Eselon I, kami berusaha untuk melihat kembali prioritas nasional yang sudah ada anggaran tadi, yaitu total Rp4.927.834.971.000,00 terbagi di dalam 11 program yang berbasis masyarakat, mulai dari program PAPL disini memang keterkaitan dengan usaha sekalipun intervensi regulasi sehingga hanya kecil sekali tapi tidak lepas dari bagaimana industri kecil menengah juga difasilitasi.

Kemudian program DAS dan HL, atas nama Ditjen DASHL beliau mengingatkan bahwa yang berbasis masyarakat ini nilainya Rp2.344.337.331.000,00 ini kegiatan besarnya pemantauan danau, mangrove, kemudian DAS, bibit produktif, rehabilitasi dan lahan secara bertahap tahun ke tahun terus dievaluasi dan sekarang menjadikan nilai terbesar dari pagu KLHK. Dan bagaimana rinciannya di seluruh Indonesia di

provinsi kabupaten termasuk mohon ijin daerah pembinaan dari Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini juga sudah terlihat jelas bagaimana percepatan yang harus dilakukan, termasuk KSDAE ini juga banyak sekali berbasis masyarakat tapi juga hanya 780.

Kami berharap Pimpinan, di program KSDAE ini menjadi perhatian kita semua untuk lebih ditingkatkan lagi karena kegiatannya sudah banyak sekali dan kelola di tingkat Tapak oleh Bapak Dirjen KSDAE ini sekarang menjadi perhatian Pemerintah. Sehingga diharapkan dari APBN akan menghasilkan PNBPN sebanyak mungkin dengan destinasi wisatanya paling tidak akan kembali ke pengelolaan taman nasional dan kawasan konservasi. Ini yang sedang disiapkan bagaimana infrastruktur yang dibangun Pemerintah bisa membangun konektivitas ke PN, ini totalitas dari anggarannya. Sementara di point 4 sampai dengan point 11 kalau boleh di dalam kaitan dengan point 7 perhutanan sosial kemitraan lingkungan ini sangat terkait sekali. Dan yang lain program sampah ini juga sangat terkait...

KETUA RAPAT:

Bapak Sekjen, dalam saya sudah disini kurang lebih 10 tahun lebih. Saya beberapa kali mengusulkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kenapa sih tidak ada sewa pakai, kenapa pinjam pakai. Contoh, dari Pluit ke Bandara itu makai hutan bakau. Terbayang tidak kalau satu mobil sewa pakainya itu Rp100 (seratus rupiah) satu tahun itu berapa pemasukan untuk kehutanan. Kemudian pengusaha-pengusaha tambang, sudah nambang seberapa sih pinjam pakainya atau sewa pakainya. Saya rasa dari hal tersebut bisa meningkatkan PNBPN. Karena apa saya katakan begini, jalan tol memang kebutuhan rakyat, proyek nasional tetapi perusahaan tersebut mendapatkan provit, menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Sementara mereka cuma pinjam, yang pinjam itu kan ada batasnya, namanya pinjam kan ada waktunya. Kalau perlu rubah Undang-Undangnya, kita rubah disini. Karena Jasa Marga kan kita tahu sendiri, pinjam pakai termasuk yang di Kalimantan kalau tidak salah, di Kalimantan Timur ada jalan tol. Coba bayangkan kalau sewanya satu meter Rp1 kalai satu tahun seberapa besarnya uangnya. Ayo kita rumuskan bersama itu saran saya Bapak Sekjen.

Lanjutkan.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Terima kasih Pimpinan, kami catat dalam kaitan nanti dengan regulasi-regulasi yang di tahun ini banyak yang akan kita ajukan untuk terobosan.

Kami lanjutkan Pimpinan, dari halaman 20 inilah sebenarnya yang dalam rinciannya sudah disiapkan oleh teman-teman Eselon I. Dan biasanya nanti penekanannya itu dari kegiatan-kegiatan ini, ini bisa langsung terlihat di daerah masing-masing. Nah, sebagai contoh yang kami akan ajukan atas nama teman-teman Eselon I di halaman 21 anggaran berbasis masyarakat.

Jadi ini lebih menukik lagi dari 4,9 tadi bagaimana 11 program Eselon I ini yang berbasis masyarakatnya khususnya beberapa Ditjen termasuk ada BRG disini yang nantinya peluang untuk ditingkatkan lebih besar lagi karena kegiatan ini bukan hanya sekali, sudah setiap tahun dilakukan bahkan belum bisa mencapai target yang diharapkan. Jadi sebagai contoh untuk Ditjen PAPL yang saya katakan tadi membantu usaha mikro menengah kecil dalam fasilitasi industry ini pagunya hanya kecil Pak, sementara yang dibutuhkan itu besar sekali dan program ini mengalah dengan program lain, karena program ini memang hanya intervensi regulasi bukan intervensi APBN.

Yang kedua, Ditjen PDAS ini kebun bibit rakyat, bibit produktif dan berkualitas. Sebagaimana arahan Presiden ini memang bagaimana penanganan secara menyeluruh konsep pemulihan. Rp200 miliar ini kalau menurut teman-teman sangat kecil dan dorongan itulah yang akan kita ajukan kembali dalam Rapat Dengar Pendapat ini.

Dan rinciannya walaupun kecil Pak, kita menjamin tidak ada yang terlewatilah dalam pembinaan daerah-daerah di seluru Indonesia khususnya Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI. Karena dari hasil ini terlihat nyata tumbuh masyarakat juga meningkat pendapatannya, dan juga bibitnya juga lebih berkualitas. Dan boleh kita lihat sama-sama dilapangan dan ada juga sistem yang dibangun oleh Ditjen PDASHL bagaimana memantau dari bibit ke bibit dari setiap lokasi. Ini yang mau kita dorong jujur sangat kurang Bapak yang kami hormati.

Kemudian Ditjen KSDAE Pak, pada kesempatan ini Pak Dirjen atas nama Kementerian, mohon ijin memang kami usulkan nanti sebesar-besarnya. Ketika 54 taman nasional yang berbasis masyarakat dan juga mau kita kembangkan bagaimana kelola sosial yang tidak lepas dari kehidupan masyarakat disana khususnya peningkatan ekonomi termasuk sarana ini tercatat hanya 10 miliar Pak. Jadi kalau dilihat perinciannya juga ada dengan Rapat Dengar Pendapat berbasis masyarakat ini kami baru lihat secara rinci bagaimana nantinya masuk ke dalam PN dan program prioritas serta kegiatan prioritas, kotaknya masih ada bukti ini dianggarkan walaupun kecil tapi yang penting masuk dulu.

Demikian juga untuk Ditjen PKTL kalau ini betul-betul program Tora ketika dilepaskannya kawasan hutan untuk kebutuhan eksisting transmigrasi dan sebagainya kita punya kewajiban menjamin batas-batas yang dilepaskan itu tetap berada di masyarakat yang memilikinya inipun juga hanya 56 miliar. Jadi kalau rakyat diberikan akses legal dari kawasan hutan yang dilepaskan yang kita kenal jadinya areal penggunaan lain itu tidak boleh lepas dari mereka sendiri, sekalipun nantinya ada sertifikasi yang dilakukan oleh Kementerian ATR, tapi anggaran yang dari Plano hanya Rp56 miliar sekian.

Demikian juga BP2SDM ini mohon ijin Pimpinan, kalau kami masukin apa adanya karena ini sudah transparan, terbuka. Kepala BP2SDM bagaimana menjamin yang Bapak sampaikan tadi kuatnya kelompok tani, kemudian fasilitas penguatan kelola usaha, ini terus terang hanya 2,5 miliar.

Inilah yang ada di dalam BP2SDM kami buka-bukaan ini yang harus didorong mengimbangi program Eselon I yang lainnya.

Demikian juga dengan Ditjen PSKL melalui Bank Pesonanya Bapak Dirjen, ini sangat diminati, ini juga hanya Rp22.650.000.000,00 dan kondisinya ini sangat bisa ditingkatkan lagi dengan melibatkan masyarakat sebanyak-banyaknya. Demikian juga dengan Ditjen PPI tidak usah saya sebut, ini kemudian Ditjen PSLB3 saja yang terus menerus bagaimana komitmen pemulihan lingkungan dengan mengelola sampah termasuk bagaimana mengolah sebelum dilakukan penanganan ini justru masyarakatnya sekarang sudah terlihat partisipasinya dan andalannya ini pusat daur ulang, bank sampah dan seterusnya sudah berhasil Rp182.322.000.000,00 setengah dari anggaran PSLB3.

Demikian juga PPKL dengan ekoripariannya Pak Karli, kalau nanti memang mau diperlihatkan ekoripariannya Pak Ditjen PPKL, yang bisa menembus bumi artinya bagaimana memperlihatkan kayak membedah rumah Pimpinan, sebelum dan sesudahnya itu jadi luar biasa dan sangat terlihat program nyatanya. Ini juga baru Rp85 miliar dan terakhir BRG disebelah kanan saya yang sudah kita tahu berbasis masyarakatnya bagaimana pemulihan lingkungan dengan restorasinya melibatkan masyarakat ini Rp150 miliar dari Rp300 miliar atau Rp400 miliar. Dan 10 Eselon I inilah sementara yang mau kita dorong untuk meningkatkan kinerjanya KLHK dengan menguatkan seluruh kegiatan yang kita yakini setiap tahun sudah berhasil mampu kita tunjukkan kepada publik dan tinggal bagaimana penguatan dari daerah. Contohnya Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim Pimpinan, bagaimana sarana brigade Karhutla bagi KPA dan masyarakat ini belum didukung.

Usulan kami Pak, ketika kami sudah mengintegrasikan antar program Eselon I, sebagaimana yang sudah kami paparkan dulu dan sekarang ini sudah masuk pencegahan sebelum adanya *hotspot* atau *fire spot* itu betul-betul ada usulan nanti Pak, kami untuk menambah anggaran ini ketika pencegahan itu menjadi prioritas utama kita dengan menguatkan di tingkat Tapak khususnya di lembaga KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) ini Pak. Karena disitulah sebenarnya Tapak yang menjaga kawasan hutan dari Karhutla, demikian juga di luar kawasan hutan peran dari Pemda. Nah, ini sementara masih kecil Pak. Dan yang lain saya rasa tidak terlalu kelihatan.

Nah, seluruhnya kami sudah siapkan per Eselon I bahan yang nantinya bisa didetailkan kembali oleh Dirjen, Sekditjen dan tenaga hali yang mampu menunjukkan point-point yang sudah kami sampaikan dalam halaman 22 ini. Dan akhirnya kami berharap dari Rapat Dengar Pendapat ini ada arahan Pimpinan dan Anggota, untuk kemajuan dari KLHK ini khususnya bagaimana penguatan rencana kerja anggaran 2020 sekaligus kami berharap mulai 2021 sampai 2024 harapan Pimpinan untuk lebih dari Rp10 triliun sebenarnya setiap tahun Pimpinan, kami sudah mengusulkan kurang lebih Rp15 sampai Rp16 triliun. Kalau memang mau diusulkan kembali teman-teman sudah siap untuk berbasis Tapak. Dan ternyata harus menyesuaikan dengan prioritas nasional lain sehingga program-programnya jadinya harus juga berkurang.

Tapi untuk dua program PDASHL dan program KSDAE Ini memang harus terus didorong termasuk programnya Ditjen Perhutanan Sosial, karena nyata sekali masyarakat itulah mau kita tingkatkan dalam kaitan dengan pemerataan ekonomi, termasuk untuk Ditjen PSLB3 dan pengendalian pencemaran ini juga tidak lepas dari pemulihan lingkungan dan bagaimana kelola usaha dari lingkungan dari masyarakat ini jadinya akan menjadi role model di provinsi-provinsi lain.

Demikian Pimpinan untuk paparan kami, atas nama Eselon I kalau diperkenankan kami ingin dulu ke isu strategis dari 3 Dirjen, supaya terlihat sekaligus bagaimana usulan anggaran ini bisa fokus daripada nanti presentasi Eselon I hampir sama yang saya sampaikan, bedanya hanya pagunya sekian, terdiri dari ini, belanja operasional, belanja pegawai. Begitu masuk ke masyarakat tidak lepas dari halaman 22 ini, tapi untuk special isu lingkungan ini yang akan disampaikan Ibu Dirjen PSLB3 supaya waktunya nanti bisa lebih komprehensif kalau diperkenankan Pimpinan, kami ingin masuk kepada lingkungan khususnya impor sampah. Kemudian nanti pengendalian DAS dan hutan lindung, kemudian bagaimana KSDAE dengan cara kerja barunya untuk menguatkan tingkat Tapak konservasi. Dan kalau nanti diperlukan kami dengan BRG untuk isu Karhutla.

Demikian.

Supaya nyambung Pimpinan, karena isu ini baru saja kita lalui dan Bapak Dirjen PDASHL sekarang sudah siap dengan anggaran terbesarnya. Rinciannya apa saja beliau akan sampaikan termasuk bagaimana kelola pengendalian banjir dan longsor ada terobosan yang beliau ingin paparkan setelah itu nanti mungkin dari konservasi yang sekarang menjadi isu juga. Pak Dirjen KSDAE dengan angka besarnya kami dulukan untuk memperlihatkan rencana kerja baru setelah itu Ibu Vivin dengan anggaran juga lumayan besar dari LHK-nya dan nanti hal-hal lain bisa saling didiskusikan kalau diperlukan dari halaman 22 ini.

Ijin Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih saudara Sekjen.

Saya hanya tergelitik saja ini, misalnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Dengan angka segini apa yang harus dikembangkan, apa yang harus dipikirkan. Kemudian Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, peningkatan sarana Brigade Karhutla bagi KPH dan mitra masyarakat. Apa yang mau dikerjakan dengan nilai segini. Kemudian Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Lahan Bekas Tambang. Ini kalau perlu nanti kita rapat gabungan saja dengan Kementerian ESDM. Bagaimana supaya pengusaha jangan mau enak saja, ngakunya nasionalis tapi habis menggali meninggalkan lubang yang besar-besar.

Saya beberapa kali ke Bangka Belitung luar biasa kerusakan lingkungannya. Kalau kita berharap dari Pemerintah Kabupaten Provinsi jangan terlalu banyak berharap, tapi kalau kebakaran hutan yang disalahkan itu Kementerian Kehutanan. Tidak kerja ya kalau dengan dana segini bagaimana mau kerja, kemarin kami ke Jambi melihat selangnya saja sudah pada busuk, pada sobek. Ini loh yang kita pikirkan. Kalau hanya Rp9 triliun sekian sampaikan saja nanti dengan Presiden apa yang mau dikerjakan, jauh dari cukup.

Kalau kita lihat tadi dari Rp9 triliun, Rp2 triliun lebih untuk belanja pegawai ini dan ini yang untuk programnya berapa. Saya juga nanti penjelasan berapa jumlah bibit yang siap ditanam secara global saja saya mau tahu. Karena nanti kita tidak tahu bagaimana, jangan seperti yang lalu-lalu jamannya Bapak Darori dulu. 1 miliar pohon kalau tidak percaya kamu hitung sendiri, pollybacknya pun tidak ada. Jadi jangan sampai terulang kembali.

Saudara Sekjen, sampaikan salam hormat kepada Ibu Menteri, saya sangat hormat sekali karena beliau berkunjung tidak diikuti oleh Eselon I-nya. Karena ada mitra kami di Komisi IV DPR RI, kemanapun Eselon I-nya wajib ikut. Saya berpikir kapan kerjanya Eselon I kalau bosnya pergi kemana semau ikut, kerjanya kapan, ini kita lihat semua komplit. Ini saya bicara apa adanya, mengkritisi. Sudahlah pencitraan dikurangi yang penting kerja untuk rakyat Republik Indonesia.

Silakan dilanjutkan siapa duluan, diatur.

Terima kasih.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Dirjen PDASHL Pimpinan, termasuk tadi bibit dan sebagainya.

Silakan Bapak Hudoyo.

Plt. DIRJEN PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG KLHK (Ir. HUDOYO, M.M.):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Yang terhormat Bapak Pimpinan,
Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Ijinkan kami selaku Plt. Dirjen PDASHL ingin menyampaikan....

KETUA RAPAT:

Bapak masih Plt?

Plt. DIRJEN PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG KLHK (Ir. HUDOYO, M.M.):

Masih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Kapan dilantiknya?

Plt. DIRJEN PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG KLHK (Ir. HUDOYO, M.M.):

Sebentar lagi Pak.

Terima kasih Bapak.

Sebelum kami sampaikan paparan ijin kami untuk menyampaikan capaian pekerjaan di PDASHL. Apa-apa yang telah kami lakukan sehingga Bapak dan Ibu di Komisi IV DPR RI mendapatkan gambaran yang *real* di lapangan. Seperti Bapak dan Ibu ketahui bahwa kemarin Presiden telah berkunjung ke Sukajaya di Kabupaten Bogor dan kami telah melakukan upaya pencegahan bencana banjir dan longsor.

Bapak dan Ibu sekalian.

Mohon maaf, kemarin Bapak Presiden telah berkunjung ke Sukajaya Kabupaten Bogor, dimana disana kami diberi kewajiban untuk menanggulangi bencana banjir dan longsor. Dan kami telah melakukan upaya-upaya rehabilitasi lahan, baik sipil teknis maupun yang vegetative.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Coba ditayangkan dulu.

Silakan Pak, sambil jalan Pak.

Plt. DIRJEN PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG KLHK (Ir. HUDOYO, M.M.):

Baik Pak, jadi mohon maaf Bapak Ketua, ini agak sedikit.

Sebelum sampai kesana kami pada tahun 2019 Pak, kami menyampaikan realisasi anggaran sebelum gambar Pak. Jadi 2019 kami mendapatkan alokasi anggaran Rp3,27 triliun. Ini langsung sudah sampai Pak, langsung ke halaman 4 Mas.

Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Kami ijin untuk menyampaikan realisasi kegiatan 2015-2019. Disana kami melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan. Bapak dan Ibu, inilah yang kami lakukan dilapangan, jadi kami membangun kebun bibit rakyat dan ini inisiasi dari masyarakat untuk masyarakat, di mana dalam satu kebun bibit rakyat ini kita fasilitasi satu KBR 50 juta. Jadi ini yang akan digunakan oleh Bapak dan Ibu untuk biasanya di daerah-daerah pemilihan yang Bapak dan Ibu miliki.

Kemudian kami juga mempunyai 52 persemaian permanen di seluruh Indonesia. Nah, dari persemaian permanen ini Pak, satu persemaian permanen itu menghasilkan 1 juta bibit per tahun. Ini sebarannya di seluruh Indonesia di 34 provinsi. Nah, di persemaian permanen ini juga kita hasilkan tidak hanya bibit tanaman hutan tetapi juga bibit buah-buahan.

Lanjut, ini Bapak dan Ibu, kami juga melaksanakan distribusi bibit dari persemaian permanen dimana bibit ini kita bagikan secara gratis. Satu KTP bisa mendapatkan 25 bibit, hanya dengan menunjukkan KTP. Kalau untuk kelompok yang kita cukup besar harus ada sedikit prosedur yang kita lalui, yaitu sedikit proposal karena kami akan mengecek di mana bibit itu akan ditanam. Ini penting bagi kita, supaya tidak dijual bibit itu, sehingga kalau memang ada kelompok yang mengajukan untuk bibit gratis kita akan verifikasi lokasi penanamannya.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Ijin Bapak Plt. Dirjen.

Ini jadi yang belum mengakses ini bukan hanya kelompok tapi perorangan juga bisa ya Pak?

Plt. DIRJEN PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG KLHK (Ir. HUDOYO, M.M.):

Bisa.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

KTP?

Plt. DIRJEN PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG KLHK (Ir. HUDOYO, M.M.):

Satu KTP 25 bibit.

Kalau untuk perorangan mengambil sendiri di persemaian Pak, tapi kalau kelompok *insya Allah* kita antar.

Lanjut, nah ini Bapak, ini hasil penanaman dari bibit yang dari persemaian permanen kami Pak. Jadi ini ada beberapa desa yang memanfaatkan bibit gratis ini kita sediakan bibit berkualitas dan ini ada beberapa desa yang memanfaatkan bibit gratis ini kita sediakan bibit berkualitas dan ini di Tegal telah menanam bibit jati yang unggul dengan luas 0,7 hektar dengan jumlah bibit yang 2.500 pohon.

Lanjut, kami juga membangun kebun benih Bapak dan Ibu. Jadi ini kebun benih yang dari benih ini diharapkan akan mendapatkan bibit-bibit yang berkualitas sehingga dari sini akan kita lakukan uji genetik maupun uji-uji yang lain. Ini salah satu contoh, ada di Musi Banyu Asin ada kebun benih Jabon Merah, juga kebun benih Jabon Putih, kemudian juga kebun benih Jelutung yang ada rasanya ini di Kalimantan di Palangkaraya yang Jelutung.

Lanjut, Bapak dan Ibu, ini yang jenis tanaman baru yang kita kenalkan kepada masyarakat, yaitu jenis Makadamia. Jenis ini sangat memberikan pengaruh terutama kenaikan taraf hidup masyarakat terutama petani karena kalau Bapak dan Ibu mungkin naik international flight Bapak dan Ibu pasti akan disuguhi kacang, dan itulah kacang Makadamia. Ini asalnya dari Australia dan kita sekarang kita bibit disini, di beberapa tempat.

Memang ada persyaratannya, yang pertama syarat tumbuhnya harus di atas 700 meter dari permukaan laut. Dan ini dengan PTPN12 rasanya Pak, di Bondowoso dia telah mengubah komoditas kopi menjadi Makadamia, karena satu hektar itu dalam setahun bisa menghasilkan 400 juta sampai dengan 1 miliar.

KETUA RAPAT:

Tapi saudara Dirjen tidak perlu di PTPN-lah tetap bangkrut. Jadi mau bawa PTPN 1 sampai 14 diomongin juga bisa tanam ini tetap bangkrut Pak.

Plt. DIRJEN PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG KLHK (Ir. HUDOYO, M.M.):

Bibit Makadamia ini kita bagikan gratis kepada masyarakat, jadi ini ada beberapa tempat. Kalau memang dia punya ketinggian yang cocok dengan Makadamia ini sudah kita lakukan terutama agar masyarakat bisa mengganti pola tanamnya dari sayur menjadi Makadamia. Ini kita mulai tahun kemarin dan sekarang bibit-bibit ini sudah *alhamdulillah* sudah terbagi habis kepada masyarakat dan tahun ini kita akan mengadakan pembibitan lagi di beberapa persemaian permanen.

Lanjut, kami juga melakukan rehabilitasi hutan....

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Ijin Pimpinan, mumpung berkaitan.

Kan ada yang dengan Makadamia yang coco kapa tidak juga dengan Talas Iles atau Pora atau Porang.

Pit. DIRJEN PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG KLHK (Ir. HUDOYO, M.M.):

Baik Pak, kalau Porang tanaman bawah.

KETUA RAPAT:

Tadi sudah dijelaskan saudara Haerudin, kalau Makadamia itu diatas 700 dari permukaan laut kalau Porang itu di tempat Bapak, di depan halaman rumah Bapak besok bisa dikirim bibitnya ditanam.

Pit. DIRJEN PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG KLHK (Ir. HUDOYO, M.M.):

Dan ini tanaman berkayu Pak, Makadamia itu.

Dan ini kami juga melaksanakan rehabilitasi hutan Mangrove Pak, dan ini akan terus kita lakukan terutama untuk Mangrove yang rusak guna perbaikan habitat ikan dan udang.

Lanjut, Bapak dan Ibu, ini yang sebagaimana dilihat kemarin oleh Bapak Presiden. Kami melaksanakan juga rehabilitasi teknis Pak, ini bangunan teknis yang kita bangun, yaitu ada DAM Penahan yang besar, kemudian ada Galiplak itu relative lebih kecil dan DAM Pengendali yang paling besar. Nah, untuk lebih besar lagi itu domainnya PUPR. Ini sudah kita lakukan terutama untuk daerah-daerah bencana Bapak dan Ibu.

Lanjut, kami juga membangun instalasi pemanenan air hujan yang ini merupakan program kita. Jadi kalau misalnya di Dapil Bapak dan Ibu sekalian, misalnya ada masyarakat yang perlu yang musim keringnya lebih panjang mungkin bisa memanfaatkan Ipah ini.

Lanjut, ini Bapak selain DAM Penahan dan Galiplak kita juga melakukan ekohidrolika, yaitu penguat dinding sungai. Ini kemarin juga kita lakukan di Sukajaya karena sungai-sungai itu di atasnya ada longsoran dan kemudian kita tahan dengan bangunan ekohidrolika.

Lanjut, kami juga melaksanakan kegiatan non APBN. Jadi tadi Bapak Ketua menyampaikan bahwa pinjam pakai itu salah satu kewajibannya adalah rehabilitas DAS kritis. Dan ini Pak, kita ini hanya menyediakan peta indikatif menetapkan peta lahan kritisnya akan direhab oleh para pemegang ijin. Itu sebelumnya Pak, tahun 2014 dan tahun 2018 sudah seperti itu. Dan ini akan kita nilai selama 3 tahun prosentase tumbuhnya harus di atas 75%.

Lanjut, baik Bapak dan Ibu, ijin kami menyampaikan capaian anggaran di tahun 2019. Anggaran kami terbesar Pak, dan ini kebetulan kita nomor urutan nomor 10 dari serapan anggarannya tapi di atas rata-rata

nasional Pak, masih 95,39%. Dengan total capaian Rp3.120.992.300.000,- dari total pagu Rp3,321 triliun.

Lanjut, Bapak ijinkan kami ini hanya rinciannya saya pikir kita paling banyak hampir semua itu di belanja moda, jadi kita untuk RHL. Terus, ini hanya sekedar Paicat mungkin ini pekerjaan-pekerjaan kami yang gambarkan di depan tadi. Yang paling kecil itu diinternalisasi RPDAS, yaitu kami berharap dengan rencana pengelolaan daerah aliran sungai itu menjadi bagian integral dari rencana umum tata ruang. Nah, ini kebetulan ada beberapa sedikit koordinasi yang terutama dari Pemdanya tidak bisa menerima rencana pengelolaan DAS itu menjadi bagian dari rencana pengelolaan tata ruang.

Lanjut, 2020 Bapak, kami mendapatkan alokasi anggaran Rp 2.799.916.214.000,- kemarin di Sukajaya Bapak Presiden telah menyampaikan supaya mengadakan realokasi anggaran terutama untuk daerah bencana, kemudian di calon Ibu Kota Negara dan kemudian 5 destinasi prioritas. Jadi nanti kami akan revisi antar Satker Pak, supaya itu ada penekan yang lebih besar untuk hal itu terutama yang untuk IKN dan 5 destinasi prioritas kami diberi tugas untuk membangun persemaian modern. Untuk di IKN, calon Ibu Kota Negara kami dibebankan untuk membangun persemaian dengan kapasitas 15 juta bibit per tahun. Bukan hanya untuk bibit tanaman kehutan kami juga seluruh penghijauan di lokasi IKN, baik itu tanaman penghijauan MPTS (Multi Purpose Tree Species) maupun tanaman-tanaman untuk taman jadi termasuk Kabubuya, Jakaranda, kemudian tanaman-tanaman bunga yang lain harus dihasilkan dari persemaian itu. Dan kita sudah alokasikan tahun ini anggaran untuk pembangunan persemaian di IKN Rp100 miliar yang sekarang sedang dalam proses lelang.

Untuk 5 destinasi wisata juga diberikan tugas terutama untuk juga sama untuk mendukung destinasi wisata kita akan membangun persemaian modern dengan kapasitas bibit 5 juta per tahun. Untuk Laboan Bajaj, Likupang, Danau Toba, kemudian Mandalika dan satu lagi Borobudur. Maaf Pak, untuk Borobudur kita hanya melaksanakan reboisasi untuk di Taman Borobudur. Taman Borobudur kita telah melaksanakan penanaman-penanaman untuk jenis yang sesuai dengan yang ada di relief candi. Jadi di relief candi itu ada beberapa tanaman yang itu kebetulan bibitnya sangat langka dan sulit dan kita diharuskan Presiden untuk menanam di sekitar Taman Borobudur sekitar 1 hektar.

Lanjut, Bapak dan Ibu ini rincian anggaran kami ada belanja pegawai, belanja barang, operasional maupun non operasional dengan komposisi seperti itu Bapak. Saya pikir ini kita lanjut saja. Nah, mungkin yang perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, di halaman 21 itu kami punya rehabilitasi yang mata anggaran 54, 04, 001, yaitu rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara vegetative. Jadi kami mohon misalnya nanti disana ada kebun bibit rakyat yang Bapak dan Ibu mohon sampaikan kepada kami supaya kami sesuaikan dengan data lahan kritis yang ada di kami. Jadi kami sekaligus memperbaiki lingkungan, kami juga sekaligus bisa mengakomodir keinginan Bapak dan Ibu sekalian untuk daerah pemilihan.

Lanjut, kami juga mengakomodir misalnya ada beberapa daerah yang longsor misalnya. Terutama seperti di daerah Bapak, yang misalnya daerah kering kita akan bantu dengan Ipah, yang daerah longsor dengan DAM Penahan, Galiplak maupun ekohidrolika. Kalau memang ada daerah pemilihan yang di daerah pantai kita akan melakukan rehabilitasi mangrove. Tapi kalau untuk bibit produktif dimana pun akan kita layani. Jadi kita untuk pembagian bibit itu.

Nah, ini rinciannya kami nanti akan karena kami diminta Satuan 3 nanti ini mungkin tidak bahas secara detail tapi itulah program-program kami setahun kedepan. Dan *insya allah* nanti kita akan berkoordinasi dan kami mohon juga data-data itu bisa kita terima sekarang sehingga pada saatnya Bapak melakukan kunjungan spesifik atau apa pun kita bisa mendampingi Bapak dan Ibu sekalian.

Mungkin demikian Bapak Ketua, Bapak dan Ibu yang kami hormati.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Bapak Dirjen, tadi boleh sedikit dijelaskan saja secara makro program rehabilitasi hutan Bapak dari 2015-2019 itu capaiannya seperti apa, globalnya saja Pak.

Terima kasih Pak.

Pjt. DIRJEN PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG KLHK (Ir. HUDOYO, M.M.):

Ini Bapak, jadi 2015 sampai 2018 anggaran kita itu relative kecil Pak, untuk RHL ini. Jadi ini mungkin ini data luasan RHL yang 2015 hanya 18 ribu hektar, kemudian 2016 hanya 21.195 hektar, kemudian naik secara signifikan di tahun 2017 36.984 hektar, turun lagi di tahun 2018 menjadi 25.325 hektar. Tapi pada tahun 2019 ini naik secara signifikan menjadi 207.119 hektar. Ini Pak, yang maksud kami ini yang kami penuhi dengan baik rehabilitasi dengan teknis maupun yang vegetative. Jadi itu yang untuk kami lakukan di DAS Prioritas, KPHL itu (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) hutan lindungnya sendiri, daerah tangkapan danau, sempit dan sungai, imbuhan air tanah dan *agroforestry*. Itu pola-pola yang kita lakukan untuk RHL di setiap Provinsi. Kami tadi juga melaksanakan hutan mangrove dan kami juga untuk pembangunan hutan kota. Namun, pembangunan hutan kota di 2 tahun terakhir kita tidak melakukan, kenapa? Karena ini sudah menjadi kewenangan Provinsi.

Kemudian yang untuk turunannya Pak, kami tadi kebun bibit rakyat, penanaman Peraturan Pemerintah itu persemaian permanen juga penanaman kebun bibit, kebun bibit di KPHL maupun berdasarkan dana DAK dan penanaman bibit produktif. Ini yang kita pakai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi tadi sepanjang ada permintaan kita penuhi dari 4

program itu Pak. Nah, ini kita naik terus *insya allah* ini bisa mencukupi selama kebutuhan-kebutuhan yang selama ini kita perlukan.

Mungkin demikian Bapak Ketua.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Interupsi sedikit Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan Bapak Firman.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Mohon ijin Bapak Pimpinan.

Bapak Sekjen, saya mungkin karena ini sudah masuk di posisi DAS. Sekarang kan sedang tren untuk menanam vetiver. Vetiver inikan menjadi salah satu upaya untuk menahan tanah longsor, di daerah sungai sekarang kan sudah ditanam kemana-mana, tapi kelihatannya belum maksimal. Apakah ini juga menjadi program daripada KLHK.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Dijawab langsung biar lebih singkat.

Plt. DIRJEN PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG KLHK (Ir. HUDOYO, M.M.):

Terima kasih yang terhormat Bapak Firman Soebagyo.

Jadi Vetiver menjadi program kita Pak, tapi ini program bersama. Yang paling banyak penyediaan Vetiver adalah BNPB, kita hanya menunjang karena itu bukan pohon Pak, jadi kami sangat terbatas sekali. Tapi untuk daerah-daerah bencana kita selain menyediakan bibit itu kita minta ada persemaian untuk Vetiver.

Demikian Bapak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bapak Firman, kalau saran saya lebih diperbanyak pohon buah-buahan yang besar bisa mencegah longsor dan *insya allah* pasti dijaga karena ada ditunggu hasilnya. Kalau dikasih bibit kayu pasti tidak dijaga karena tidak ada yang diharapkan. Giliran 20 tahun yang akan datang nebang ditangkap sama Polhut. Lebih baik dikasih bibit buah-buahan seperti alpukat, jengkol, pete dan lain-lain, itu mereka pasti jaga karena ada buah yang dihasilkan.

Silakan Bapak Sekjen siapa selanjutnya.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Ijin Bapak Dirjen KSDAE pagu yang terbesar kedua Pak, silakan Bapak Wiratno.

DIRJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM KLHK (Ir. WIRATNO, M.Sc.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi IV DPR RI,
Dan Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Dirjen KSDAE kami urut dari awal, mohon slidenya.

Dirjen KSDAE mengelola 27,14 juta hektar kawasan konservasi Bapak dan Ibu, di 552 lokasi. Dari kawasan tersebut kira-kira ada 8 kawasan yang telah mendapatkan 102 heritage site dari Unisco, kemudian 16 kawasan yang disebut mendapat julukan sebagai cagar biosphere reserves, 7 kawasan Ramsar site lahan basah dan 4 kawasan Asian Retiage.

Perana Ditjen KSDAE dalam prioritas nasional 2020, yaitu di prioritas nasional 3 terkait dengan PNPB, TSN, pembangunan infrastruktur, dan kelola jasa, wisata alam, ekowisata dan wisata bahari. Pada PN4 pemantapan ketahanan pangan, air, energi dan pelestarian lingkungan ini menyangkut juga pengelolaan dan penataan kawasan konservasi, peningkatan populasi spesies, operasional penyelamatan tumbuhan dan satwa liar, inventarisasi, verifikasi kawasan hutan, inventarisasi dan verifikasi batas desa hutan, pembangunan PLT berbasis mini hidro atau mikro hidro juga ada pengelolaan ekosistem essential dikawasan yang penting untuk satwa tapi diluar kawasan konservasi, penanganan gangguan kawasan konservasi, penanganan konflik territorial di kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi melalui usaha ekonomi produktif dan pemulihan ekosistem.

Alokasi anggaran Ditjen KSDAE 2020 perjenis belanja dan sumber dana, yang non operasional dari SBSN itu sebesar Rp123,9 miliar atau 6% dan non operasional HLN itu 2,5% sebesar Rp51,4 miliar dan non operasional PNPB sebesar 8,5% atau Rp175 miliar. Non operasional RNP 0,23% atau Rp4,6 miliar. Non operasional Rupiah Murni 32% sekitar Rp656 miliar. Belanja pegawai 31,7% atau Rp772,2 miliar. Dan belanja operasional sekitar 12,9% atau Rp265 miliar. Total anggaran 2020 sebesar Rp2,049 triliun.

Selanjutnya halaman 5 alokasi anggaran untuk sumber dana SBSN 2020 ini yang untuk pengembangan sarana prasarana wisata alam ada di ITN Aketajawe Lolobata di Halmahera 16 miliar, untuk Suaka Paruh Bengkok TN Gunung Gede 5,1 miliar. Untuk Century Elang Jawa, terus TN Halimun Salah

ini 13 miliar, untuk Century atau pelestarian Elang Jawa. Kemudian Teluk Cendrawasih ini pengembangan Wilsak Center. Jadi ini Hiu Paus yang sangat bagus sekali, satwa yang besar di laut tapi sangat familiar dan dekat dengan manusia, ini pengembangan pusat riset di sana dekat di Kabupaten Nabire. Kemudian ada pengembangan sarpras century di Batang Gadis di Sumatera Utara 10 miliar. Taman Nasional Gunung Palung ini stasiun riset cabang Panti, stasiun riset yang sangat penting untuk riset-riset orang hutan dan seterusnya, dan tumbuhan itu 8 miliar. Di ITN Banti Murung di Sulawesi Selatan Maros itu site agro wisata Patu Nuang serta terakhir yang di ITN Wasur diperbatasan dengan PNG itu Century Wallaby.

Selanjutnya sarana dan prasarana yang dikembangkan untuk wisata alam ini disekitar Danau Toba Bapak dan Ibu, ini 14,6 miliar itu yang dikembangkan di Balai KSDA Sumatera Utara, TN Batang Gadis dan sebagian pengembangan sarana dan prasarana wisatanya. Kemudian yang di Borobudur, di sekitar Borobudur kami mengembangkan wisata di Balai KSDA Jawa Tengah, KSDA DI Jogja, TN Gunung Merapi dan TN Gunung Merbabu.

Kemudian ada juga pengembangan di Bromo, Tengger, Semeru, sedangkan di KEK Mandalika di NTB itu yang dikembangkan Sarpras di KSDA NTB, Taman Nasional Tambora, Taman Nasional Rinjani. Sementara di Laboan Bajo Flores itu pengembangan di KSDA NTT, TN Komodo dan TN Kalimutu. Total dukungan KSDA untuk DPP Super prioritas sebesar Rp125 miliar.

Selanjutnya pagu anggaran 2020 per kegiatan kami sampaikan satu dukungan manajemen satuan kerja Ditjen KSDAE dengan total 1,2 pengelolaan dan informasi konservasi alam Rp46,7 miliar. Pengelolaan kawasan konservasi Rp349,6 miliar. Konservasi spesies dan genetic Rp100,26 miliar. Pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi Rp323,4 miliar. Pembinaan konservasi ekosistem essential Rp19,5. Dengan demikian total anggaran Rp2,049 triliun.

Selanjutnya halaman 8, alokasi anggaran Ditjen KSDAE 2020 per prioritas nasional berdasarkan RKP 2020 kami sampaikan belanja pegawai 37,7%. Belanja operasional 12,9% dan belanja program 49,4%. Prioritas nasional 03 nilai tambah sektor riil industrialisasi dan kesempatan kerja 14,9%. Prioritas nasional 04 ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup 21,6%. Prioritas bidang dukungan manajemen, hibah luar negeri dan layanan sarpras internal 12,9%.

Selanjutnya belanja prioritas nasional 2020, pertama nilai tambah sektor riil industrialisasi dan kesempatan kerja, jumlah unit usaha, pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetic TSL, tumbuhan dan satwa liar, ini sebesar Rp1 miliar. Jumlah destinasi wisata yang disiapkan untuk sebagai lokasi kunjungan ini ada Rp179 miliar. Jumlah lokasi pengembangan Sarpras, pengembangan DPP model SBSN Rp123,9 miliar. Total Rp304,640 miliar.

Sedangkan untuk PN4 ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup luas kawasan sebagai penyedia data informasi dan nasional di dalam kawasan konservasi Rp6,8 miliar. Dukungan dokumen pemulaan kawasan konservasi Rp12,9 miliar. Luas kawasan konservasi yang ditangani permasalahannya dengan dana Rp120,8 miliar. Jumlah desa yang mendapatkan akses pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif Rp74,4 miliar.

Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan kami punya program kemitraan kawasan konservasi, kawasan konservasi dikelilingi oleh 6 ribu desa lebih dan mereka yang tergantung kepada kawasan konservasi tersebut bisa bermitra dengan kami sambil menjaga kawasan mereka mendapatkan manfaat dari pengembangan agroforestry dan penjaan satwa liar.

Kami lanjutkan, jumlah kawasan konservasi yang ditekankan efektifitas pengelolannya dengan dana Rp119,3 miliar. Luas kawasan yang diverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman spesies dan genetik dengan dana Rp87,59 miliar. Jumlah izin pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam dananya Rp8,6 miliar. Luas kawasan sebagai penyedia data informasi rencana konservasi nasional di luar kawasan konservasi KEE dengan dana Rp4,1 miliar. Jumlah kawasan ekosistem essential yang ditingkatkan efektifitas pengelolannya dengan dana Rp8,07 miliar.

Selanjutnya target kinerja Ditjen KSDAE tahun 2020, kegiatan pengelolaan dan informasi konservasi alam, yaitu luas kawasan konservasi sebagai penyedia data volume 4,4 juta hektar. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektifitasnya sebanyak 54 unit kawasan konservasi, ini 54 taman nasional.

Yang kedua, pengelolaan kawasan konservasi, jumlah desa yang mendapatkan akses pengelolaan kawasan konservasi melalui ekonomi produktif dan kemitraan konservasi tadi 900 desa pada tahun 2020 ini luas area kawasan konservasi yang ditangani permasalahannya 1,8 juta hektar. Bapak dan Ibu sekalian, 1,8 juta hektar ini kawasan konservasi yang sudah dikelola oleh masyarakat, kemudian kita akan legalisir mereka dalam bentuk kemitraan konservasi sambil turut menjaga kawasan konservasi tersebut. Jumlah kawasan konservasi....

KETUA RAPAT:

Saudara Dirjen, saya tanya dulu ini kalau tidak salah pengelolaan konsevasi ada juga yang sama swasta ya?

DIRJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM KLHK (Ir. WIRATNO, M.Sc.):

Betul Bapak.

KETUA RAPAT:

Ini isu yang beredar ini sangat hangat sekali ini, si A dapat PT, kemudian PT-nya dapat hak, di-over tangankan, ditawarkan. Nanti saya kasih datanya.

**DIRJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM KLHK
(Ir. WIRATNO, M.Sc.):**

Baik.

KETUA RAPAT:

Saya ditanya oleh teman saya, ya saya tidak tahu karena belum ada datanya.

**DIRJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM KLHK
(Ir. WIRATNO, M.Sc.):**

Siap.

KETUA RAPAT:

Termasuk juga nanti dengan WWF, pemutusan hubungan kerja sama dijelaskan juga nanti.

Terima kasih.

**DIRJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM KLHK
(Ir. WIRATNO, M.Sc.):**

Terima kasih Bapak.

Kami lanjutkan, konservasi genetic luas kawasan konservasi yang diverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman spesies dan genetic PSL sekitar 10 juta hektar. Jumlah unit usaha pemanfaatan PSL yang telah memenuhi persyaratan ekspor edar sebanyak 60 unit.

Selanjutnya halaman 11 pemanfaatan jasa lingkungan, jumlah destinasi yang disiapkan sebagai lokasi kunjungan 18 destinasi. Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam 20 ijin. Kemudian pembinaan ekosistem essential luas kawasan sebagai penyedia data informasi dan rencana konservasi nasional diluar kawasan konservasi. Ini Bapak dan Ibu kawasan-kawasan diluar kawasan konservasi namun nilai konservasinya sangat tinggi, itu juga kita di minta mendapatkan mandate untuk mengelola itu bersama Pemerintah Daerah luasnya 8 juta hektar. Jumlah kawasan ekosistem essential yang ditingkatkan efektifitas pengelolaannya ini dikelola bersama forum multi pihak di daerah itu ada 14 unit KEE. Kemudian dukungan manajemen layanan perkantoran, dukungan manajemen dan layanan Sarpras internal masing-masing sebanyak 75 layanan.

Demikian Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan dan selanjutnya mohon arahan lebih lanjut dari Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi IV DPR RI.

Terima kasih.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):

Ketua, interupsi Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya Pak Andi.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Interupsi apa nanya?

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):

Ada sedikit yang saya tanya Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):

Terima kasih.

Pimpinan, Anggota dan Eselon I Kementerian LHK.

Ketua, dari penjelasan Bapak Dirjen KSDAE tadi menarik ada beberapa ribu desa yang selama ini sudah mendapatkan kerja sama pengolahan kawasan konservasi. Yang saya maksud Bapak Ketua, kita minta datanya ini sehubungan Dapil Anggota Komisi IV DPR RI, supaya sama-sama kita menguatkan pengawasannya.

Kemudian yang kedua, kita juga minta Bapak Dirjen terutamanya yang ada di Komisi IV DPR RI ini Dapilnya masing-masing. Kawasan-kawasan konservasi Pak, karena di Dapil saya itu ada berapa kawasan konservasi sudah menjadi bisnisnya para pejabat di bagi-bagi hutannya gitu, menjadi kebun. Bahkan ada juga kawasan konservasi sudah menjadi kawasan wisata. Nah, ini karena selama ini 5 tahun saya di Komisi IV DPR RI tidak mendapatkan informasi atau data-data Bapak Dirjen di Dapil kami ini, mana memang yang menjadi kawasan konservasi Pak, sehingga nanti kami di

Dapil ini yang selalu berada disana bisa mengawasi dan bisa menyampaikan kepada Bapak Dirjen bahwa ada penyalahgunaan kawasan konservasi.

Nah, saya kira ini penting Bapak Ketua, kita pentingnya sama-sama ini melakukan kerja bersama dan juga pemberdayaan masyarakat dikawasan konservasi sehingga keberadaan Anggota Komisi IV DPR RI ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di kawasan kehutanan. Jangan hanya pengusaha, pejabat daerah yang memanfaatkan kawasan konservasi ini.

Saya kira ini Bapak Ketua, ini hanya penegasan saja data-daya yang kami minta.

Terima kasih Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Andi.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Ketua.

KETUA RAPAT:

Pelan-pelan dulu dong, kasih Ketua menjelaskan dulu. Jadi Bapak Andi, kita tidak bicara Dapil tapi yang kita bicarakan adalah fungsi pengawasan kita, itu yang paling penting.

Silakan Bapak Johan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih Bapak Ketua.

Mau konfirmasi saja, ini bahan dari Dirjen KSDAE, saya tunggu-tunggu tadi ada halaman belakang itu menimbulkan keresahan publik ini Ketua.

KETUA RAPAT:

Apa itu Pak?

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Ini ada pembagian jatah, ini jatah Anggota Komisi IV DPR RI katanya, disitu ada angka-angka. Ini malah tidak dijelaskan ini Pak Ketua, dan ini menimbulkan keresahan publik karena pembagian yang mencurigakan. Contoh, misalnya ada Anggota yang calon Anggota Komisi IV DPR RI sekarang sudah jadi Menteri anggarannya Rp1 miliar. Saya yang setiap hari

hadir hanya Rp100 juta, ini perlu diklarifikasi. Malah Bapak Suhardi Duka nol disini nilainya.

Terima kasih Bapak Ketua.

F-PDIP (RIEKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan.

F-PDIP (RIEKY APRILIA, S.H., M.H.):

Biar sekalian.

Jadi kita ini wakil rakyat ini sudah lepas baju semua disini wakil rakyat Bapak Dirjen KSDAE, mudah-mudahan tidak salah sebut. Saya hanya menindaklanjuti masalah yang tadi disampaikan oleh rekan saya, mohon dipahami bahwa ada yang aneh dengan anggaran ini. Ini masalahnya dari tadi Bapak Darori sama Bapak Hendro sudah gelisah saja ini kenapa kok bisa kayak begini. Jadi tolong jangan sampai ini berat tertentu, bahasa saya berat tertentu, tolong klarifikasinya nanti kalau memang bisa diperbaiki tolong diperbaiki.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Teman-teman saya minta supaya dijelaskan dulu selesai semua, baru boleh bertanya biar komplit. Jadi setiap penjelasan tolong ditulis, apa yang nanti akan ditanyakan.

Ya dilanjutkan Bapak Sekjen siapa lagi.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Terima kasih Pimpinan.

Selanjutnya ijin dari lingkungan ini Ibu Vivin terkait isu-isu lingkungan.

Silakan Ibu Vivin.

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK (ROSA VIVIEN RATNAWATI, S.H., M.Sc.):

Terima kasih Bapak Sekjen.

Pimpinan Komisi IV DPR RI, Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Sebentar dulu pak ketua, coba dijelaskan saja dulu, tidak usah pembagian, dijelaskan saja dulu biar ini kita konsen, Kalau ini tidak membuat kita konsen dengan dirjen yang lain pak ketua karena ada nama kita disini nanti dikira kita bagi-bagi Kita sendiri tidak mengerti barang ini..

Ketua Rapat:

Yang mau menjelaskan ini pak Sekjen atau pak Dirjen.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Mohon izin saya ambil alih saja pak,

Ketua Rapat:

Iya.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Mohon maaf untuk bahan, itu untuk yang sudah agar ditarik kembali untuk Dirjen KSDAE. dan Kami sudah ada yang rekapitulasi dalam kaitan dengan peningkatan kinerja, dari ini memang intinya kita akan evaluasi 2019 dan rencana 2020 dan benar-benar atas contohnya tadi pak andi akmal untuk kawasan konservasi justru itu yang menjadi poin kita pak bahwa bagaimana kawasan konservasi dengan adanya Bapak/ibu yang terhormat ada disana ini semakin kuat jadi gak ada istilah bagi-bagi pak mohon izin, dari pak andi akmal tadi saja tadi sudah kami catat dan itulah yang sebenarnya mitra kerja pemerintah yang menjaga kebijakan dan informasi-informasi di lapangan justru kita butuh dari bapak/ibu sekalian, mohon izin pak dirjen karena di kami juga tidak ada dan itu menjadi evaluasi kita pak, mohon maaf jika memang ada yang terlanjur, sehingga mohon izin nanti kami minta untuk ditarik kembali. Atas nama semua Eselon I yang hadir disini saya yang bertanggung jawab pak.

KETUA RAPAT:

Jadi, bahannya diambil saja jangan sampai nanti ada prasangka buruk bahwa anggota dewan dibagi-bagi atau membagi-bagi. Fungsi kami adalah membantu Kementerian disamping juga mengawasi karena kami disini minimal satu bulan satu kali pulang ke kampung, kecuali pak Budi, pak budi 3 kali dalam satu bulan.

Setuju?

Saya lanjutkan ibu Vivin.

F-PG (Ir. MOH.ICHSAN FIRDAUS)

Ketua, sebelah kiri, saya ichsan pak ketua. Saya Cuma mempertegas saja apa yang di sampaikan oleh pak sekjen, bahwa ada terbuka terkait revisi anggaran ini ya pak ya.. itu saja saya mau mengklarifikasi, betul pak sekjen yah.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Betul,

F-PG (Ir. MOH.ICHSAN FIRDAUS)

Gitu pak ketua izin.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):

Pak ketua, satu menit saja saya pak ketua, saya kira gini, saya sepakat dengan pak sekjen tadi, tapi informasi sebanyak ini juga tidak salah ini kan semuanya rencana dari Dirjen untuk di dapil masing-masing untuk masyarakat bukan untuk kita ko, kenapa kita harus pusing ini untuk masyarakat, kelompok, kalau ada yang berbeda wajar dong karena kelompoknya mungkin beda-beda. Jadi saya kira gapapa pak sekjen ini kita terima tapi informasi dari pak dirjen KSDAE bagus juga untuk kita.

Terima kasih ketua..

KETUA RAPAT:

Saya rasa biar dilanjutkan dulu saja, karena saya harapkan nanti pukul 13 penjelasan para eselon I selesai kita break, kita masuk lagi setelah ishoma. Jadi biarkan dulu penjelasan.

Ya dilanjut.

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK (ROSA VIVIEN RATNAWATI, S.H., M.Sc.):

Baik terima kasih pimpinan, kami dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Dan Bahan Beracun Berbahaya akan menyampaikan dua hal, yang pertama terkait dengan anggaran dan yang kedua adalah tindak lanjut kunjungan lapangan ke Tanjung Priok dan ke Jawa Timur.. ya kami laporkan kepada pimpinan, dan bapak/ibu sekalian bahwa capaian anggaran Direktorat Jenderal PSLB3 untuk tahun anggaran 2019 adalah 98,66% berikut rencana kerja untuk tahun 2020, kami masuk dalam dua program prioritas bapak ibu sekalian yang pertama adalah program prioritas dua, peningkatan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air dimana ada kegiatan penyediaan fasilitas pengelolaan sampah di DAS citarum dan untuk program prioritas

empat, peningkatan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air kami ada beberapa kegiatan yaitu penyediaan fasilitas pengelolaan emas tanpa merkuri di daerah penambangan emas skala kecil, penyediaan fasilitas pengelolaan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan jadi dari sumber Rumah sakit, Puskesmas, Klinik, kemudian ada pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 non institusi, artinya adalah lahan terkontaminasi dari misalnya penambang-penambang liar yang ditinggalkan dan kemudian tanahnya terkontaminasi dengan merkuri. Dan kemudian pengurangan timbulan sampah nasional dan yang terakhir adalah pengelolaan sampah terpadu di wilayah pesisir dan laut. Dan yang diberi kotak merah itu adalah *highlight* merah itu adalah *major project*.

Yang berikut, ini adalah pagu anggaran Ditjen PSLB3 2020 kami tidak sebesar Ditjen DAS dan juga KSDAE. Total jumlah kami hanya Rp361.844.139.000,00 dan di tempat kami ada 6 eselon II, yang pertama adalah pengelolaan sampah anggarannya Rp143 miliar kurang lebihnya, kemudian pengelolaan bahan berbahaya beracun ada Rp15 miliar, kemudian ada pemulihan kontaminasi dan tanggap darurat limbah B3 Rp30 miliar kurang lebih. Ada verifikasi pengelolaan limbah B3 disini yang memproses perijinan limbah B3, yaitu sekitar Rp9 miliar dan penilaian kinerja pengelolaan limbah B3 ada Rp102 miliar kurang lebih. Ini yang besar juga karena ada fasilitas pelayanan kesehatan seperti insinirator yang kami bangun di beberapa daerah. Sementara untuk dukungan manajemen PSLB3 sebesar kurang lebih Rp59 miliar.

Yang berikut, kami akan menyampaikan anggaran berbasis masyarakat. Di sini total anggaran untuk kegiatan berbasis masyarakat ada kurang lebih Rp79.322.000.000,00. Dan Bapak dan Ibu sekalian, karena rasanya ini juga dibagi sehingga karena ini kecil-kecil ada daerah-daerah yang memang kami alokasikan anggaran di seluruh Indonesia yang paling utama adalah terkait dengan pengelolaan sampah, yaitu pusat daur ulang. Dan kemudian ada bank sampah, ada kemudian juga pembinaan dan fasilitasi dan kemudian juga beberapa ada motor sampah.

Yang berikut adalah kegiatan berbasis masyarakat yang terkait dengan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Di Provinsi Riau, kami akan membangun fasilitas pengelolaan emas bebas merkuri. Di Provinsi Jambi, kami akan bangun fasilitas pengolahan emas bebas merkuri. Juga di Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah.

Pemilihan dari pembangunan fasilitas ini adalah kami harus memastikan bahwa wilayah itu adalah wilayah pertambangan rakyat, satu. Kedua, di tempat yang akan kami bantu untuk fasilitas pengolahan emas ini adalah mempunyai ijin dan kalau ilegal kami tidak bisa bantu, karena berarti kami mensupport kegiatan ilegal. Yang berikut, ini total anggaran Rp10 miliar Bapak dan Ibu sekalian.

Yang berikut adalah kegiatan berbasis masyarakat dari Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3. Di Provinsi Aceh, di Provinsi Sumatera Barat, Kalsel, NTT, NTB, kami akan membangun fasilitas

pengolahan limbah B3 dari sumber Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Artinya, ini insinirator sebetulnya yang kami bangun. Sementara Barat di Provinsi Kalimantan Barat kami akan membangun fasilitas pemanfaatan oli bekas menjadi sumber energi dan di Provinsi Sumatera Selatan. Total anggarannya sekitar Rp93 miliar.

Yang berikut kami mohon bantuan Bapak dan Ibu sekalian Anggota Komisi IV DPR RI, untuk bisa mengawasi bahwa di daerahnya ada bantuan-bantuan yang kami berikan untuk masyarakat di Dapil Bapak dan Ibu sekalian. Jadi bisa dibaca disini ada fasilitas pembangunan PDU, ada bank sampah, ada bank sampah induk, ada pembangunan biodigester sampah, dan ada pembangunan rumah kompos.

Berikut, sementara kami juga membangun seperti yang tadi sudah kami sebutkan, yaitu pembangunan fasilitas pemanfaatan oli bekas ada di Kabupaten Banyu Asin, ada pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 ada di Banda Aceh dan ada di Manggarai Barat di NTT. Sementara untuk pembangunan fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri kami ada di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Kolaka Timur. Jadi kami sekali lagi mohon bantuan Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa mensupport kami dan mengawasi pelaksanaan dari bantuan-bantuan ini dengan berbasis masyarakat.

KETUA RAPAT:

Ibu Dirjen, kalau saya tidak bisa mengawasi karena di Dapil saya sama sekali tidak ada.

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK (ROSA VIVIEN RATNAWATI, S.H., M.Sc.):

Siap Pak.

KETUA RAPAT:

Supaya jelas, karena saya diminta mengawasi tetapi di Dapil saya tidak ada, dan saya juga tidak minta, supaya *clear* gitu saja.

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK (ROSA VIVIEN RATNAWATI, S.H., M.Sc.):

Siap Pak.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Ketua, sebentar Ketua.

Ini saya ingin pertimbangan, bukan pertimbangan minta ya, apa yang menjadi pertimbangan di kota-kota yang tadi masih dibangun tadi. Apa memang pusatnya itu, logika saya oli itu banyaknya di kota besar Ibu, oli

bekas itu di Kota Bandung, Kota Jakarta, itu tempat oli. Kalau di Kalimantan tambang, banyak mana di sana dan di sini, logika saya itu tidak masuk.

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK (ROSA VIVIEN RATNAWATI, S.H., M.Sc.):

Ijin Bapak, untuk....

KETUA RAPAT:

Biarkan dijelaskan dulu.

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK (ROSA VIVIEN RATNAWATI, S.H., M.Sc.):

Untuk pembangunan fasilitas oli bekas ini memang salah satunya bukan di kota besar Pak, karena ini memang diperuntukkan bagi para nelayan yang banyak oli-oli bekas dari perusahaan-perusahaan dan sebagainya itu bisa dikelola lagi dan itu dipakai untuk nelayan. Tapi masukan dari Bapak akan kami pikirkan dan juga dari Bapak Ketua tadi.

Dan lanjut, selanjutnya adalah tindaklanjut kunjungan kerja. Berikut, kami ingin menyampaikan sebetulnya hal ini sudah kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang ikut untuk kunjungan kerja bersama dengan kami di Tanjung Priok dan di Jawa Timur. Untuk kasus impor sampah dan impor limbah B3 sebetulnya yang menjadi isu pokok yang pertama adalah tidak ada larangan mengimpor scrap kertas dan scrap plastik sebagai bahan baku. Yang dilarang adalah mengimpor sampah dan limbah B3, masalahnya scrap kertas dan scrap plastik tersebut bercampur dengan sampah dan limbah B3 yang dilarang menurut Undang-Undang. Selama ini scrap kertas dan scrap plastik yang tidak bercampur dengan sampah dan limbah bisa diterima. Sedangkan yang bercampur akan di-reskpor ke negara asal. Intinya seperti itu.

Berikut, fakta lapangan ini adalah untuk wawasan Bapak dan Ibu sekalian, bahwa yang masuk selama ini ke wilayah NKRI scrap kertas dan scrap plastik itu campur. Bapak lihat ada sepatu bekas, ada kemasan bekas minyak pelumas, ada pokok sekali pakai, ada limbah elektronik yang tidak kami pampang ada bekas kondom Pak, mohon maaf sudah dipakai disitu juga ada.

Berikut, yang lain adalah ini contohnya tercampur dengan limbah medis, ada suntikan, ada kemasan aki bekas, obat, ban bekas, baju bekas, Kasur bekas, tas bekas. Jadi memang kita tidak mau negara kita menjadi tempat sampah.

Yang berikut, berikut ini adalah yang ketemu di Surabaya. Kalau Surabaya itu kertas kalau di Batam dan Tanjung Priok yang terakhir kita lihat itu plastik. Nah, ini yang tercampur ada ampul bekas suntikan, ada potongan kabel, ada selang infus bekas, limbah elektronik. Jadi memang bermacam-

macam yang masuk kesini karena kami yakin bahwa ini asalnya dari TPA sebetulnya yang dibawa ke Indonesia.

Berikut, ini adalah dasar hukum larangan memasukkan sampah dan limbah B3. Saya tidak akan menjelaskan satu per satu, intinya adalah ada dua Undang-Undang yang melarang masuknya sampah, masuknya limbah B3 ke wilayah NKRI, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Yang berikut, ini sampah dari atau ini adalah industry daur ulang yang ada Bapak dan Ibu waktu ke Mojokerto kemarin, ke Desa Bangun. Mereka punya pekerjaan memilah sampah Bapak dan Ibu. Sebenarnya pekerjaan ini bukan pekerjaan yang jelek, karena dengan memilah sampah ini kita mendorong sirkular ekonomi di masyarakat dan sampah tidak kemudian hanya dikumpul, diangkut dan dibuang. Tapi memang betul-betul kita pergunkan kembali. Kalau kita lihat harganya itu adalah Rp2,5 juta per ton, nah kalau impor kalau bahan baku dalam negeri Rp2,5 juta per ton. Kalau impor dengan yang sampah tadi maka harganya hanya 40 US Dolar sampai dengan 80 US Dolar per ton. Jadi memang dilihat dari perbedaan harganya maka katanya murah kalau mengimpor campur dengan sampah dan limbah B3.

Berikut, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah alur aktifitas importasi dan masyarakat yang ada di Jawa Timur. Jadi ada impor kertas sebagai bahan baku kertas, kemudian masuk ke industry. Nah, dari industry maka dia akan dipilah Pak, yang dia butuhkan bahan baku kertas diambil, yang sampah-sampah tercampur dia jadikan CSR diberikan kepada masyarakat. Nah, itu sampah impor persoalannya.

Yang terjadi adalah 56 ton per hari dan kemarin waktu kita ke Desa Bangun memang mereka sudah berkurang sekali sampai impornya karena sudah tidak boleh. Padahal mereka kalau dari sampah impor itu Bapak dan Ibu sekalian, mendapatkan pendapatan yaitu 200 ribu per hari. Jadi memang kemarin ketika Bapak dan Ibu ke Mojokerto melihat bahwa ada masyarakat yang juga protes tidak boleh mendapatkan sampah impor lagi. Dan sisa residunya selama ini dijual ke pabrik tahu untuk dibakar. Tapi kemarin kita sudah mendapatkan penjelasan bahwa sudah tidak pakai lagi residu plastik tetapi mereka memakai palet kayu sekarang. Berikut, ini adalah kondisi Desa Bangun waktu 3 Juli 2019, kemarin sudah tidak kayak gini waktu Bapak dan Ibu ke Mojokerto.

Yang berikut, ini kegiatan pemilihannya. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat sebetulnya yang mereka lakukan memilih-milih ada botol plastik, ada kertas dan sebagainya. Dan semuanya ini adalah merk-merk luar negeri Pak, dari Jerman, dari Amerika, bukan sampah dalam negeri.

Berikut, ini yang kita lakukan kemarin 1 Februari 2020 dengan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat sampahnya itu sekarang residunya yang sudah tidak punya nilai ekonominya, sudah tidak bisa di 3R kan. Jadi tinggal

disitu, ditumpuk, maka ada police line dan kita juga dari Dirjen Gakkum ada juga ditempat yang sebelahnya juga dikasih line dari Direktorat Jenderal Gakkum.

Berikut, tindaklanjutnya. Bapak dan Ibu sekalian, ketika bersama dengan Pimpinan ke kawasan Marunda kita ada perusahaan yang kita temui adalah New Harvest Internasional dan Advance Recycle Technology. Jumlah container yang masih ada di sana adalah 1.078 kontainer yang belum direkspor. Dan memang ketika kami tanya kepada Bea Cukai sebelum Bapak dan Ibu berkunjung kesana, itu mereka jawab bahwa mereka masih mencari dokumen-dokumennya. Jadi belum ada dokumen pemberitahuan disitu dari si New Hrvest Internasional.

Berikut, setelah Bapak dan Ibu berkunjung kesana kami berkomunikasi dengan Dirjen Bea Cukai dan hari ini rencananya staf akan turun bersama dengan Bea Cukai untuk mengecek karena Dirjen Bea Cukai sudah mengirimkan surat kepada kami untuk turun ke lapangan bareng-bareng untuk mengecek mana yang tercampur dan sampah, mana yang bersih. Karena memang Dirjen Bea Cukai tidak mau kalau container itu tidak dicek bersama dengan kami karena mereka memang tidak punya pengetahuan tentang sampah atau limbah. Dan diharapkan setelah itu kita meminta kepada perusahaan untuk reespor, kalau tidak mau reespor maka kami akan kerja sama dengan Bapak Roy Direktur Jenderal Gakkum untuk bisa menindaklanjutinya untuk ditindak pidana.

Yang berikut, Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah langkah penyelesaian Jawa Timur yang kemarin kita kesana. Yang pertama, jangka pendek memang waktu dilapangan kita cek tinggal residunya. Kita ingat ya residu dan sebagainya itu numpuk itu tidak ada nilai ekonomisnya. Takutnya residu itu akan kemudian *run of* ke sungai menjadi pencemaran atau dia bakar. Kalau dibakar kan juga tidak boleh dilarang Undang-Undang. Sehingga kami akan meminta kepada pabrik kertas, kita kemarin ketemu dengan Pakrin untuk membakar residu itu di insinirator, sehingga rapi. Itu yang pertama, jangka pendek. Jangka panjangnya memang penyelesaian aspek sosial itu perlu dilakukan.

Daerah itu, des aitu memang sejak tahun 1978 sudah mengelola memilah sampah Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sehingga kemarin juga dengan Bapak Bupati Mojokerto dan dengan Pimpinan Komisi IV DPR RI itu menginginkan bahwa mata pencaharian mereka tetap maka kita akan mengoptimalkan sampah dalam negeri untuk dipilah dan kemudian dipakai lagi. Yang pertama, kami dari KLHK memang akan membantu bank sampah disitu dan membangun pusat daur ulang.

Intinya seperti itu Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Dan saya berterima kasih sekali dengan dukungan dari Komisi IV DPR RI untuk penyelesaian kasus sampah impor, karena luar biasa viral dan kemudian menggerakkan instansi sectoral untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ibu Dirjen, saya sedikit tahu mengenai hal sampah. Yang saya tahu negara asal itu tidak akan menerima kembali kecuali direespor ke negara miskin, di Afrika dengan membayar mereka. Karena saya sudah tanya-tanya kesana-kesini itu permasalahannya. Ada juga yang tidak punya ijin Pak, betul kan. Untuk yang tidak punya ijin apa yang harus LHK lakukan.

Kemudian tadi Ibu Dirjen mengatakan ngecek sama-sama dengan Bea Cukai. Mau ngeceknnya bagaimana Ibu? Kalau hanya membuka container satu lapis itu botol plastik dalamnya limbah. Karena ini juga terjadi dengan buah-buahan yang impor dari luar. lapisan kedua belakang itu isinya adalah jeruk tapi ditengah-tengahnya ada yang tidak boleh diimpor misalnya wortel. Nah, ini yang jadi masalahnya, tolong tadi ditayangkan lagi tadi itu yang PT.

Kemudian saya juga akan mengundang perusahaan-perusahaan tersebut termasuk yang Jawa Timur dan juga ada yang di Jawa Tengah Ibu, ada di Jawa Tengah mengenai limbah kertas itu juga kita panggil sekalian termasuk waktu kita bahas di Tanjung Priok 5 kementerian lembaga, LHK, Perindustrian, Perdagangan, Kementerian Luar Negeri dan Bea Cukai.

Saya juga mengusulkan nanti kita sidak ke tempat yang tercantum PT-nya ini karena setahu saya masih banyak container di PT-PT ini yang belum dibongkar. Ya malu lah kita masa bangsa sebesar ini Cuma menerima sampah, dimana harga diri kita sebagai negarabesar. Ini loh yang terjadi, saya sangat-sangat miris sekali melihat sampah yang begitu, sudah gitu arogansinya pihak surveyor mengatakan dia benar. Bapak Dedi Mulyadi saja ini orang yang sabar loh Bapak dan Ibu, hampir melempar sampah ke muka orang Sucopindo itu. Karena dia tetap ngotot berdasarkan peraturan, peraturan bagaimana? sudah ketahuan sangat jelas sekali melanggar peraturan. Jadi nanti kita atur waktu karena saya sudah cek juga ada yang di Bekasi dan ada yang di Tangerang.

Kemudian satu hal yang penting Bapak Roy, di Mandailing Natal bukan mandailing natal tapi Sumatera Utara itu pencemaran merkurinya gila-gilaan. Sampai Ibu melahirkan anak yang cacat. Ada yang ususnya diluar, ada yang segala macam bentuk lah. Nah, ini nampaknya tidak menjadi konsen dari Ibu dan Bapak Roy. Saya minta segera dicek ulang, karena waktu itu kita kesana, kita ke Sumatera Utara saya sama Bapak Daniel yang terjadi kolera virus Afrika, sangat bagus sekali memang. Jadi Pemerintah Daerah meminta kepada masyarakat jangan membuang babi yang mati karena virus ke sungai. Apa yang dilakukan masyarakat? masyarakat sangat nurut sama Pemerintah Daerah. Tidak membuang kesungai bangkai babinya, tapi membuang ke pinggir jalan, karena judulnya tidak boleh membuang ke sungai, tapi ke pinggir jalan ya boleh.

Sama juga kemarin kami ke Gunung Kidul, disitu ada wabah antrak sapi, sapi yang sudah mati 78 ekor. Jadi kalau bahasa kita bilang eman-eman sapi mati dibuang, dikubur ya sayang, jadi dipotong dan dibagi-bagi. Nah, apa dampaknya terhadap manusia ini? kemarin juga saya langsung meminta kepada mitra kita yang 78 ekor diganti, supaya nanti kalau ada sapi mati lagi jangan dipotong dibagikan, kan ada prosedurnya digali, dikubur, dikasih kapur baru ditimbun. Kalau tidak mereka bilang lebih baik saya potong, saya jual. Kalau ada penggantinya kan paling tidak terobatilah. Tolong yang Mandailing Natal supaya jadi perhatian.

Lanjutkan Bapak Sekjen siapa lagi.

ANGGOTA:

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Nanti saja, tunggu selesai dulu, karena saya tadi menjelaskan masalah Mandailing Natal ini tidak masuk di dalam konsen dari Ibu Vivin tadi.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Terima kasih Pimpinan.

Dari isu-isu strategis sudah kami sampaikan Dirjen-Dirjen yang terkait. Dan untuk isu-isu lain yang boleh kami sampaikan seandainya ada yang dipertegas lagi dari Pimpinan dan Anggota untuk Dirjen-Dirjen yang khusus misalnya.

KETUA RAPAT:

Jadi untuk yang lain yang itu jelaskan secara singkat, apa yang sudah dilakukan, dan kira-kira apa yang akan dilakukan. Seperti tadi saya minta Bapak Roy untuk turun ke Mandailing Natal termasuk mungkin wilayah-wilayah lain juga ini hal yang sangat penting. Jadi tolong jelaskan secara singkat saja, termasuk pagu anggarannya apa. Karena saya lihat masa Inspektorat Jenderal Cuma sekian, bagaimana mau kerja. 86 miliar Ibu, kalau naik pesawat bolak balik juga setahun juga tidak cukup.

Silakan.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Baik Pimpinan, ijin plt. Irjen akan menyampaikan.

IRJEN KEMETERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Ir. LAKSMI WIJAYANTI, MCP.):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota.

Saya mungkin menyampaikan secara singkat saja, sebetulnya ada paparan mungkin sambil disiapkan secara umum saja saya sampaikan. Inspektorat Jenderal itu mempunyai dua peran utama, yaitu menjamin akuntabilitas dari pelaksanaan kegiatan maupun keuangan yang kita sebut dengan peran *assurance* atau memberikan garansi kepastian kejaminan akuntabilitas. Dan karena mulai tahun 2019 Itjen KLHK sudah naik level kapabilitasnya menjadi level 3, maka kami juga sudah menjalankan peran *advising* atau konsultan kepada para Eselon I. Kenapa ini bisa diperbolehkan karena kapabilitas kami sudah memadai untuk secara proaktif melakukan kegiatan pencegahan resiko dibanding pos audit.

Oleh sebab itu, secara umum kalau bisa kami sampaikan alokasi pagu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Itjennya memang betul Rp86 miliar. Dimana belanja pegawainya itu adalah 34% sekitar Rp30 miliar, ada operasionalnya 5% atau Rp5,4 miliar. Sehingga belanja total kegiatan kami itu adalah 59% atau sekitar Rp51 miliar. Kalau tadi disampaikan oleh Bapak Pimpinan, bagaimana kami menjalankan pekerjaan kami dengan baik, intinya demikian.

Sebenarnya yang paling penting adalah dari 271 satker yang kami awasi di KLHK, pelaksanaan pengawasannya dilakukan berbasis resiko. Berarti tidak setiap tahun 271 Satker diaudit, direview, dievaluasi, tidak seperti itu. Karena juga sebenarnya adalah mekanisme eksternal auditing dari BPK bahkan kadang-kadang juga kita kerja sama dengan BPKP. Atas dasar hal tersebut, maka sebetulnya pos audit sangat kita gantungkan kepada, pertama kegiatan-kegiatan yang memiliki prioritas seperti anggarannya besar, prioritas nasional, menjadi sorotan publik dan sebagainya. Dan yang lebih penting yang sudah beberapa kali memiliki track record temuan berulang. Yang menjadi kunci adalah justru kami menjalankan peran agar resiko dari awal itu sudah bisa dihandle secara internal oleh unit tersebut, karena sebetulnya itu misinya bukan selalu tergantung baru kalau diaudit baru ketahuan masalahnya, tetapi justru setiap unit itu bisa menjalankan proses pengendalian internalnya masing-masing.

Oleh sebab itu, pada tahun 2020 mungkin langsung saja ke halaman 12. Lanjut, halaman 12 kami sudah membuat program kerja pengawasan tahunan, yaitu kita bagi menjadi kegiatan pendampingan. Pendampingan itu mulai dari persiapan pemeriksaan BPK, tetapi kegiatan beresiko tinggi yang kita lakukan pendampingan sejak awal dilakukan itu adalah pendampingan pelaksana rehabilitasi hutan dan lahan. Pendampingan pelaksana kegiatan perhutanan sosial, pendampingan pengembangan program destinasi wisata, yaitu pada taman-taman nasional terpilih. Pendampingan pada pengolahan

sampah, limbah dan B3. Pendampingan pada pengelolaan hibah luar negeri, serta pendampingan pada Dalkarhutla 2020. Kepada halaman 12, 9, 10.

Baik, selain kegiatan pendampingan. Pendampingan itu intinya adalah advising mulai dari perencanaan selalu kita kritisi, selalu kita yakinkan bahwa semua berbasis bisa diselesaikan. Kami juga melakukan proses review, mulai dari perencanaan pengendalian, laporan keuangan, sampai dengan perencanaan BMN maupun RKKL, itu juga kami lakukan review. Evaluasi otomatis mendampingi dari kegiatan review, kita review dan kemudian setelah dijalankan dipertengahan kemudian kita lakukan evaluasi contohnya kepada BMN, laporan keuangan dan sebagainya.

Demikian juga audit kinerja, audit kinerja ini terutama menjadi andalan kami karena menguji bagaimana perencanaan, pelaksanaan proses bisnis, kelengkapan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa kegiatannya akuntabel dan sesuai SOP itu dijalankan. Jadi kurang lebih sebetulnya ini adalah kegiatan program kerja pengawasan tahunan kami. Jadi kita sesuaikan dengan tingkat resiko dari kegiatan yang ada.

Lanjut, ini adalah alokasi anggaran yang kita lompat saja langsung ke non operasional, yaitu Rp51 miliar. Tadi ditanyakan sebenarnya cukup atau tidak? Yang penting untuk kami sampaikan sebetulnya cukup atau tidaknya bisa kita sesuaikan dengan metodologinya. Kalau kami jelas tahun ini dengan ketersediaan anggaran yang ada kami utamakan adalah untuk memperbaiki sistem informasi sehingga prosesnya bisa lebih smart untuk melakukan auditing dengan sistem berbasis komputer, kemudian juga evaluasi dengan metodologi yang jauh lebih baik melalui data-data analitik dan sebagainya. Kami bekerja sama bersama dengan Itjen Kementerian Keuangan, kemudian juga dengan BPK, BPKP dan bahkan juga dengan KPK untuk hal seperti ini.

Beberapa yang kemudian penting untuk kita sampaikan adalah kami punya program khusus Saber Pungli serta anti korupsi melalui program pengembangan zona integritas. Secara umum itu dilakukan saat ini bagi semua Satker, namun berdasarkan beberapa track record karena kami juga mengelola aduan masyarakat soal penyimpangan atau dugaan indikasi penyalahgunaan wewenang kepada ASN KLH, maka kami akan fokuskan kepada Satker-sateker yang punya resiko atau punya tingkat pengaduan tinggi dari masyarakat untuk program khusus mengenai penanganan Saber Pungli maupun anti korupsi tersebut.

Oleh sebab itu, secara umum ini adalah alokasi anggarannya kami besar dilayanan dukungan manajemen, yaitu sekitar Rp25 miliar dari Rp51 miliar. Terutama ditujukan pada pengembangan supporting mulai dari sistem program Saber Pungli, program anti korupsi dan sebagainya itu dilakukan disana. Kemudian sisanya kita bagi berdasarkan inspektur wilayah karena kami punya 4 inspektur wilayah dan 1 inspektur investigasi. Nah, itu angkanya disesuaikan. Kebetulan pagunya tidak banyak berubah dari tahun ke tahun karena sebetulnya unit cost kami itu sudah cukup tetap dari tahun ke tahun yang membedakan adalah perbedaan berkurang atau naiknya di dukungan manajemen. Misalnya kami mau investasi banyak di IT supaya maka otomatis

akan ada penambahan disana, tetapi apabila itu sudah jalan bisa saja nanti itu tidak lagi perlu setinggi itu.

Tetapi mengenai pertanyaan apakah kurang atau tidak, tentu saja pertama kami tentu mengupayakan efisien belanjanya Itjen, sehingga sebenarnya tidak juga otomatis bahwa itu ditambah, otomatis juga kemudian akan terjadi peningkatan luar biasa. Sekali lagi kami justru ingin menekankan pada peran pencegahan sehingga mungkin akan lebih banyak justru program-program pencegahan dibandingkan dengan pos audit itu sendiri.

Mungkin yang bisa kami sampaikan dari Inspektorat Jenderal adalah demikian. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak sekalian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Mungkin bisa dilanjutkan Bapak Sekjen, tadi arahan Ketua mungkin ada beberapa Ditjen yang mungkin bisa memberikan gambaran secara ringkas saja Pak. Tadi Ibu Irjen mantap sekali penjelasannya, singkat dan padat.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Terima kasih Pimpinan.

Lanjut, Bapak Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Dan nanti ada tambahan dari BRG akan menyampaikan juga.

DIRJEN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN KLHK (Drs. M.R. KARLIANSYAH, M.Sc.):

Terima kasih Bapak Sekjen.

Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang terhormat.

Ijinkan kami dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyampaikan beberapa hal, sambil menunggu bahan tayangan mungkin. Kami laporkan realisasi anggaran kami tahun 2019 pada angka 97,81%. Ada 5 Direktorat lingkup kami, yang pertama pengendalian pencemaran udara, kedua pengendalian pencemaran air, yang ketiga pengendalian kerusakan gambut, yang keempat pemulihan kerusakan lahan akses terbuka dan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut.

Total anggaran kami 2020 adalah Rp357.472.233.000,- terbagi dalam belanja operasional sebesar 3,56% kemudian belanja pegawai 8,56% dan belanja modal 26,5% dan belanja non operasional sebesar 61,13%. Terkait dengan *output* 2020 tadi kami laporkan sebelumnya. Yang pertama, berkaitan

dengan upaya pengendalian pencemaran air itu ada kegiatan kami berupa pemasangan jaringan pemantauan poros air secara *real time* dan *continue* di 10 titik sehingga pada tahun 2020 ini sudah terpasang 36 stasiun pemantau. Di samping juga upaya kami untuk memantau secara manual di 530 titik di seluruh Indonesia dalam kaitan untuk menentukan indeks kualitas air.

Kemudian tadi dilaporkan oleh Bapak Sekjen, kami juga bertanggungjawab untuk membantu tata kelola air di DAS Citarum dalam bentuk pembangunan ekoriparian, kemudian instalasi pengolah air limbah, termasuk didalamnya usaha kecil dalam bentuk peternakan, dan penetapan beberapa baku mutu.

Kemudian juga dalam upaya untuk meningkatkan kualitas air di Indonesia khususnya di 15 DAS prioritas akan dibangun tahun ini di 49 unit instalasi pengolahan air limbah, tersebar di 15 DAS prioritas. Kemudian terkait dengan pengendalian pencemaran udara, juga tahun ini akan dipasang 10 alat pemantau polusi udara secara *real time* dan *continues* di Pangkal Pinang, Kendari, Palu, Samarinda, Gorontalo, Ternate, Ambon, Manokwari, Serang dan Mamuju untuk melengkapi 26 stasiun yang sudah terbangun. Diharapkan di akhir tahun 2024 itu akan terbangun atau terpenuhi di iu kota provinsi dan kita metropolitan terpasag system pemantauan polusi udara yang *continues*.

Kemudian upaya kita untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan di pesisir laut. Tahun 2020 ini akan dilakukan pemulihan di 4 ekosistem pesisir laut, yaitu di Lombok Utara, Brau, Selayar dan Ternate. Kemudian juga pemantauan kualitas air laut di 34 provinsi. Kemudian terkait dengan lahan terbuka di tahun 2020 ini akan dilakukan pemulihan pada areal seluas 77,5 hektar berupa lahan bekas pertambangan rakyat. Kemudian yang terakhir adalah upaya pemulihan lahan gambut yang terdegrasi. Dalam kaitan ini kami sudah berbagi tugas dengan badan restorasi gambut, mana wilayah BRG dan mana wilayah kami.

Next, inilah Bapak dan Ibu kira-kira gambarannya, misalnya yang sebelah kiri adalah areal-areal bekas tambang rakyat yang ditinggalkan, milik negara ditelantarkan itu yang kami pulihkan. Di sebelah kanan itu adalah areal yang kami pulihkan, ini di Kabupaten Malang. Dari 43 hektar yang rusak itu yang bisa kami pulihkan baru 21 hektar. Menjadi areal agro ecotourism.

Lanjut, ini di Buton juga sama bekas tambang rakyat sehingga terjadi abrasi luar biasa sampai mendekati kota, kemudian kita upayakan untuk dipulihkan. Hasilnya seperti yang sebelah bagian tengah areal seluas lebih kurang 8 hektar.

Lanjut, ini di Kabupaten Kuningan juga sama sudah menjadi lokasi pariwisata. Lanjut, ini pemancingan di Belitung Timur juga sama bekas lokasi tambang. Tetapi apa yang kami lakukan ini masih jauh dari arael yang rusak. Jadi tercatat 8.600 lebih titik yang rusak akibat pertambangan rakyat, yang baru bisa dipulihkan baru mungkin kurang dari 20 lokasi.

Next, ini juga di Paser Kalimantan Timur seluas 1,2 hektar sudah menjadi kebun bibit yang *insya allah* menjadi penyokong untuk penghijauan calon Ibu Kota Negara.

Lanjut, tadi juga kami sampaikan untuk mengurangi limbah domestik limbah rumah tangga kami juga membangun tiap tahunnya itu instalasi pengolahan air limbah. Ini contoh salah satu ekoriparian biocord yang kita bangun kita Kabupaten Karawang Teluk Jambe dan *Alhamdulillah* tadi saudara Bapak Sekjen di samping mengendalikan pencemaran juga membuka lapangan pekerjaan buat masyarakat meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi tercatat di Teluk Jambe misalnya dari kegiatan mereka mengembangkan komposting itu mereka dapatkan 60 juta per bulan. Di samping budi daya tanaman organik 20 juta, jadi 80 juta per bulan mereka hasilkan di samping tadi upaya kita untuk mengendalikan pencemaran lingkungan.

Lanjut, saya rasa Bapak dan Ibu, itu yang dapat kami laporkan. Sekali lagi mohon dukungan, mohon arahan untuk perbaikan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO) :

Ada tambahan, berikut Bapak Dirjen Penegakan Hukum.

DIRJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KLHK (Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com., MPM.):

Terima kasih Bapak Sekjen.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI, dan juga Anggota Komisi iV DPR RI.

Ijinkan kami menjelaskan beberapa hal yang kami lakukan pada tahun sebelumnya dan juga tahun-tahun yang akan datang. Mungkin kita langsung saja masuk ke slide yang. Berkaitan dengan penegakan hukum, ada beberapa instrument yang kami gunakan di dalam upaya penegakan hukum itu berkaitan dengan pengenaan sanksi administrative, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan juga penegakan hukum pidana. 3 instrumen besar ini yang kami lakukan di dalam rangka membangun budaya kepatuhan dan juga efek jera bagi para pelaku tindak pidana kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Dimana ada kerja-kerja lain yang dilakukan adalah kami juga menangani pengaduan, banyak sekali pengaduan-pengaduan yang masuk kepada kami yang harus kami selesaikan.

Kemudian juga kita melakukan pengamanan-pengamanan kawasan hutan dan juga pengawasan-pengawasan kegiatan-kegiatan industry,

maupun-maupun kegiatan perkebunan serta pertambangan. Adapun beberapa hal yang disampaikan kelembagaan juga sebenarnya banyak sekali lembaga-lembaga yang mendukung penegakkan hukum ini, mulai dari DPR RI yang kita ketahui bahwa Komisi IV DPR RI sangat aktif melakukan pengawasan. Dan juga berkaitan dengan legislasi dan juga bugeting mendukung penegakkan hukum. Kemudian Mahkamah Agung juga banyak inisiatif yang mereka lakukan, mereka membantu hakim sertifikasi, hakim lingkungan, kemudian juga membangun system penegakkan hukum registrasi kasus-kasus lingkungan. Kemudian juga Kejaksaan Agung mempunyai Satgas penegakkan hukum, sumber daya alam dan kita memahami bahwa Pemerintah Daerah maupun Kementerian Lingkungan Hidup serta juga Kepolisian juga mempunyai aparat-aparat penegak hukum berkaitan dengan penegakkan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Jadi dalam konteks regulasi dan juga konteks kelembagaan kita memiliki hal yang penting ini.

Dalam mendukung pelaksanaan penegakkan hukum, bahwa KLHK ini Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum ini kami mempunyai kantor di Jakarta kami punya 5 kantor wilayah, ada di Medan, kemudian juga ada di Surabaya, wilayah Sumatera ada di Medan kantor Balainya. Kemudian di wilayah Jawa ada di Surabaya, wilayah Kalimantan ada di Samarinda, wilayah Sulawesi ada di Maluku, kemudian wilayah Maluku dan Papua berada di Manokwari. Jadi ini lokasi-lokasi dimana kantor penegakkan hukum ada di samping juga kantor yang berada di Manggala. Di samping itu juga kami mempunyai seksi-seksi di beberapa provinsi lain untuk mendukung tugas-tugas yang harus dilakukan oleh Balai-balai penegakkan hukum di kelima wilayah tersebut.

Dan perlu kami sampaikan selama hampir 5 tahun penegakkan hukum ini, beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan. Kami juga menangani pengaduan, jadi pengaduan masyarakat ini masih sangat besar yang kami tangani, mereka mengadu kepada kita terkait dengan persoalan-soalan lingkungan hidup dan kehutanan. Kurang lebih ada sekitar 4000 lebih pengaduan, complain berkaitan persoalan-persoalan lingkungan hidup dan kehutanan ini kepada Pemerintah melalui kita.

Kemudian kami juga melakukan pengawasan-pengawasan, baik pengawasan ijin maupun juga memverifikasi laporan pengaduan-pengaduan tersebut. Kita juga melakukan upaya-upaya penegakkan hukum pemberian saksi administrative. Kemudian juga penegakkan hukum perdata penyelesaian kesepakatan luar pengadilan dan juga penegakkan hukum pidana. Dalam konteks pengawasan perijinan saat ini kita sudah melakukan memberikan sanksi administrative kepada kurang lebih sekitar 1.211 perusahaan kita berikan sanksi, agar mereka melakukan upaya-upaya perbaikan dalam pemenuhan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewajiban mereka. Kita juga menyelesaikan kesepakatan luar pengadilan penyelesaian konflik sengketa antara masyarakat maupun Pemerintah dengan pihak-pihak perusahaan. Dan juga melakukan gugatan perdata sebanyak 26 gugatan perdata yang saat ini sedang berproses. Kemudian penegakkan hukum pidana ada 757 kasus yang kita bawa ke pengadilan selama ekitar 2015-2019 ini dan di samping melakukan penegakkan hukum sendiri, kami memfasilitasi penyidik-penyidik dari Kepolisian dan Kejaksaan di mana ada 154 kasus yang

kita lakukan proses-proses fasilitasi dan juga ada proses operasi-operasi pengamanan kawasan hutan, kemudian juga operasi illegal logging dan juga operasi terhadap satwa-satwa yang dilindungi.

Jadi kerja kita yang kita lakukan selama 5 tahun hampir bisa dilihat hampir di seluruh Indonesia kita melakukan penegakkan hukum. Hal yang sangat disampaikan bahwa berkaitan gugatan perdata, memang kita ada 11 kasus yang sudah inkrah. Di mana kami mempunyai tantangan berkaitan dengan eksekusinya Pak. Kasus kita yang saat ini sudah inkrah itu sebesar 16,4 triliun, yang baru bisa kita eksekusi melalui gugatan perdata ini kurang lebih 100 miliar lebih. Jadi masih banyak PR yang harus kami lakukan. Memang tingkat eksekusi gugatan perdata ini di Indonesia memang masih rendah. Tidak hanya kasus lingkungan hidup dan kehutanan tetapi kasus-kasus perdata lain juga masih sulit untuk dieksekusi.

Namun, di samping itu juga kami sampaikan berkaitan dengan penyelesaian sengketa ini di luar pengadilan juga kami menyampaikan banyak juga ganti rugi yang sudah kita dapatkan total kurang lebih saat ini ganti rugi lingkungan hidup yang kita dapatkan melalui proses perdata di luar Pengadilan kurang lebih 800 miliar sudah disetorkan ke rekening negara.

Terus, lalu apa yang akan kami lakukan? Pada tahun 2012 di mana anggaran yang kami miliki adalah sekitar 468 miliar. Di mana anggaran tersebut untuk kegiatan belanja pegawainya kurang lebih 24% atau sebesar 113 miliar. Kemudian belanja operasionalnya adalah sekitar 7% atau sebesar 30 miliar. Dan belanja operasional untuk kegiatan-kegiatan itu 324 miliar. Anggaran-anggaran ini tersebar di beberapa kegiatan, berkaitan dengan upaya untuk penegakan hukum itu sendiri, pengawasan, kemudian pemberian sanksi, kemudian pengamanan, kemudian kawasan, kemudian operasi-operasi berkaitan hasil hutan dan juga penegakan hukum pidana, penyelesaian sengketa, dan juga peningkatan kapasitas PPNS serta Polhut. Dimana kami akan melakukan target pengawasan kami adalah sekitar 700 perusahaan pada tahun 2020. Kemudian kita juga akan melakukan peningkatan kapasitas PPLH kita, pengawas kita sekitar 200. Kemudian kita akan melakukan operasi pengamanan pemulihan kawasan hutan itu sekitar 100 operasi. Kemudian kita melakukan operasi peredaran hasil hutan itu 110 operasi. Dan juga kita akan melakukan peningkatan kapasitas Polhut sekitar 660, karena kami juga akan lakukan proses pembentukan Polhut bersama-sama dengan Badan SDM kita. Dan juga kami akan melakukan hukum pidana, kami perkirakan pada tahun ini kami menargetkan ada 173 kasus yang P21. Memang penegakan hukum ini tidak perlu kita targetkan tapi paling tidak kami akan menggunakan *resources* yang ada untuk mencapai P21 ini mencapai 173 kasus, karena kasus kan sangat sulit kita tentukan berapa kasus yang terjadi, tetapi kami sampaikan bahwa kami akan lakukan pada sampai P21 173 kasus. Kemudian untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup ada 46 perkara dan juga kami lakukan penegakan kapasitas PPNS.

Jadi Bapak Pimpinan, ini kami sampaikan langkah-langkah yang akan kita lakukan selama ini, baik yang kita lakukan pada tahun 2015 dan juga pada tahun 2020. Selama 2015-2019 ini, saya jelaskan tadi bahwa banyak

sekali kasus yang kita bawakan, total mungkin sudah kita bawakan di pengadilan itu hampir 800 kasus yang kita bawakan. Ini sangat signifikan dan putusan pengadilan berkaitan perdata juga besar 19,4 triliun mungkin sejarah terbesar kasus-kasus perdata yang berhasil dimenangkan oleh Pemerintah di dalam putusan. Namun, tantangan sekali lagi kami katakan adalah dieksekusi perdata. Eksekusi itu bukan kewenangan dari Pemerintah, tapi itu menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri. Kami terus bekerja sama dengan Pengadilan-Pengadilan Negeri, sering sekali Pengadilan Negeri ini memang kapasitasnya tidak cukup untuk mengeksekusi putusan-putusan tersebut. Kami terus bekerja sama dengan Pengadilan Negeri tentu juga melalui Mahkamah Agung.

Saya pikir demikian kami sampaikan.

Terima kasih Pak.

Kemudian mungkin tadi langsung menjawab Bapak Pimpinan tadi, Bapak Sudin tadi. Nanti saja ya? Oke.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO) :

Terima kasih Bapak Roy Dirjen Gakkum.

Lanjut Bapak Dirjen PPI kaitan dengan Karhutla dan perubahan iklim.

DIRJEN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM KLHK (Ir. RUANDHA AGUNG SUGARDIMAN, M.Sc.):

Terima kasih Bapak Sekjen.

Bapak Pimpinan dan Anggota Kom IV DPR RI terima kasih.

Anggaran di Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, total pagu sebesar 331 miliar. Dari anggaran yang tersedia ada prioritas nasional sebesar 182 miliar. Dari total anggaran kami 331 miliar yang kegiatan untuk prioritas nasional adalah sebesar 182 miliar untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Dari kegiatan tersebut ada 4 kegiatan utama, pencegahan kebakaran hutan dan lain. Ini kami targetkan untuk 1.200 desa dengan total anggaran 56 miliar.

Kemudian sarana dan prasarana penanganan kebakaran hutan dan lahan pada 24 provinsi rawan kebakaran sebesar 17 miliar. Kemudian penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, ini bulan operasi selama 1 tahun penuh karena di Provinsi Riau, Januari, Februari kemarin sudah ada kebakaran, alokasi yang kami anggarkan sebesar 33 miliar. Dan yang terakhir ini adalah peningkatan kapasitas tenaga pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Target kami untuk 1000 orang, untuk masyarakat peduli api dan Manggala Akni sebesar 75 miliar. Jadi ini kegiatan yang prioritas nasional.

Demikian yang kami sampaikan dari Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Bapak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bapak Dirjen sedikit saja Pak, inikan kami Pimpinan itu kemarin sempat ke COP 25 di Madrid. Kalau saya tidak salah 2020 ini saatnya Indonesia mengajukan *claimed action policy*-nya apa antara itu yang diupdate atau yang baru. Mungkin bisa dijelaskan sedikit program Bapak untuk menuju ke COP 26.

Terima kasih Pak.

DIRJEN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM KLHK (Ir. RUANDHA AGUNG SUGARDIMAN, M.Sc.):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Salah satu upaya Indonesia untuk menurunkan emisi adalah yang terbesar adalah bagaimana kita bisa mengendalikan atau menurunkan kebakaran hutan ini. Oleh karena itu, salah satu upaya yang terbesar di kami adalah pengendalian kebakaran hutan ini. Nah, untuk mendapai NDC ini kami dari 29% yang ditargetkan *National Determined Contribution*, dengan dana sendiri, dana APBN. Dan bisa mencapai 41% apabila ada dukungan internasional.

Nah, target kami di Glasgow nanti COP26 nanti kami akan menyampaikan update NDC kami. Jadi bagaimana Indonesia bisa mencapai komitmen-komitmen untuk bisa menurunkan emisi ini secara nyata dengan kegiatan-kegiatan di tingkat Tapak Langsung. Salah satunya yang terbesar adalah bagaimana bisa mewujudkan pencegahan pengendalian kebakaran hutan ini.

Demikian Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Interupsi dikit Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Pak Dirjen, saya tadi mendengarkan penjelasan Bapak inikan memprihatinkan ya, tugas yang begitu besar anggarannya cuma 300 miliar sekian. Itupun untuk pencegahan kebakaran lahan dan hutan hanya 180 miliar. Yang saya tanyakan terkait Bapak Ketua tadi menanyakan penurunan terhadap emisi karbon. Nasib Lol Norwegia yang menjanjikan 1 miliar itu bagaimana dulunya. Inikan harusnya Kehutanan yang harus bertanggungjawab itu, tapi sekarang kan dipakai pesta ria orang-orang yang diluar system. Apakah ini tidak bisa dikendalikan itu dikembalikan kepada Kehutanan supaya betul-betul dipertanggungjawabkan dan dimonitoring.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan dijawab.

DIRJEN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM KLHK (Ir. RUANDHA AGUNG SUGARDIMAN, M.Sc.):

Terima kasih Bapak Firman.

Indonesia mempunyai kesepakatan Norwegia 1 miliar US Dolar, ini sudah terpakai 200 yang untuk e-readiness itu sebesar 200 dan sudah terpakai sebesar 170. Jadi masih ada 30 miliar US Dolar untuk readiness untuk persiapan. Jadi yang untuk kita bisa klaim itu sebesar 800 ini. Jadi dari 800 ini kita sudah mengajukan klaim untuk penurunan emisi sebesar 4,8 juta ton, 1 tonnya dihargai 5 US Dolar Pak. Ini yang pertama dari RRP (Resource Risk Payment) langsung ke Norwegia. Kemudian kita ajukan juga melalui GCF Pak, sebesar 30 juta ton. Jadi kira-kira kita akan menerima 150 juta US Dolar plus 30 juta US Dolar dari Lol Norwegia ini.

Berikutnya tahun ini Pak, kita kesepakatan ini sudah berusia 10 tahun. Nah, Ibu Menteri melalui Bapak Sekjen sudah mengeluarkan SK untuk percepatan ini. Kami sedang melakukan penjajakan dan pendalaman kegiatan apa saja yang bisa kami dorong untuk bisa mempercepat dan memperbesar klaim yang kita bisa ajukan ke Norwegia.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Dikelola oleh KLHK atau masih kelompoknya Kuntoro CS itu?

DIRJEN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM KLHK (Ir. RUANDHA AGUNG SUGARDIMAN, M.Sc.):

Uangnya masih di Norwegia Pak.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Tapi nantinya di KLHK ya?

DIRJEN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM KLHK (Ir. RUANDHA AGUNG SUGARDIMAN, M.Sc.):

Di Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Pak.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Yang Kuntoro CS itu?

DIRJEN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM KLHK (Ir. RUANDHA AGUNG SUGARDIMAN, M.Sc.):

Bukan Pak, di Kementerian Keuangan Pak.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Itu setan semua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Dirjen.

Tadi Bapak Gakkum ada yang mau disampaikan mengenai pernyataan Bapak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Ya, termasuk wilayah tempat wisata Pulau Tegal Mas yang waktu disegel oleh KPK, Dirjen Gakkum serta dari Kementerian KKP. Saya ingin mendengar apa tindaklanjutnya.

Silakan.

DIRJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KLHK (Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com., MPM.):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Ada dua hal yang ingin saya sampaikan sebelum ke Tegal Mas, saya ingin menyampaikan bagaimana tindaklanjut dari kegiatan-kegiatan impor limbah ataupun sampah yang tanpa ijin. Perlu kami jelaskan, kami sudah menangani satu kasus, di mana kami sudah menetapkan dua warga negara Singapura berkaitan itu DPT ART, baik itu tersangka perorangan maupun tersangka koperasi atas impor sampah plastik yang tanpa ijin dan juga mengandung limbah B3 sebanyak 24 kontainer berada dikawasan berikat di Tangerang dan 64 kontainer berada di kawasan Tanjung Priok. Jadi kami

tindaklanjuti Bapak Sudin, itu sedang proses. Saat ini kemajuan proses penegakan hukumnya adalah kami mendapatkan P19, artinya petunjuk dari Jaksa untuk melanjutkan kasus ini. Itu yang berkaitan dengan kasus impor limbah.

Kemudian bagaimana kelanjutannya lagi, tadi Ibu Pipin sudah menjelaskan bahwa proses ini akan kita dahulukan dulu dengan re-ekspor, tapi kalau seandainya re-ekspor tidak berjalan dan tidak dilakukan oleh pihak perusahaan, kami akan segera melakukan penegakkan hukum terkait dengan impor sampah plastik maupun kertas untuk limbah B3 ini. Kami menunggu kordinasi untuk kerja bersama yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal PSLB3 dengan Bea Cukai.

Kemudian berkaitan dengan Tegas Mas, kami sampaikan. Kami sedang melakukan proses penyelidikan melanjutkan, di sana karena ada dua kasus berlokasi disana. Satu yang berada di pantainya dan satu lagi di pulauanya. Jadi proses ini sedang berjalan mohon dukungan dari Komisi IV DPR RI untuk menindaklanjuti kasus ini.

Terima kasih Pak Sudin.

KETUA RAPAT:

Terus nanti yang tadi yang warga negara Singapura itu kan ditahan?

**DIRJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KLHK (Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com., MPM.):**

Dicekal Pak.

KETUA RAPAT:

Dicekal, Kalau sudah pengadilan nanti sampahnya itu siapa yang akan bertanggungjawab?

**DIRJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KLHK (Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com., MPM.):**

Nanti kita lihat putusan pengadilannya Pak, apakah dia harus di-reekspor atau harus dimusnahkan.

KETUA RAPAT:

Ya, kalau dimusnahkan uang negara lagi yang keluar.

**DIRJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KLHK (Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com., MPM.):**

Biasanya berapa putusan kami dapatkan itu dibebankan biayanya kepada pelaku. Misalnya ada kasus Karhutla melalui proses pidana, itu ada

kewajiban ada putusan yang mengatakan bahwa pihak perusahaan wajib melakukan pemulihan lingkungan. Ini juga kami akan meminta di dalam proses penuntutan tadi memasukkan klausul itu, pidana tambahan namanya. Jadi tidak hanya penjara dan denda tapi juga pidana tambahan berkaitan dengan kasus ini.

KETUA RAPAT:

Saya tolong di-*update* Bapak Dirjen, karena ini untuk efek jera.

DIRJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KLHK (Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com., MPM.):

Siap Pak.

KETUA RAPAT:

Jangan sampai seenak-enaknya saja apalagi warga negara asing dianggap kita apa gitu loh. Saya di-*update* sampai keputusannya apa termasuk juga tadi Ibu Pipin yang 1.070. Kalau mereka tidak re-ekspor bawa pengadilan, didorong ke pengadilan saja kalau mereka tidak mampu reekspor. Karena inikan menyangkut pidana dan setelah itu pun saya di-*update*, karena saya tidak mau masalah ini tergantung-gantung dan mungkin nanti setelah rapat anggaran dengan eselon I beberapa kementerian selesai, kita akan adakan rapat gabungan. Seperti usulannya ada 5 Kementerian.

Begitu jelas Bapak Dirjen, Bapak Sekjen ada lagi yang mau menjelaskan?

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Kalau dari beberapa yang disampaikan sudah mencakup dari KLHK Pak, termasuk isu-isu lingkungan.

KETUA RAPAT:

Yang belum adalah Dirjen Planologi, karena tadi Bapak Firman ngomong sama saya, Bapak Firman tidak enak hati bertanya. Tolong tanyakan berapa luasan tanah hutan yang sudah dipinjam pakai kan, berapa yang masalah, berapa yang tidak salah, supaya jelas. Tadi waktu di ruang makan Bapak Firman nitip omongan.

Silakan dijelaskan.

DIRJEN PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN KLHK (Prof. Dr. Ir. SIGIT HARDWINARTO, M.M.):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak Pimpinan dan para Anggota Komisi IV DPR RI,
Juga para hadirin sekalian.

Terkait dengan apa yang disampaikan Bapak Pimpinan tadi, masalah berapa jumlah IPPKH dan lain-lainnya tadi Pak. Karena kebetulan hari ini yang disiapkan sesuai undangan anggaran, jadi kita belum bawa datanya itu. Nanti kami kirimkan langsung, ada sebenarnya berapa yang jalan, yang patuh, yang sekarang sampai IPPK itu sampai ada yang kita ancam.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Interupsi Ketua.

KETUA RAPAT:

Bapak Multazam juga mau tanya gitu dia.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Saya kira kaitannya dengan Dirjen Planologi, berapa ijin pinjam pakai perpanjangan yang sudah dikeluarkan, ijin pinjam pakai baru yang sudah dikeluarkan, ini kaitannya dengan anggaran juga, karena itukan dengan penyeteroran dengan bukan pajak itu, PNBP.

Terima kasih Ketua.

DIRJEN PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN KLHK (Prof. Dr. Ir. SIGIT HARDWINARTO, M.M.):

Ini ada datanya kebetulan dari Direktornya datang bawa, jadi rekapitulasi data ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk operasi produksi dan non tambang sampai akhir Desember 2019 itu totalnya ada 662 unit dengan luasan 441 ribuan hektar, itu yang termasuk katagori komoditas tambang. Untuk kegiatan yang non tambangnya itu ada 1.018 unit dengan luas 496 ribu hektar, yaitu sampai akhir tahun 2019.

Rinciannya yang komoditas tambang tadi yang pertama tadi, terdiri atas minyak dan gas, logal mulia, mineral logam lain, batubara, bahan galian C ada 5 komoditas Pak. Kalau yang non tambangnya ini ada 12 komoditas, mulai dari kepentingan untuk umum juga termasuk untuk pertahanan keamanan, panas bumi, pembangunan listrik dan seterusnya.

KETUA RAPAT:

Jadi gini saja Pak Dirjen, nanti waktu Rapat Kerja dengan Menteri LHK tolong dibawa secara detail. Termasuk jangan hanya tahun 2019 tapi minimal 5 tahun terakhir, begitu Bapak Multazam, cukup 5 tahun terakhir?

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Saya kira cukup, tapi itu harus dijelaskan ijin pinjam pakai yang ke BUMN berapa, yang ke swasta berapa yang perpanjangan itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Tolong nanti dicatat permintaan Bapak Multazam.

Jadi saya juga berharap Bapak Sekjen, 3 hari sebelum Rapat Kerja bahan sudah diterima oleh para Anggota. Kalau tidak jangan salahkan nanti kita tunda lagi Rapat Kerjanya.

Ada lagi Bapak Sekjen, Bapak Badan Restorasi Gambut, ada yang mau dijelaskan?

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Tadi sudah cukup jelas Pak Karliansyah, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Yang lain?

Oke, kalau gitu kita *break*, kita kembali jam 13.50 WIB karena saya tahu Bapak-bapak kepalanya sudah agak puyeng juga kalau jam 13,00 WIB belum makan siang. Sementara saya skor dulu kita kembali nanti jam 13.50 WIB.

(RAPAT DISKORS PUKUL 13.00 WIB)

(REKAMAN TERPUTUS)

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Sekjen, para Dirjen dan para pejabat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang saya hormati,
Teman-teman Komisi IV DPR RI.

Ada dua hal saja, karena nanti saya diingatkan sama Bapak Sudin, karena Cuma 3 menit. Pertama, terkait dengan rehabilitasi kawasan pasca bencana, tadi sudah disampaikan oleh beberapa Dirjen terutama di Kecamatan Sukajaya di Kabupaten Bogor, daerah pemilihan saya Pak. Saya

berharap ini ada rehabilitasi bukan hanya di Sukajaya tapi sampai ke Lebak. Saya juga senang kalau kemudian Pak Presiden sudah kesana dua kali bahkan. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah pertama terkait dengan proses rehabilitasinya. Sukajaya ini menjadi satu korban banjir terbesar di Jabotabek Pak, ada 25 orang yang meninggal. Nah, ini menurut saya pukulan berat karena hulunya di Lebak inikan menjadi persoalan.

Saya cuma minta tolong nanti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat satu desain Pak, bukan hanya sekedar *spot check* tapi membuat desain termasuk juga keinginan Kepala BNPB waktu itu untuk menanam pohon sereh kalau tidak salah ya. Saya coba mengingatkan apakah pohon sereh itu cukup kuat untuk menahan laju erosi itu. Kalau memang cukup kuat dimana dia posisinya, saya minta desainnya Pak, desain terkait dengan rehabilitasi lahan terutama daerah aliran sungai dan hutan lindung. Karena disitu memang problem besar Pak, dari dulu sebenarnya. Dan terutama Pak, tadi saya juga sudah diberitahu sama Bapak Pak Dirjen Gakkum terkait dengan penutupan Pongkor tentang tambang liar itu Pak. tambang liar itu Pak, saya setuju Pak, kalau kemudian itu ditutup. Tetapi yang ingin saya ingatkan saja mitigasi karena itu melibatkan ribuan orang yang bekerja untuk menggarap tambang liar itu.

Saya tidak ingin kalau kemudian dampak penutupan itu menimbulkan tingkat kriminalitas di daerah itu tinggi. Itu dampaknya bukan hanya di Sukajaya, bukan daerah Pongkor saja Pak, tapi dampaknya se-Bogor Barat itu. Nah, tolong dimitigasi mungkin ada program-program yang bisa didorong kesana untuk kemudian pemberdayaan masyarakat terkait dengan bagaimana pasca penutupan Pongkor itu. Saya mengingatkan itu, saya minta tolong Bapak Roy dan Ibu Vivin, walaupun itu setuju saya kemudian itu ditutup, tetapi kemudian harus ada mitigasi dan proses bagaimana pemberdayaan masyarakat pasca penutupan itu.

Yang kedua, terkait dengan pengembangan desa wisata Pak. Di Kabupaten Bogor ini cukup tinggi, menurut saya bukan hanya Kabupaten Bogor akan tetapi di Indonesia. Tapi saya hanya ingin bertanya terkait dengan penggunaan dana reboisasi untuk pengembangan desa wisata itu. Saya tahu disitu ada BLU, tetapi BLU itu konon kabarnya kemudian mau diambil alih oleh Kementerian Keuangan.

Nah, saya berharap pengelolaan Badan Layanan Umum itu tetap dikelola oleh Kementerian Kehutanan karena yang tahu lokasi, tahu bagaimana mengembangkan itu Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup. Nah, saya minta ada bagaimana mekanism dan berapa, yang pegang BLU siapa ini Pak, Bapak Sekjen ya Pak? bagaimana mekanisme dan kemudian berapa yang sudah dikelola, desa wisata mana saja yang sudah dikelola untuk itu. Sehingga kemudian kami tahu dan lalu ada program-program pengembangan desa wisata di Indonesia terutama di daerah saya di daerah Bogor, sehingga masyarakat punya akses untuk mendapatkan BLU itu.

Itu saja Bapak Ketua, karena saya sudah dilirik sama Bapak Ketua 3 menit cukup.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Jadi mungkin kurang lebih nanti waktu Rapat Kerja saya minta Eselon I menyerahkan wilayah-wilayah taman nasional mana saja. Di samping teman-teman juga bisa meninjau, sekaligus sebagai pengawasan. Selanjutnya Bapak Made Urip dulu, karena dia tadi sudah duluan tapi datangnya belakangan.

Silakan Bapak Made Urip.

F-PDIP (Drs. I MADE URIP, M.Si.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Teman-temang Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,
Dan seluruh Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang saya banggakan.

Agenda kita adalah berkaitan dengan masalah anggaran APBN 2020 di semua eselon I. Jadi kalau melihat tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Sekjen tentang alokasi anggaran berdasarkan yang terbesar, yaitu dari Bappenas pertama. Ini adalah sangat rasional karena selama saya di Komisi IV DPR RI, Dirjen ini paling mudah diakses dan kerja kerakyatannya cukup bagus. Dan hampir kalau kita, saya kebetulan Dapil Bali Pak, jadi Bappenas Bali itu cukup bagus sekali pelayanan terutama dari sisi bagaimana dia menyiapkan tanaman itu. Jadi baik diakses oleh kelompok, oleh perorangan, masyarakat adat betul-betul dilayani. Nah, ini program yang cukup konkrit dan bagus itu. Saya berharap bila perlu anggaran untuk Bappenas ini ditambah lagi. Ini yang akan membuktikan bahwa kehutanan ini bekerja dengan baik dilapangan.

Yang kedua, Ibu tadi dari Ditjen Sampah dan Limbah B3. Saya berharap kalau melihat anggaran Ibu ini relative kecil dibandingkan dengan program yang memang harus dikerjakan itu cukup luas sekali. Saya berharap ini perlu ditambah ini anggaran dari Dirlin PSLB ini. Nah, program yang bagus itu adalah mengenai bagaimana kita mengendalikan sampah itu, terutama di desa-desa. Dengan kebijakan salah satu program itu kan sampah-sampah yang ada di desa-desa dengan mobil Tiar itu.

Jadi saya rasa barangkali ini perlu ditambah beberapa desa yang ada. Dan saya berharap Bali itu belum termasuk disana di program Ibu, tolong karena Bali itu kan sebagai destinasi wisata dunia itu yang perlu lingkungan ekosistemnya yang betul-betul diperhatikan, terutama desa-desa wisata. Jadi saya berharap desa wisata di Bali itu diperhatikan.

Nah, selanjutnya ada beberapa isu-isu strategis yang memang mencuat kepermukaan, yaitu tentang bagaimana pemutusan hubungan kemitraan kerja sama dengan WWF itu. barangkali ini perlu dijelaskan kepada kita semuanya karena itu akan menyangkut tentang konservasi, kemudian juga taman nasional itu kelanjutan dari ini. Saya rasa ini sebuah kejutan bagi kita semua tentang hubungan yang begitu putus di tengah jalan. Jadi nanti program-program yang sudah berjalan ini bagaimana penanganannya. Nah, barangkali ini perlu dijelaskan oleh Bapak Sekjen lebih utuh lagi kepada kita di Komisi IV DPR RI ini.

Selanjutnya yang kedua, berkaitan dengan masalah tambang. Tadi sudah disampaikan oleh Dirjen yang berkaitan dengan ini ya. Jadi masalah tambang ini betul-betul harus digarap dengan baik terutama melakukan restorasi, pemulihan reklamasinya karena ini menjadi kekhawtiran kita bersama masalah tambang ini yang tidak ditangani lebih massif dan terstruktur dan lebih rapi ini. Jadi contoh-contoh tadi itu apa yang disampaikan oleh Bapak Dirjen betul itu, bagus itu sudah. Tetapi supaya lebih melebar lagi untuk melakukan pemulihan ini. Nah, yang saya harapkan itu juga.

Yang ketiga adalah program kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat ini yang perlu diperbanyak. Apa akses Komisi IV DPR RI yang bisa didapatkan selain KBR ditambah dengan tanaman pohon itu sendiri. Nah, barangkali harus dicarikan, yaitu program-program konkrit yang bisa diakses yang bisa dibawa ke daerahnya untuk pemberdayaan ini. Nah, barangkali itu penekanan pada saat yang ingin saya sampaikan.

Nah, yang terakhir saya juga berharap penanganan limbah pestisida ini Pak, karena kalau kita lihat pembukaan lahan-lahan baru untuk hortikultura di sana banyak sekali, yaitu penggunaan pestisida itu kemudian kalau hujan-hujan dia masuk, baik ke sungai kemudian juga ke danau-danau yang perlu mendapatkan perhatian dari kita semua terutama teman-teman di KLA ini. Nah, jadi barangkali itu Bapak Sekjen dan Bapak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Made Urip.

Saya sangat setuju sekali kalau bicara angka tadi, jadi untuk Dirjen Pengolahan Sampah ini dananya sangat minim sekali. Kemudian tadi kalau masalah yang untuk kerakyatan mungkin nanti yang dulu dikasih kesana sekarang mudah-mudahan dikasih kesini untuk angkut sampahnya. Pahami kan Bu, jadi nanti masyarakat dikasih edukasi ini loh alat untuk angkut sampahnya.

Mengenai WWF Pak Made, mohon maaf Bapak Sekjen mungkin menjelaskan secara singkat nanti untuk penjelasan detailnya, karena yang memutuskan kerja sama itu Ibu Menteri. Jadi waktu Rapat Kerja Ibu Menteri

harus menyiapkan jawaban yang komplit. Selanjutnya Bapak Ibnu Multazam masalah tadi ya Pak.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Terima kasih.

Pimpinan yang saya hormati.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Sekjen beserta segenap jajarannya yang saya hormati,
Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Yang pertama, data yang sudah dikeluarkan untuk perhutanan sosial. Bapak Sekjen, saya ulangi kami minta secara resmi data yang sudah dikeluarkan untuk perhutanan sosial. Karena ini penting, sebab berapa luasan yang sudah diberi ijin untuk perhutanan sosial kaitannya dengan pupuk. Dan juga di Dapil saya khususnya Kabupaten Magetan dan Kabupaten Trenggalek, untuk perhutanan sosial walaupun prosesnya sudah dilakukan tapi sampai sekarang, sampai hari ini, itu belum ada ijin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan kaitannya dengan perhutanan sosial.

Yang kedua, anggaran berbasis kemasyarakatan itu hanya sekitar 9% dari pagu Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Menyambung apa yang disampaikan Bapak Made, harapan kita anggaran untuk kemasyarakatan itu ditambah dari pagu anggaran yang 9 koma sekian triliun itu. Minimal 15% lah kalau bisa, itu diambilkan dari mana? Ya diambilkan dari operasional, diambilkan dari anggaran-anggaran bisa lintas kementerian dengan pagu anggaran yang 9,2 sekian triliun itu.

Selanjutnya, CPCL tujuan bantuan kemasyarakatan, kan ini kalau melihat materi seolah-olah kan sudah ditetapkan. Nah, untuk itu kepada Anggota Komisi IV DPR RI itu jangan sampai nanti ada berita ini bukan daerah sasaran karena ini aspirasi masyarakat, ini bukan daerah sasaran karena daerah sasarnya sudah dikavling, sudah ditentukan oleh Kementerian. Untuk itu, sepanjang itu sesuai dengan pedoman itu mohon bantuan kemasyarakatan yang diajukan oleh aspirasi Komisi IV DPR RI itu untuk bisa direalisasikan.

Ketiga, kaitan perpanjangan ijin yang tadi disinggung Bapak Ketua untuk pinjam pakai yang perpanjangan ijin pinjam pakai, perpanjangan ijin pinjam pakai baru yang kaitannya untuk tambang, yang kaitannya untuk hutan produksi, yang dipinjamkan kepada BUMN atau dipinjam kepada swasta ini datanya betul-betul secara rinci mohon disampaikan kepada Pimpinan pada saat Rapat Kerja dengan Ibu Menteri yang akan datang.

Yang keempat, kepada Dirjen Pengolahan Sampah Limbah dan B3. Ini tadi disampaikan dalam pemaparan kita diminta bantuan untuk mengawasi. Nah, itu sifatnya mengawasi kalau mengawasi pastilah, inikan tugas dari

Anggota DPR RI. Tapi yang saya tidak tahu itu merupakan UPT dari Departemen Kehutanan dan Lingkungan Hidup atau itu bantuan sosial atau hibah yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah tingkat I atau tingkat II.

Nah, kadang-kadang kalau itu hibah yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kota atau Pemerintah Provinsi, itu kan agak susah kita mengawasi. Kita sih bisa mengawasi secara agak tapi kalau itu diserahkan kepada UPT itu agak gampang. Kalau diserahkan hibah kepada Pemerintah Kabupaten itu seolah-olah itu mereka hak-hak mereka itu. Kalau kita masuk agak kesulitan. Untuk itu, mohon dijelaskan kaitannya dengan itu UPT atau hibah atau Bansos.

Tentang sampah yang beberapa saat yang lalu kunjungan Komisi IV DPR RI spesifik itu menemukan ada sampah yang bukan scrap plastik maupun bukan scrap kertas yang itu logikanya harus ditolak, itu kami mohon kalau yang betul-betul memang itu campuran sampah, sampah rumah tangga, sampah medis dan lain sebagainya itu jangan sampai masuk. Karena akibatnya akan sangat besar kepada lingkungan hidup itu sendiri.

Terakhir, daftar yang disampaikan Dirjen apa ya tentang Anggota DPR RI tadi. Itu saya kira daftar nama-nama lama Pak, Bapak Bambang itu nama-nama lama cuma dicopy paste, karena Bapak Fadholi itu masih Anggota Komisi IV DPR RI dan saya itu tidak ada dalam daftar itu. Cuman semoga itu hanya satu lembar itu saja yang data yang tidak valid, jangan-jangan keseluruhan materi yang diberikan ini hanya copy paste data lama. Kalau begitu caranya Kementerian itu mengambil data kan sangat bahaya.

KETUA RAPAT:

Cukup Pak?

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Cukup, terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Jadi saya berharap nanti waktu Rapat Kerja sudah ada nama-nama yang jelas yang sudah sah menjadi Anggota Komisi IV DPR RI. Nanti waktu Rapat Kerja tetap bawa bahan yang baru serahkan lagi kepada kami. Tenanglah kalau LHK kan agak konsekuen.

Selanjutnya Bapak Sutrisno, silakan Pak.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Pimpinan, Bapak Sekjen, para Dirjen, para Kepala Badan dan jajaran.

Langsung saja bahannya tebal tidak terbaca semuanya, baru diterima juga tadi. Mencoba dari struktur anggaran saya menangkap bahwa anggaran yang memang bisa disajikan itu memang diakui hasil yang kemarin belum mengakses kejadian sangat luar biasa, banjir bandang, banjir, termasuk janji Presiden pada Konferensi G20 tahun 2020 itu untuk mengurangi rumah kaca 26% atas beban sendiri, kalau dalam bantuan internasional 41%. Termasuk tadi teman-teman namanya tidak ada, kalau sampai itu terjadi bagaimana pertanggungjawaban kepada rakyat. Artinya apa? saran saya mohon dikaji kembali, supaya kita pun berjuang, bekerjanya juga maksimal mempertanggungjawabkannya kepada rakyat.

Kemudian yang kedua, dari struktur belanja yang saya pahami ternyata hampir 5% dari belanja non operasional itu belanja pegawai. Karena belanja pegawai tempatnya di program itu bukan semata-mata hanya gaji sama tunjangan, termasuk belanja pegawai pendukung program kegiatan. Itu ditengarai kegiatannya lebih pada bimbingan fasilitasi pembinaan. Saya waktu di daerah itu arahan Presiden suruh menghindari kegiatan fasilitasi itu. Nah, saya sangat mendukung anggaran ditambahkan tapi tidak berarti kedepan anggarannya itu, harus lebih kepada bagaimana untuk belanja publik, belanja modalnya sangat sedikit.

Nah, pertanyaan saya Bapak Sekjen dan para Dirjen. Struktur yang membidangi kehutanan dan lingkungan hidup di daerah itu kan dalam kendali Kepala Daerah. Bapak itu malah mengaplikasikan kegiatan, bimbingan, fasilitasi, kemudian pembinaan seperti apa teman-teman dewan sudah siap terjun kelapangan bekerja sama, kalau sampai strukturnya tidak ada. jangan sampai kemudian banyak aktifitas tetapi tidak dijalankan dengan baik, bisa dikerjasamakan tentunya.

Kemudian yang ketiga, saya dari Dapil SMS tahun kemarin kebakaran hutan Gunung Cerman. Saya belum membaca disini ada bagaimana, peremajaan kembali, bagaimana pelestarian kembali padahal itu andalan Kabupaten Indramayu, Cirebon, Majalengka, airnya itu dari situ. Jadi mohon secara spesialis ini juga dianggarkan di tahun 2020 ini. Termasuk di Kabupaten Sumedang gunungnya mau roboh, lingkungannya rusak. Disini ada kegiatan pencegahan, pencemaran sama perusakan lingkungan. Inikan salah satu sebab terjadinya banjir itu ada dari situ. Jadi mohon jadi konsentrasikan untuk reklamasi daerah-daerah yang rusak akibat pertambangan.

Kemudian yang keempat Bapak Sekjen dan Ibu Dirjen, kalau di Kementerian Pertanian sudah jelas programnya komprehensif tiap tahun rakyat dibagi traktor, dibagi pompa dan sebagainya. Saya kira sudah waktunya Kementerian Lingkungan Hidup juga secara komprehensif memberikan bantuan kepada rakyat untuk narik sampah. Bagaimana mungkin ada bank sampah siapa yang nariknya, tidak perlu kita juga kerja keras mengambil dari luar negeri. Jadi tiap-tiap tahun ada program, kami sangat setuju ditambahkan tapi programnya jelas ada yang di bawah buat rakyat. Kenapa? Banjir itu kan akibat sumbatan di muara, sumbatan di muara itu akibat apa? sembarangan membuang sampah. Sudah hutannya gundul di

hulu, di tengah juga penyempitan karena memang tidak teratur bangunan di tengah-tengah sungai itu, di muaranya juga tersumbat akibat rakyat juga sembarangan membuang sampah.

Ini usul konkrit saya komprehensif terprogram tiap-tiap tahun ada yang bisa dibawa buat rakyat. Nah, kalau itu terjadi *insya allah* kita lingkungan hidup itu juga akan asri.

Saya kira itu saja dulu, karena 3 menit nanti biar dalam pendalaman.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Sutrisno.

Teman-teman Anggota Komisi IV DPR RI, kalau masalah Bansos saya minta segera dirubah yang untuk rakyat tadi. Jadi masalah Bansos saya pikir teman-teman tidak perlu mengusulkan lagi biar nanti dirubah segera diberikan kepada kita, kita pelajari. Apabila tidak tepat sasaran sebelum rapat kerja kita usulkan, supaya waktu Rapat Kerja sudah jelas semua alokasi untuk kepentingan rakyat.

Selanjutnya Bapak Suhardi Duka, tenang Pak, masalah Bapak sudah teratasi Pak.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita.

Yang saya hormati Pimpinan,
Anggota Dewan yang terhormat,
Bapak Sekjen dan seluruh pejabat Eselon I KLHK yang saya hormati.

Terus terang kalau kita membangun kerja sama dengan Kementerian Mitra Komisi IV DPR RI, saya merasakan bahwa nyaman kita di KLHK dibandingkan dengan Kementerian yang lainnya. Kenapa? Karena banyak hal yang memungkinkan untuk bisa kita kerja samakan dengan KLHK. Kita kunjungan spesifik pasti ada Dirjen, kunjungan apa saja pasti ada Dirjen yang mendampingi. Hanya saja sedikit tadi agak cedera, karena ada daftar nama itu yang disitu ada angka-angka itu tidak bagus bagi citra mitra dewan, apalagi ini adalah rapat yang terbuka untuk umum. Untung saja namaku tidak di dalam, ini tidak bagus bagi kita citra kita. Oleh karena itu, kita harus saling bisa menjaga antara Komisi IV DPR RI dengan teman-teman yang ada di Kementerian.

Yang selanjutnya adalah mengenai di Sulawesi Barat itu ada hutan koservasi Ganda Dewata namanya, sudah disetujui. Hanya tinggal Satkernya yang belum ada. Oleh karena itu, teman minta supaya ada tindaklanjut

terhadap penetapan Ganda Dewata sebagai hutan konservasi ada Satker yang menangani.

Yang selanjutnya ingin juga saya sampaikan, yaitu kalau anggaran yang disampaikan tadi saya support karena lebih mengacu kepada PN1, yaitu pengentasan kemiskinan. Walaupun kita bukan di sektor yang lain tapi dengan kemampuan KLHK bisa menyusun program yang bisa ikut mengentaskan kemiskinan utamanya petani dan kawasan-kawasan yang ada di kawasan hutan. Saya kira ini adalah program yang perlu kita support dengan baik.

Hanya saja di antara 33 Provinsi semua mendapatkan program dengan cukup bagus, hanya satu provinsi yang dilupakan, yaitu Sulawesi Barat. Saya tidak melihat ada program dari PDAS untuk program Sulawesi Barat. Program yang cukup bagus juga adalah Bank Pesona, itu juga dalam rangka peningkatan upaya pengentasan kemiskinan. Hanya saja saya melihat anggarannya cukup sedikit. Barangkali Bapak Ketua, ini bisa digeser sedikit anggaran di PDASHL untuk bisa mencukupi anggaran yang ada di Bank Pesona ini, karena ini dalam rangka upaya kita untuk memberdayakan masyarakat di sekitar hutan agar bisa meningkatkan produktifitasnya.

Yang lainnya, ini yang saya sampaikan kepada Ibu. Satu minggu ini sudah berkali-kali unjuk rasa di Sulawesi Barat tentang pengolahan sampah. Sampahnya besar tapi tidak dikelola, dengan demikian kemana-mana dia punya persoalan. Kalau tidak bisa tahun ini karena saya tidak bisa memaksa Ibu untuk menggeser anggarannya, saya minta menjadi prioritas tahun depan atau bisa ditinjau dulu baru kita bisa berpikir sama-sama.

Saya juga ingin sampaikan kepada Dirjen Penegakkan Hukum agar ada dua pelanggar, yaitu PKS yang membuang limbahnya ke masyarakat. Saya ingin mengajak untuk di awal Maret kita tinjau sama-sama, kalau memang bisa ditegakkan hukunya kita tegakkan sama-sama.

Yang terakhir adalah harga diri bangsa. Janganlah dengan alasan apapun kalau kita mengimpor sampah saya kira ini mengancam harga diri bangsa. Yang namanya sampah jangan kita terima, justru ini juga membunuh pengumpul-pengumpul sampah, pemulung yang ada di daerah yang akibatnya menjadi murah dia punya, dan akibatnya juga menjadi miskin dan tambah miskin lagi akibat impor sampah yang sangat murah itu. Dan terus terang saya tidak setuju dengan apapun namanya yang namanya impor sampah itu.

Demikian, terima kasih.

*Wallahu Muwafiq Ila Aqwamithariq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Selanjutnya PKS yang sebelah Bapak tadi, yang tadi Bapak sebut PKS Bapak Slamet.

F-PKS (drh. SLAMET):

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Para Pimpinan yang saya hormati,
Rekan-rekan Anggota Dewan yang saya hormati,
Beserta mitra kerja dari KLH.

Ada beberapa yang ingin juga saya sampaikan, kalau program sosial tadi sama. Jadi nanti mudah-mudahan ada pembahasan lanjutan. Yang pertama, terkait dengan Makademia tadi Pak, jadi itu mungkin saran saya mungkin sosialisasinya mungkin yang perlu kita perbanyak sehingga memang produk ini bisa ditanam oleh masyarakat kita.

Yang kedua, terkait dengan di Dapil saya beririsan dengan Dapil Bapak Ichsan di Taman Nasional Halimun. Itu kan ada Gunung Peti, itu kan potensi konflik dengan warga itu sangat tinggi. Kira-kira langkah-langkah yang akan dilakukan ini sudah sejauhmana, karena memang saya melihat ini potensi konfliknya antara taman nasional dan juga warga ini cukup tinggi, itu di Blok Peti. Serta kawasan Geopark, ini saya ingin mendapatkan kejelasan Geopark yang ada di Sukabumi ini kewenangannya ada di siapa, apakah ada di Kementerian Lingkungan Hidup juga membawahi itu. Dan kalau memang disitu langkah-langkahnya sudah sejauhmana karena ini memang cukup untuk kawasan geopark ini.

Satu hal lagi terkait dengan saya ingin mendapatkan gambaran untuk 2020 dari Dirjen Karhutla. Program kerjanya apakah memprediksi, diprediksikan katanya kebaran hutan ini akan lebih hebat dibandingkan tahun kemarin sehingga antisipasinya dengan anggaran yang ada antisipasinya supaya kejadian itu bisa diminimalisir ingin mendapatkan gambaran itu. Serta ingin mendapatkan, tadi juga agak tergelitik juga bagaimana peran pengusaha kalau disampaikan Pemerintah hari ini melakukan bekas dari tambang itu yang melakukan recovery kan tadi digambarkan itu Pemerintah artinya pakai anggaran negara. Pertanyaan saya pengusahanya pada kemana. Ini juga kaitannya dengan Gakkumnya, jadi ketika kemudian dia tidak melakukan itu apa yang dilakukan.

Saya mendapatkan informasi bahwa periode kemarin itu ada beberapa perusahaan-perusahaan yang menggunakan kawasan hutan yang melakukan atau melanggar procedural. Sejauhmana tindaklanjut atau follow up yang sudah dilakukan oleh KLH.

Itu saja Pimpinan, beberapa pertanyaan dari saya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Slamet.

Selanjutnya Bapak Johan, silakan.

Bapak sudah sehat Pak?

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Alhamdulillah.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati,
Bapak Dirjen dan seluruh jajaran.

Yang pertama, di NTB itu ada dua taman nasional, ada Taman Nasional Gunung Rinjani dan Gunung Tambora. Nah, kedua taman nasional disini, disitu juga ada statusnya geopark, dua-duanya sudah geopark, baik Rinjani maupun Tambora. Saat ini begitu banyak event-event nasional yang *spot tourism*, sepeda dan segala macam itu di kawasan Rinjani. Nah, apa dukungan Pemerintah Pusat terhadap aktifitas-aktifitas yang bisa menyemarakkan kegiatan-kegiatan di Rinjani dan Tambora. Apalagi Rinjani ini pasca gempa itu kan ditutup pendakian. Nah, kalau sekarang memang reguler ditutup, karena Desember sampai April dia ditutup, setelah April baru naik. Nah, tapi pasca gempa itu belum ada *recovery* atau perbaikan jalur pendakian di Rinjani. Dan itu akan mengurangi minat wisatawan terutama luar negeri untuk mendaki Rinjani. Jadi itu yang pertama.

Yang kedua, soal sampah. Kita sama-sama Ibu Dirjen kemarin ke Mojokerto ke Desa Bangun itu, disitu juga sudah saya sampaikan bahwa ya sudah kita tidak usah lagi berpikir untuk impor ini. Tutup semua kebijakan-kebijakan itu yang memungkinkan untuk kita impor. apakah kita tidak takut dengan pertanyaan publik emang kurang sampah di Indonesia ini. Nah, yang perlu kita pikirkan menurut saya adalah bagaimana kita melakukan pengolahan sampah dalam negeri. Saya tadi direhat Bapak Ketua, sudah bincang-bincang sama Ibu Dirjen, contoh di program Gubernur NTB, itu sudah berhasil membuat pellet sampah plastik itu kemudian dikerjasamakan dengan PLN dan itu bisa menjadi pengganti batubara. Demikian juga untuk fungsi-fungsi yang lain. Nah, kalau misalnya itu kita perbaiki manajemen pengolahan sampah dalam negeri ya tidak usah impor, malu kita. Masa sampah kita impor.

Nah, kejadian-kejadian seperti di Desa Bangun kemarin itu saya coba hitung-hitung dengan data yang Ibu berikan itu karena memang masih ada kebijakan imporitas 5% itu. Nah, itu kan harus kita hapus itu minimal hanya

bisa untuk mengikat, untuk pembungkus dan segala macam itu. Tapi kalau misalnya tidak usah impor, malu kita impor sampah.

Nah, saya mengusulkan untuk manajemen penanganan sampah dalam negeri ini supaya kita juga memberdayakan masyarakat desa. Ada Bumdes, kita kasih Bumdes-bumdes itu mesin pengolah sampah plastik. Ya, kalau kita tidak punya truk sampah, tidak punya roda tiga untuk mengangkut sampah kalau ada di pusat desa itu mesin mengolah sampah *insya allah* sampah itu akan datang sendiri. Jadi masyarakat itu ngelihat sampah sama dengan melihat uang. Jadi ketika lihat plastik, wah ini Rp200 ini, wah ini Rp1000 ini. Jadi mereka bisa timbang sendiri. Jadi bagaimana kita sosialisasikan di masyarakat itu melihat sampah sama dengan melihat uang, dipungut itu kalau lihat uang, dibawa ke mesin penggilingan sampah di Bumdes misalnya seperti itu.

Nah, berikutnya tadi ada kita juga ada satu kawasan disitu yang tadi tidak disebut, ada juga kita Pak, Hiu Paus itu. Hiu Paus itu ada di Teluk Sare Pak, ada sekitar 50-an sekarang sisanya dan ini masuk di kawasan. Nah, jangan hanya dititik yang Bapak sebut tadi saja, di perhatikan Hiu Paus, kami punya Hiu Paus sisanya sekitar 50-an, 54. Bahkan sudah dipasang chip oleh pengelola pariwisata desa disitu. Nah, sekarang bagaimana kita coba diperhatikan juga Hiu Paus yang ada di Teluk Sare karena Teluk Sare ini juga ada di kawasan biosfer, mungkin juga dilingkungan hidup ini punya kerjaan.

Berikutnya, KEK Mandalika tadi mendapat perhatian....

KETUA RAPAT:

Terakhir ya Pak.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Iya, yang kedua terakhir Pak.

KEK Mandalika tadi disebut 5 yang diprioritaskan. KEK Mandalika kan dikelola oleh BUMN, sementara anggaran kita disini sampai Rp46 miliar. Bagaimana keterkaitan ini antara wilayah pengelaan BUMN itu dengan program yang dimasukkan oleh lingkungan hidup, irisannya.

Yang berikut terakhir Pak, di Sumbawa itu marak orang tanam jagung. Dan ini selalu menjadi perhatian dari pemerhati lingkungan. Nah, saya berpikir diskusi kemarin waktu kunjungan Dapil itu dengan teman-teman yang ada di DAS, yang ada disana. Kita berpikir bagaimana Pak Dirjen DAS minta satu lokasi saja kita Pak, untuk penyemaian bibit kayu putih. Tentu ditambah dengan mesinnya karena dua tahun sudah memproduksi kayu putih itu Pak Ketua. Jadi nanti di KPH Ampang Pelampang, itu bisa kita membuat satu unit penyemaian kayu putih dan pengolahannya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Itu masalah kecil Pak, kalau yang terakhir itu masalah kecil. Bapak Sekjen, tolong diperhatikan. Dan tadi di wilayah KEK tadi itu digelontorkan sebesar Rp46 miliar sedangkan itukan BUMN. Jadi jangan BUMN-nya enak sementara di luar kawasan itu rakyat lebih butuh. Bukan gitu Bapak Johan.

Selanjutnya Ibu Riezky silakan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kalau saya lebih ingin bertanya terkait mungkin kaitannya sampah dengan Gakkum Pak. Saya kalau boleh meminta data berapa kasus yang seperti kemarin di Priok itu yang sudah pernah ditindaklanjuti. Iya, berapa yang sudah masuk, karena saya dari tadi bolak-balik cari, saya minta tolong datanya, supaya juga kita berbicara juga enak, punya barometer. Nah, terus saya butuh itu data tersebut dan juga nanti kita baru bisa membahas tindaklanjutnya. Karena ini juga dibidang hal kecil kita lihat beberapa tempat sudah banyak permasalahan yang sama.

Kemudian tadi beberapa senior sudah mempertanyakan juga karena saya kemarin juga diminta konfirmasi terkait WWF. Jadi saya minta penjelasan, gambaran dan kira-kira solusinya seperti apa. Jadi supaya kami pun di Komisi IV DPR RI ini dapat memahami situasi yang sebenarnya seperti apa. Jadi apabila ada yang bertanya dan mengkonfirmasi kamipun tahu bagaimana cara menjawabnya.

Dan tadi juga disini ada data tadi Dirjen Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Ini Cuma masukan sana, Rejang Lebong itu bukan Sumatera Selatan Pak, tapi Bengkulu. Jadi tolong Bapak juga harus memahami wilayah-wilayah tersebut jangan sampai salah Pak. Nanti saya juga bingung dimana Rejang Lebong di Sumatera Selatan.

Kemudian masukan juga untuk Ibu Dirjen, terkait tadi masalah tambang, efek tambang itu terjadi di Kabupaten Lahat Empat Lawang sampai longsor yang parah, tolong menjadi atensi bagi LHK juga. Jadi Lahat dan Empat Lawang kemarin banjir bandang besar dan menelan korban juga banyak itu akibat efek dari lingkungan hidup yang sudah mulai tergerus. Itu tolong diatensi karena memang bukan Dapil saya tetapi saya putera Sumatera Selatan, jadi harus saya suarakan juga seperti itu.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Mbak Riezky, masalah WWF tidak perlu ditanyakan lagi. Tadi Bapak Made Urip sudah menanyakan nanti dijawab secara singkat, secara detailnya nanti minta pertanggungjawaban Ibu Menteri. Anda bukan putera anda puteri Sumatera Selatan.

Selanjutnya Bapak Yadi, silakan.

F-PDIP (H. YADI SRIMULYADI):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Bapak Ketua.

Bapak Sekjen, Bapak Dirjen beserta jajarannya.

Pertama, masalah sampah, masalah TPA Sari Mukti yang ada di Bandung Raya. Sekarang se-Bandung Raya itu buangnya itu ke Sari Mukti. Dan dari Kabupaten Bandung, Kota Bandung cukup keberatan karena jauhnya seperti itu. Kemarin Bapak Gubernur pernah ngobrol-ngobrol nanti bisa Bandung Raya itu bagi dua, TPA Legok Nangka Pak, sekarang belum difungsikan katanya tahun ini mau difungsikan atau kapan tidak tahu karena sudah lama.

TPA Legok Nangka itu untuk wilayah timur, Bandung Timur termasuk Garut dan Sumedang mau ikut disitu. Jadi yang di Sari Mukti itu untuk Bandung Barat dengan Cimahi Pak. Jadi katanya mau minta diperpanjang untuk Sari Mukti, minta dikerjasamakan supaya nanti bisa buang sampah itu sebagian ke TPA Legok Nangka, sebagian lagi ke TPA Sari Mukti. Karena kalau untuk satu TPA itu tidak mungkin tertampung terlalu banyak.

Yang kedua, masalah bak sampah dan motor sampah ini sangat perlu sekali untuk Dapil kami, karena terus terang saja Dapil kami ini dilalui Citarum, dari mata air itu sampak 100 KM dan rata-rata seperti tadi disampaikan di pedesaan itu kalau membuang sampah itu praktis sekali jadi kebelakang saja ke sungai. Ini sangat riskan sekali, karena sampah yang dikelola oleh Pemda Kabupaten itu hanya sampai tingkat kecamatan Pak, jadi di desa-desa yang dialiri Sungai Citarum cuma kebiasaan membunganya ke Citarum. Tolong Ibu Dirjen diperhatikan wilayah kami, jadi untuk bikin bak sampah dibantu juga motor sampah agar masyarakat tidak membuang sampah ke aliran Citarum ya. Secara umum ini *alhamdulillah* sudah diperbaiki dengan Citarum Harum dan mudah-mudahan dibantu dengan bak sampah dan motor sampah, Citarum Harum bisa terlaksana.

Demikian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Yadi, masalah motor sampah tidak perlu ditanyakan lagi. Tadi dari awal saya sudah ngomong jatah yang sana pindahan ke Komisi IV DPR RI semua. Dan Vivin sudah ngangguk-ngangguk dari tadi, jadi tidak usah ditanyakan lagi masalah motor sampah tadi.

Selanjutnya Mbak Nur'aeni, silakan.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan Komisi dan teman-teman, para Dirjen dan jajaran yang hadir disini.

KETUA RAPAT:

Ibu sudah makan siang?

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Sudah Pak, belum nambah saya, jadi masih lemes ya.

Sedikit saya ingin menyoroti kaitan dengan APBN LHK 2020, yang pertama dari sisi anggaran 2020 inikan sudah dialokasikan kurang lebih Rp9 triliun. Nah, sisi yang lainnya tentu saya melihat bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak ini yang masih rendah, kurang lebih Rp500 miliar. Nah, pertanyaan saya ini kenapa tidak optimal Kementerian untuk bisa melakukan upaya. Kenyataannya ya, apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua, investasi yang dilakukan oleh corporate, baik itu penambangan maupun dari kehutanan, inikan cukup besar luar biasa, serta tindakan-tindakan yang dilakukan juga masih lemah. Berarti ini dari Dirjen Penegakkan Hukum juga yang tidak berjalan, yang seharusnya bagaimana langkah kedepan Kementerian ini bisa melakukan inovasi atau terobosan, lompatan-lompatan agar nilai-nilai yang untuk nilai tambah pemasukan ke negara ini bisa dipungut sehingga menghasilkan sesuatu yang akhirnya digelontorkan kembali untuk kepentingan rakyat. Ini yang pertama.

Yang kedua, dari sisi belanja dari Rp9 triliun, Rp2 triliunnya dialokasikan untuk belanja pegawai kalau tidak salah gaji dan tunjangan kinerja. Yang ingin saya tanyakan disini kalau gaji pasti ya dari DAU, daerah juga yang menggajikan Pemerintah Pusat. Tapi yang ingin saya tanyakan Tukin disini, apakah Tukin memang sampai ke daerah ini difasilitasi oleh dari Kementerian, seperti apa. Dan walaupun ada ini untuk honorer mohon diperhatikan yang honorer yang ada di bawah Kementerian LHK inikan banyak, akan tetapi keberadaannya di daerah ini masih miris Pak. Tetapi disinikan anggarannya diplot Rp2 triliun masuk juga salah satunya kesana. Nah, mohon koreksi seperti apa ini.

Kaitan yang lain tadi ada yang menyampaikan juga dari Dapil Bogor, bahwa keberadaan Kementerian LHK di saat banjir kemarin termasuk di Banten Lebak. Saya tidak melihat bahwa Kementerian LHK serius untuk bisa terlibat aktif dalam menyelesaikan atau memberikan solusi untuk penanganan banjir di Lebak. Kenyataannya di sana ada kemungkinan indikasi, indikasi ya bahwa disana ada Taman Nasional Halimun Salak, indikasinya itu mengarah ada penambangan ilegal. Apa upaya yang dilakukan oleh Kementerian LHK agar kedepan ini tidak terjadi berulang terus menerus. Terus pembinaan model apa lagi yang akan dilakukan agar masyarakat juga dari sisi nilai ekonomis juga bisa diperhatikan, tidak hanya mungkin menanam untuk bisa pencegahan dini dan sebagainya tapi nilai ekonomis kesana juga perlu dipikirkan.

Nah, yang paling greget tadi saya mau protes sebetulnya, interupsi Bapak Ketua. Kaitan tadi program yang diberikan oleh Dirjen Tanaman tadi yang sudah diklarifikasi oleh Sekjen, banyaknya nama-nama ini mohon menjadi *warning*. Ke depan jangan sampai ditulis angkanya, kalau program boleh namanya kita mewakili, namanya kita punya aspirasi, tapi kalau sudah bicara angka kalau sudah dibaca ke publik, penegak hukum dan lain sebagainya itu image-nya sudah berbeda. Nah, yang bikin saya kesel kenapa Fraksi Demokrat tidak teruang disitu namanya, ada apa sebetulnya. Ini perlu secepatnya dijawab ini, jangan sampai nanti bikin tanda kutib dan kecemburuan dan adanya ketimpangan yang satu sekian dan yang satunya sekian.

KETUA RAPAT:

Cukup?

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Sebentar Pak, banyak Pak.

KETUA RAPAT:

Kalau mau banyak nanti diperdalam.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Ya boleh, yang lain ini Pak Ketua, ini adanya program pemberian benih berkualitas dari sumber benih bersertifikat dan lain sebagainya ini untuk masyarakat langsung ini persemaian, yaitu kurang lebih 40 juta batang. Saya kira tidak hanya berbicara jumlah 40 juta batang dengan angka Rp100 miliar, tetapi ini seperti apa model yang akan digulirkan, karena ini kaitan dengan pertanggungjawaban. Nah, saya kira lahan dan lain sebagainya ini juga sudah harus masuk diperhatikan. Jadi tidak liar bicara dari Rp100 miliar, 40 juta, kan susah itu menghitungnya.

Lainnya saya kira ini ada kaitan dengan yang paling banyak ini di program pengendalian DAS. Saya melihat Banten ini belum masuk ya ke dalam program Kementerian Dirjen DAS ini. Karena disini Banten ini melekat

masih ke DAS Citarum, padahal itu bukan wilayah provinsi Banten. Nah, maksud saya yang ingin saya tanyakan data dari mana sih sebetulnya, apakah *copy paste* saja data-data yang lalu-lalu, tahun yang lalu masuk lagi, yang seharusnya ini sudah dilakukan revisi-revisi terhadap penyesuaian jumlah provinsi, Banten itu sudah dimekarkan dari tahun 2000, masa iya datanya Citarum-Citarum terus, apa maksudnya. Ini harus segera dijawab ini.

KETUA RAPAT:

Cukup Ibu Nur'aeni?

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Nanti Pak, ada lagi.

KETUA RAPAT:

Tidak, nanti sesuai Tatib sudah lebih 3 menit, nanti selesai ini pendalaman boleh Ibu ngomong 2 jam.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Satu lagi, kaitan sama sampah.

KETUA RAPAT:

Oke, satu lagi.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Sampah, saya setuju tadi Pak Johan terdahulu menyampaikan bahwa kita harus ada komitmen. Sudahlah jangan ada celah lagi bangsa kita ini untuk melakukan impor sampah yang akan merugikan yang berdampak kepada kepentingan masyarakat. Bagaimana kita mengoptimalkan sampah, pengelolaan sampah dalam negeri saja sudah pusing Bapak Ketua. Di Banten sendiri, Pantai Anyer yang segitu hebatnya sekarang sudah penuh dengan sampah. Mohon kiranya Ibu Dirjen ini memperhatikan lebih pantai yang awalnya untuk bisa dinikmati dijadikan tempat wisata pemandangan cukup indah, karena banyaknya sampah masyarakat edukasinya yang masih rendah serta sarana prasarananya yang masih minim ini juga harus diperhatikan. Saya setuju Pak Ketua, bahwa Dirjen Pengelolaan Sampah ini untuk ditambahkan dari sisi penganggarannya. Karena diperkotaan seperti DKI, Banten, Serang, Tangerang itu butuh sekali pengelolaan pengendalian persampahannya

KETUA RAPAT:

Cukup, nanti Ibu kalau jadi Anggota Banggar yang ikut nambahin. Terus satu lagi tadi sudah jelas sudah dikatakan, Bapak Sekjen tadi sudah minta maaf bahwa terjadi kesalahan untuk yang akan datang jangan terjadi

kesalahan lagi. Kemudian juga setelah ini pulang tolong direvisi permasalahan daerah Dapil Anggota yang bukan angkanya tapi programnya. Mbak Nur'aeni satu hal yang perlu dicermati PNBP-nya bukan Rp500 miliar akan tetapi Rp1 triliun.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Tapi disini Rp500 miliar kurang lebih saya baca.

KETUA RAPAT:

Ini datanya diberikan Rp1 triliun.

Selanjutnya Bapak Mindo Sianipar, silakan.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Terima kasih Pimpinan Sidang.

Terkait dengan sampah saya ingin mengingatkan kembali Ibu, kalau memungkinkan tadikan banyak minta motor-motor, bukan itu yang saya pikirkan. Kelihatannya apakah kesadaran yang kurang dari Pemda atau dananya tidak ada dari Pemda, sehingga ini kurang tertangani. Jadi harus ada DAK, anggaran DAK sosialisasi soal sampah ini, sosialisasi soal sampah ini. Kebanjiran itu dimana pun tidak hanya di Jakarta, di daerah manapun karena tersumbatnya jalur air. Yang sumbat itu siapa? Ya, masyarakat juga. Jadi kadangkala tidak ada hak masyarakat untuk teriak soal banjir, karena dia juga yang tidak ada kesadaran untuk membersihkan saluran air itu. Nah, jadi harus ada sosialisasi bagaimana anggarannya. Itu yang satu.

Kedua, terhadap yang substansial soal sampah, secara khusus plastik mungkin Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup perlu duduk untuk membuat katagorisasi kalau soal sampah plastik dan sampah lainnya tidak boleh kita impor saya setuju dengan itu. Tetapi terhadap kedua ini mana yang bisa kita katagorikan sebagai bahan baku daur ulang, mana yang tidak. Karena ini nanti terkait dengan pengaturan soal sampah plastik. Ada dua jenis plastik yang sekarang sudah beredar, yang beredar yang sekali pakai yang mahal harganya, direct biogradable itu yang ada karbonnya dari nabati. Ada biodegradable juga tapi butuh waktu mungkin 2 sampai 4 tahun, tidak menggunakan nabati plastik tetapi menggunakan katalis. Jadi mungkin pendekatan Peraturan Perundangan atau Peraturan Menteri itu diarahkan soal biodegradable-nya dalam berapa tahun. Disitu jangan langsung kita ikat bahwa dia harus berasal dari nabati.

Indonesia dan Singapura dua daerah yang berbeda, Jerman, Eropa Barat berbeda pula. Mereka tentu bisa dengan pembakaran pakai insinarator, insinarator yang akhirnya menghasilkan NOX merusak atmosfer itu yang mereka rubah sekarang harus berbasis nabati. Nah, Indonesia tidak seperti itu, dia pemusnahannya selama ini tidak langsung dengan lewat insinarator, landfeel, tetapi kalau dengan menggunakan bahan yang bisa dipastikan di

bawah 5 tahun menjadi katagori biodegradable saya kira itu layak jadi pilihan, karena *cost*-nya pasti lebih rendah. Orang-orang kecil, UKM dan masyarakat kecil tetap bisa menggunakan plastik yang biodegradable.

Saya kira ini mohon perhatian saudara Dirjen, saya berbicara substansial, saya siap diskusi ilmiah soal ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Mindo.

Jadi kalau masalah tadi stop impor sampah ya bukan wewenangya LHK, yang memberikan ijin itukan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Cuma yang bagian pengawasan apabila terjadi pelanggaran itu kewajiban LHK.

Selanjutnya Mbah Tarom, silakan Mbah.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Pimpinan dan yang saya hormati Kementerian KLHK, Bapak Sekjen, para Dirjen dan Bapak-bapak Anggota Komisi IV DPR RI.

Langsung saja yang pertama, disini saya seijin Ketua, ini saya sampaikan lebih dulu kalau diperkenankan akan menyampaikan aspirasi tertulis oleh LMDH Saratdan dan sekitar Madiun. Isi dari aspirasi tertulis ini diantaranya yaitu mengeluh dan sekaligus klarifikasi. Yang kedua, untuk minta diperhatikan. Mengeluhnya LMDH inikan bermitra dengan pihak Kehutanan kan sudah lama, tapi begitu ada lembaga baru yang notabenenya dikawal oleh lembaga yang mempunyai akses ke Pemerintah, maka mereka merasa cemburu sosiallah bahasa saya. Maka ini, kalau tidak ditata sedemikian rupa akan terjadi konflik horizontal karena dimungkinkan ada ijin di dalam ijin. Karena kafling ini mungkin sudah ada ijinnya tapi begitu ada orang baru notabenenya punya akses ke pusat, maka muncullah ijin baru. disinyalir seperti itu, maka ini harus ditertibkan.

Kemudian ini kaitannya dengan klarifikasinya apa benar ada lembaga baru yang dikawal oleh lembaga namanya mohon maaf, ini atas keterbatasan saya. Saya sebut saja siapa yang tersinggung saya juga tidak ngerti, di kawal oleh Gema. Ini merasa ada perhatian lebih begitu, ini klarifikasinya.

Kemudian untuk minta diperhatikan di dalam aspirasi tertulis ini teman-teman LMDH disana sebenarnya sudah mengajukan Kulin KK, Kulin KK ada 40 kelompok di sekitar sana ini kemarin disanggupi, diverifikasi teknis itu 15, akhirnya cuma diverifikasi 13 yang dua ini ada kesamaan klaim dari kelompok

LMDH dan kelompok baru tersebut. Ini kaitannya, ini nanti seijin Pimpinan atau Ketua, akan saya serahkan aspirasi tertulis ini kepada Bapak Sekjen.

Selanjutnya....

KETUA RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Muhtarom mau diberikan saja Pak?

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Nanti saya selesaikan saja ngomongnya Pak.

KETUA RAPAT:

Oke, siap.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Mudah-mudahan nanti tidak lupa, nanti kalau lupa saya ngeyel maju kedepan.

Kemudian yang berikutnya, karena memang kami ini *new comer*, pindah kamar. Saat ini hasil kunjungan kemarin di Mojokerto saya ini ditodong oleh Ketua DPRD Kota Mojokerto bahwa di Mojokerto ini ada galian CLGAL sejumlah 58 galian C. Kemarin sebenarnya saya mau digiring kesana, sudahlah saya sudah ngerti maksudnya sampean ini nanti di waktu Rapat Dengar Pendapat nanti saya mintakan kejelasan kaitannya dengan regulasi yang mengatur ini, karena saat ini yang kita tahu bahwa kewenangan ijin itu dan pengawasannya ada di Provinsi.

Kalau memang seperti ini ya meskipun retribusinya masih di daerah kabupaten, Mudah-mudahan ini nanti bagaimana bisa dikembalikan ke daerah kabupaten kota, karena apa? karena yang terdampak itu masyarakat kabupaten dan kota. Provinsi mengeluarkan ijin ya ijin prinsip, eksplorasi, eksploitasi dan pengawasan tapi faktanya yang terdampak itu masyarakat kabupaten. Dan saya pikir tidak mungkinlah Satpol PP akan mengawasi seluruh wilayah di tingkat provinsi itu. Maka, harapan kita bagaimana ijin ini bisa dikembalikan lagi ke Pemerintah Kabupaten Kota. Kita tidak ngerti, saya pikir ini mungkin juga Undang-Undang meskipun secara teknis ada Permen atau apa kita belum tahu jelas.

Berikutnya, untuk Bapak KSDAE saya mohon kita diberi data terkait dengan halaman 10 dan 11, yaitu target kinerja Ditjen KSDAE tahun 2020. Ini dalam kontingen untuk pengawasan kita kedepan, karena kalau ini gelondong. Mungkin karena buku banyak, buku Bapak ini banyak sekali jadi seandainya ini sudah ditulis dibuku yang mana saya juga tidak karena buku ini kemarin baru diberikan, jadi saya juga tidak sempat membaca seluruhnya, karena yang saya baca ini halaman 10 dan halaman 11 dari KSDAE maka

kalau memang sudah ada ditulis disini ya tunjukkan saja di buku berapa begitu dan Dirjen apa.

Kemudian berikut bagaimana realokasi anggaran untuk Eselon I, ini digeser atau untuk menambah anggaran bantuan kemasyarakatan. Ini realokasi kalau memang memungkinkan dan mekanismenya juga ada atau prosedurnya, maka bagaimana kalau anggaran Eselon I yang jumlahnya berapa itu tadi tidak hafal, saya ini sudah agak umur jadi ongko-ongko ini tidak pakai hafalan, maka bagaimana kalau ini realokasikan ke bantuan kemasyarakatan.

Cukup Mas Budi, kalau memang sudah cukup ya saya taat Pimpinan cukup, ya cukup.

KETUA RAPAT:

Siap.

Terima kasih, itu aspirasi tertulisnya mau diserahkan Pak.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Siap.

KETUA RAPAT:

Monggo Pak, biar nanti di photo sekalian.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Mohon maaf Pak, saya tidak ngambil panggung politik tetapi memang ini aspirasi. Dikiranya saya ngambil panggung politik ini.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Muhtarom.

Tadi saya tekankan saja Bapak Sekjen sebenarnya, itu jadi konsen kami juga. Jadi dengan banyaknya bahan yang kami terima semoga kedepan kami bisa terima, mungkin perincian atau sekilas detail, misalnya tadi disebut Bapak Muhtarom program KSDAE di halaman 10 dan 11, misalnya pengelolaan kawasan konservasi di 900 desa kiranya di desa mana saja, kira-kira begitu ya Bapak Muhtarom ya. Ya, itu akan membantu kami di dalam membantu pengawasan juga di daerah-daerah pemilihan kami masing-masing.

Terima kasih Bapak Muhtarom dan sudah diberikan tadi aspirasinya. Berikut, kami berikan kesempatan kepada Bapak Abdullah Tuasikal.

F-NasDem (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan, Anggota Komisi IV DPR RI, Bapak Sekjen, para Dirjen Eselon I beserta jajarannya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Untuk Bapak Dirjen, saya kira apa yang disampaikan prinsipnya kita sepakat ada hal yang perlu saya sampaikan ini soal perencanaan dan anggaran saya lihat pada Kebun Bibit Rakyat. Saya kemarin kunjungan Dapil, lalu ada yang panggil, lalu saya diskusikan, karena saya dari awal juga kegiatan-kegiatan ini sering. Sesuai dengan Peraturan Menteri tahun 2018 itu pasal 5 mengatakan bahwa Kebun Bibit Rakyat diluar Jawa dan Madura itu 20 ribu batang untuk 25 hektar. Ini 20 ribu batang tidak sedikit, dikerjakan oleh kelompok dan kelompok juga tidak begitu banyak, berapa orang. Kalau 20 ribu lalu 25 hektar saya kira tidak mungkin, karena kalau 20 ribu dengan 25 hektar itu berarti jarak tanam sekitar 3,5 meter. Saya kira kalau di Maluku tidak ada satu jenis pohon pun bisa ditanam disini. Ini mungkin tolong di.

Lalu inikan juga butuh biaya, kalau umpamanya tanamannya pala, durian dan lain-lain, kalau tanamannya itu berarti dia butuh pesemaian, dia butuh polibek, dia butuh tanah kurang lebih sampai 10 rate tanah hitam, ada pengisian polibek, ada pengaturan polibek, dan ada perawatan selama sekian lama. Kalau diimbangi dengan 50 juta saya kira tidak mungkin, saya kemarin diskusi dengan teman-teman disana ya mereka juga tidak bisa jawab, Cuma katanya bisa, bisanya dimana. Dan tanamannya tanaman apa. Saya kira kalau di Jawa lalu umpamanya ambil biji Jati pesemaian tanam mungkin bisa, juga kalau 20 ribu itu kuwalahan, 20 ribu untuk satu kelompok yang kurang lebih 15 orang, saya kira tidak mungkin.

Tenaga kerja saja dia membiayai diri sendiri juga tidak mungkin, terlalu kecil. Kalau umpamanya perencanaannya betul silakan, tapi kalau memang ada dikit kurang saya harapkan agar sebelum kegiatan ini jalan itu harus direvisi, karena tidak mungkin. Dan ini kalau jalan ya sudah terkorupsi duluan, karena apa? 20 ribu batang tidak mungkin ditanam untuk 25 hektar, itu berarti ada yang tidak tertanam, itu satu hamparan. Kalau tidak satu hamparan itu maka kita butuh ratusan areal milik rakyat, lalu mau dimana.

Yang ketiga, kalau tanamnya di hutan kerin itu juga jauh, kalau jauh cara pengangkutan seperti apa. Jadi saya kira ini koreksi saja, silakan nanti mau dijawab atau tidak juga silakan. Tolong dikoreksi dan kalau memang yang saya katakan perlu dirubah saya kira perlu, karena kami juga terus terang saja jangan kita menyusahkan masyarakat. Karena kalau masalah kerja lalu ada pengawasan pasti mereka kena pidana. di Maluku ini saya kira tidak ada pohon yang bisa ditanam 3,6 mungkin ditempat lain juga. Saya pernah tanam durian, saya tahu berapa. Saya pernah tanam pala, tanam jati, saya juga pernah tanam. Kalau kita tanam jarak 5 meter itu berarti $20 \times 20 = 400$ pohon kalau 20 per hektar, kalau 25 hektar itu berarti dia masih 10 ribu

pohon, kalau 4 itu juga masih dibawah. Jadi saya kira ini tidak tepat alau 20 ribu batang ditanam untuk 25 hektar dari sisi perencanaan saya kira sudah keliru.

Dari sisi anggaran saya kira juga kasihan masyarakat. Saya kira ini bukan dari Kementerian, informasi dari daerah yang kadangkala keliru. Karena dari perencanaan disini, contohnya di Maluku saja tidak ada tanaman yang sekitar 3,5. Lalu kalau mau sangon, sangonnya beda, mana mungkin ada, tapikan harusnya angkut dari daerah lain.

Bapak Sekjen, saya kira tolong dikoreksi karena ini ada hubungan, artinya ada hubungan dengan masyarakat dan ada hubungan perencanaan kedepan. Jadi tolong dikoreksi, saya Cuma ini saja karena yang tadi saya katakan keseimbangan perencanaan biaya dengan 50 juta dengan 20 ribu batang dengan 25 hektar itu tidak sebanding, kasihan masyarakat. Dan saya kira masyarakat kita biasanya jenuh. Kalau dari Kementerian kasih saja 20 ribu batang saya kira mereka juga tidak mungkin bisa tanam, karena terlalu banyak. Jadi kedepan kalau mau dirancang jangan sampai 20 ribu batang.

KETUA RAPAT:

Baik Pak, kayaknya sudah jelas.

F-NasDem (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Saya kira sudah jelas, oke.

KETUA RAPAT:

Oke, terima kasih.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Interupsi Ketua.

KETUA RAPAT:

Bapak Muhtarom mau interupsi.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Interupsi, cuma anu saja perbaiki redaksi atau salah ketik saja. Disini ini tulisan itu Partai Keadilan Bangsa, yang benar itu Partai Kebangkitan Bangsa. Mohon maaf, Saya khawatir nanti kalau kena Bapak Johan sama Bapak Slamet. Partai Kebangkitan Bangsa Pak, bukan keadilan Bangsa.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Muhtarom, mohon koreksi Bapak Sekjen dan teman-teman KLHK.

Berikut Pak Ansy Lema, kami persilakan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Terima kasih Bapak Budi.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, Bapak Sekjen dan para Dirjen serta jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua.

Saya ingin bicara soal Taman Nasional Komodo sebagai eko wisata dan destinasi wisata yang konon kabarnya super premium itu Pak. Pertanyaan saya terkait dengan Taman Nasional Komodo itu KLHK disana itu tanggungjawab utamanya itu investasi atau konservasi ataukah kedua-duanya. Kalau kedua-duanya apa kir-kira tujuan dari investasi, kira-kira hitungan provitnya seperti apa, kalau hanya konservasi apa step-step yang mau dilakukan. Bicara investasi dan konservasi ini tidak mudah untuk mendamaikan Pak, karena itu saya ingin tahu bagaimana menselaraskan antara investasi dan konservasi ini.

Disana ada gambar yang saya dapatkan Pak, itu ada Pulau Padar, Pulau Komodo dan Pulau Rinca, dan ada ijin investasi yang sudah dikeluarkan disana. Saya dapatkan infomasi kemarin Dirjen KSDAE tanggal 30 Januari 2020 baru saja menggelar rapat dan kemudian sudah ada beberapa perusahaan yang diberikan ijin untuk berinvestasi di 2 pulau itu Pak. Ada Permen KLHK Nomor 8 Tahun 2019 terkait dengan pengusahaan pariwisata alam di suaka marga satwa taman nasional, tanam hutan rakyat dan taman wisata alam yang sebenarnya membolehkan hal ini.

Posisi saya adalah begini Pak, ini pulau-pulau ini bukan pulau kosong Pak, ada penghuninya, penghuninya namanya Komodo. Komodo ini bukan kawasan ekosistem biasa Pak. Yang ingin saya tanyakan kedua, apakah sudah ada kajian akademis terkait dengan keluarnya Permen ini yang kemudian membolehkan bahwa di kawasan konservasi ini diberikan ijin investasi. Mungkin saat ini beberapa perusahaan tetapi kalau ijin ini dikeluarkan bukan tidak mungkin akan ada ijin-ijin selanjutnya Pak.

Saya sebagai putera daerah dari Nusa Tenggara Timur, memahami betul NTT. Bagi saya Taman Nasional Komodo yang ada di pulau-pulau mestinya *core business*-nya itu adalah *nature*, alam. Taman nasional Komodo adalah *the master piece of god*. Sementara di darat yang harus dikembangkan itu adalah aspek *culture*, aspek budayanya. Lalu dimana intervensi manusia, ya di darat Pak, menurut saya, disitu yang harus

dikembangkan. Karena itu, sebagai Anggota DPR RI saya ingin mendapatkan penjelasan Pak, apakah kajian akademisnya, apakah masyarakat disana, DPRD, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, masyarakat sipil sudah dilibatkan untuk bicara soal ini. Karena baru beberapa jam yang lalu mereka memberikan complain kepada saya ketika tahu bahwa hari ini Komisi IV DPR RI menggelar rapat bersama KLHK Pak.

Yang kedua, soal sampah. Beberapa waktu lalu Ibu Dirjen sudah menjelaskan kepada saya menggambarkan komitmen yang cukup kuat. bagi saya sederhana Ibu, terkait dengan sampah di Taman Nasional Komodo butuh pengembangan sistem terkait penanganan dan pengolahan sampah ini. Nah, ini kalau seandainya dibangun resort yang banyak di pulau-pulau itu artinya sampah di pulau dan sampah diperairan Komodo itu akan semakin banyak. Sementara hari ini sampah di darat saja tidak tertangani Ibu. Nah, kalau ini dibiarkan tidak disiapkan semacam peta jalan yang besar ini akan menjadi bencana ekologis buat Taman Nasional Komodo. Kita tahu sampah selain punya nilai ekologis, juga punya nilai ekonomis. Saya ingin mendapatkan gambaran apakah ada konsep atau narasi besar dari Kementerian terutama Dirjen yang dipimpin oleh Ibu Vivin terkait dengan penanganan dan pengelolaan sampah ini.

Terakhir, bagi kami orang NTT terutama orang Flores yang utama itu adalah menjaga keutuhan ekosistem alam di Komodo dan kemudian melestarikan kebudayaannya. Karena itu, KLHK saya ingatkan hati-hati mengambil langkah ketika ingin membangun resort, melakukan investasi di pulau-pulau yang ada di Taman Nasional Komodi.

Sekian dan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Ansy.

Saya rasa kita sama-sama sepakat ya, di dalam mengedepankan investasi ataupun konservasi khususnya dipulau-pulau destinasi pariwisata prioritas yang salah satunya ada Pulau Komodo, ini adalah salah satu mungkin icon bangsa kekayaan bangsa Indonesia yang nilainya mungkin tidak bisa di Rupiahkan lagi. Kita sebagai Komisi IV DPR RI kita akan terus menyoroti permasalahan ini. Jangan sampai demi nama investasi kita melupakan nilai-nilai untuk kita menjaga kekayaan yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Pak Ansy, saya sebagai Pimpinan, saya ingin kita selalu diingatkan masalah ini semoga jangan sungkan-sungkan, kalau Pimpinan ini kadang-kadang lupa mengenai permasalahan-permasalahan seperti ini, tolong kami diingatkan. Di daerah-daerah lain pun kita juga ingin mendorong seperti ini, di 5 destinasi wisata yang telah ditetapkan sebagai daerah wisata prioritas. Jangan sampai kita ini mengundang investasi, mau menambahkan nilai ekonomi tapi kita melupakan nilai-nilai ataupun kekayaan yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa juga.

Terima kasih Bapak Ansy, berikutnya kita berikan kesempatan kepada Ibu Alien saya lihat tidak ada. Kita *subtituted*, silakan Bapak Muslim.

F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sore, salam sejahtera buat kita semua.

Bapak Sekjen beserta seluruh Dirjen KLHK yang saya hormati.

Pertama, tentunya saya tidak panjang karena memang saya tidak mengikuti dari awal Bapak Budi. Saya kebetulan ini ada beberapa Bapak Dirjen, kita baru selesai mengunjungi Aceh kemarin ketika reses pertama. Dan ini ada Bapak Dirjen yang khusus menangani masalah lingkungan. Pertama, tentunya yang menjadi sekarang ada problem yang sangat mendasar di Aceh itu persoalan Gajah Pak, khususnya di Kabupaten Bener Meriah ini, bahkan sudah di-film kan saya sudah nonton filmnya kemarin itu. Ini mumpung hadir disini ada Bapak Dirjen. Artinya apa, ini masyarakat khususnya Pemerintah Daerah ini baik provinsi dan di Kabupaten ini sampai hari ini belum ada solusi Pak Dirjen.

Saya berharap ini nanti ada Bapak Sekjen yang hadir ini ya, ini minta segera sampaikan kepada Ibu Menteri supaya Bapak Dirjen segera turun kelapangan. Kenapa? Ini sangat meresahkan masyarakat Pak, khususnya di Kabupaten Bener Meriah. Artinya apa? ini sebenarnya kalau kita lihat secara umum sebenarnya ke aset ini, karena komunitas gajah terbesar hari ini ada di Pulau Sumatera khususnya di Aceh. Ini mereka bingung mau lari kemana lagi Pak, kan tidak mungkin juga kita menggunakan senjata, meracuni saya pikir bukan solusi itu Pak. Waktu itu saya sudah menghadap Bapak Dirjen KSDAE ini saya berharap ini ada langkah-langkah konkrit lakukan oleh Kementerian untuk menyelamatkan satwa liar ini Pak, tentu menyelematkan masyarakat juga Pak.

Ini mereka bingung Pak, setiap hari anggaran Pemerintah Daerah sudah tidak cukup Bapak Sudin. Mereka mengadakan dengan seperti mercon dan segala macam tapi itukan bukan solusi, itu solusi jangka pendek. Saya berharap juga ini kita harus bikin sebagai *pilot project* Bapak Dirjen, khususnya di Aceh. Jadi harus jadi eko wisata, jadi gajah ini tidak harus dikejar, harus diasingkan tetapi dibuat sebuah sebagai eko wisata, jadi sehingga ada nilai manfaat juga buat masyarakat, kemudian juga bisa mendatangkan satu nilai khususnya dalam konteks pariwisata.

Ini Pak Sekjen, tolong Bapak Sekjen sampaikan kepada Ibu Menteri. Ini masyarakat saya berharap segera Bapak Dirjen turun tangan. Ya Bapak Dirjen, saya akan ikut dampingi nanti Pak, kenapa? Karena ini cukup meresahkan masyarakat Pak, bahkan sudah banyak korban jiwa Pak, sudah ada yang meninggal Bapak Sudin. Ini artinya bukan hanya persoalan Pemerintah Daerah sudah tidak kuat Pak, sudah tidak sanggup. Jadi kita

minta dari Kementerian, kita cari solusi bareng-bareng bagaimana merelokasikan gajah-gajah ini, bisa dibuatkan saja disini juga ada program eko wisata ini. Di sini ada di Dirjen PHPL misalnya disini point pengembangan pemanfaatan keanekaragaman hayati termasuk juga dalam konteks penangkaran ini juga bisa menjadi solusi.

Yang terakhir tadi saya tidak mengulang lagi apa yang disampaikan Bapak Ketua, ini masukan kepada Bapak Sekjen terhadap juga tadi menyangkut daftar nama-nama Anggota Komisi IV DPR RI saya tidak ulang lagi Pak Sudin, ini jadi perhatian buat kita semua inikan menyangkut Dapil masing-masing. Saya berharap disini juga tolong kami dikasih tahu, diberitahu sehingga kita juga ada manfaatnya buat kepentingan daerah Pak, dan membantu Bapak-bapak semua saya yakin ini. Kita tidak ada kepentingan lain Pak, di DPR RI ini. Kepentingan kita ketika kita bermanfaat itu ada kebahagiaan tersendiri dan juga bisa membantu program Pemerintah apapun. Saya yakin para Dirjen itu tidak usah sungkan-sungkan sampaikan saja kepada kita. Ini teman-teman DPR RI ini ada program ini silakan, yang tidak mau ambil silakan, tapi yang mau silakan mengikuti mekanisme dan prosedur yang ada.

Saya pikir itu Pimpinan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Muslim.

Dua terakhir, Mbak Alien setelah itu yang terakhir yang paling mantap ini dari Bapak Darori.

Silakan Mbak Alien.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI dan Anggota Komisi IV DPR RI,

Yang saya hormati Bapak Sekjen beserta jajaran Dirjennya.

Saya ingin mempertanyakan langsung kepada Ibu Vivin ini, soal program kegiatan pengolahan sampah, limbah dan B3. Saya melihat ada 5 point, salah satunya adalah pengolahan sampah terpadu di wilayah pesisir dan laut. Dan saya juga melihat penyediaan fasilitas pengolahan limbah B3 dan sumber fasilitas pelayanan kesehatan. Bu, sesuai dengan anggaran memang perlu, Bapak Sekjen ini perlu juga ditambahkan karena memang tanggungjawab beliau sangat besar, karena berdampak langsung dengan

masyarakat dan lingkungan kehidupan yang kita hadapi sekarang adalah beberapa gangguan dari ijin-ijin pertambangan juga limbah B3. Saya sudah bolak-balik draft yang Ibu berikan kepada kami ini ada 34 provinsi tapi baru 20-an provinsi. Termasuk provinsi saya tidak dimasukkan, padahal ada ribuan ijin pertambangan yang ada di provinsi saya Ibu. Limbahnya harus kita pertanyakan. Tolong diprioritaskan bagi daerah-daerah yang memiliki ijin pertambangan, bukan hanya di provinsi saya di provinsi lain pun banyak Ibu.

Sekarang Ibu, kemarin saya pulang saya tidak tahu begitu banyaknya buaya yang ada di perlautan lintas Provinsi Maluku Utara dan Papua. Bukan Buaya Darat Pak, buaya yang darat ke laut. Jadi ini juga harus karena saya bertanya kok bisa hewan-hewan ini bisa sekarang ada di laut yang tadinya, dan harus Ibu ketahui sudah banyak masalah buaya menggigit manusia, bukan manusia dihajar buaya Pak. Ternyata saya selidiki juga saya tanya karena tempat tinggal mereka dikenakan limbah industry itu di air dan mereka tidak nyaman lagi tinggal disitu. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya juga pernah menyampaikan kepada Ibu langsung bahwa di perairan kami dan juga di Provinsi NTB dan NTT juga termasuk perairan laut yang banyak sampah, tolong juga diperhatikan. Dan juga saya sudah tidak mau singgung seperti yang Pak Muslim sampaikan tentang draft-draft yang sebelumnya. Kami ingin memberitahukan soal sampah yang kemarin kita sudah melakukan tinjauan langsung ke Tanjung Priok. Ini menjadi atensi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia bagaimana tanggungjawab kita sebagai DPR RI Komisi IV dalam mempertanyakan pertanggungjawaban sampah-sampah itu mau dikemanakan. Statusnya seperti apa, ini kita lagi dihadapi dengan kasus flu atau apa ini, virus apa sekarang? Kalau Korona ada orang Manado namanya Korona cantik banget, mudah-mudahan jangan yang itu. Inikan harus kita pertanyakan Ibu, jangan sampai juga limbah kesehatan virus itu bisa masuk juga ke kita dan kita tidak tahu. Betul tidak sih Pak dan Ibu? Sudah 3 menit belum Pak? sesuai dengan nomor partai saya. Baik, itu saja.

Untuk ada beberapa untuk gambut saya pikir nanti masing-masing punya wilayah yang punya lahan gambut yang akan mempertanyakan lebih detail. Dan saya hargai persis Ibu Vivin bahwa ini adalah tanggungjawab kita bersama. Di depan Bapak dan Ibu semua, Bapak Sekjen, Bapak Dirjen-dirjen semua tolong ini diperhatikan karena kita punya kehidupan ada di tangan Bapak dan Ibu semua. Tolong diperhatikan baik-baik, karena kita kesehatannya kedepan mau kayak gimana itu di tangan Bapak dan Ibu sekalian.

Itu saja yang bisa saya sampaikan, terima kasih Pimpinan, terima kasih Bapak Sekjen dan Ibu Dirjen dan semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

F-GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Daftar Pimpinan, Sumail Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ini interupsi atau pertanyaan Pak?

Daftar untuk pertanyaan, sebentar Pak Ketua akan ambil alih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Saya pikir Bapak datang belakangan, yang paling rajin itu mantan Dirjen. Jadi silakan Mantan Dirjen, saya ingatkan Bapak dan Ibu semuanya, ini kamus dari Bapak Kanjeng Darori ini mengatakan Bapak dan Ibu jangan belaga sibuk-sibuk nulis nanti sampai diluar dibuang. Saya tidak mau seperti itu, karena beliau belajar dari pengalaman menyampaikan kepada saya.

Lanjut Kanjeng.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Ketua, teman-teman sekalian, dan Eselon I semua dan jajarannya.

Pertama, saya bangga hari ini kita rapat komunikasi ini sangat baik ya saya kira Bapak Sekjen dan teman-teman kita jaga seterusnya lebih baik lagi. Saya disini tidak bertanya hanya menambah apa yang disampaikan oleh teman-teman terutama tadi pagi Bapak Ketua menyampaikan kenapa tidak sewa pakai, kok pinjam pakai ini bagus sekali karena ini kita terikat dengan Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan. Dan ini Undang-Undang Nomor 41 sekarang sedang masuk prolegnas 2020 sampai 2024 mohon menjadi perhatian untuk kawasan baik produksi sampai konservasi bukan pinjam tapi sewa pakai. Dan sewa pakai dananya digunakan untuk konservasi dan reboisasi itu diikat di dalam Undang-Undang itu. Itu yang pertama.

Yang kedua, dalam hal tukar menukar ini Bapak Sigit Bapak Dirjen Plano. Ini selama inikan kita berdasarkan perbandingan 2-1, 1-2, dan sebagainya. Ini tolong jadi perhatian kita jangan kembali kepada sistem lama, kita kembali menurut NJOP. Karena saya dengar ini kita punya tanah masih kehutanan di Pantai Indah Kapuk 100 hektar itu sudah diincar oleh pengusaha akan ditukar dua hektar di Sukabumi, itu aturannya. Saya kira NJOP-lah karena tanah disana harganya sudah Rp20 juta per meter. Jadi kalau NJOP-nya Rp20 juta kalau 1 hektar 1000 meter persegi sudah 20 miliar. Belikan di Sukabumi Rp20 miliar sudah berapa puluh hektar itu. Ini perlu nanti dalam perubahan Undang-Undang Nomor 41 karena itu sudah nempel dengan Pantai Indah Kapuk yang wisata alam. Tolong ini menjadi perhatian

jangan sampai kita kebobolan lagi ini masa lalu, karena ini Pak Ketua, Pantai Indah Kapuk sebenarnya dipertanyakan oleh penegak hukum datang ke saya nanyakan, saya bilang “dari Presidennya sampai Kepala Seksinya sudah meninggal semua Pak, saya kira susah ngusutnya”. *Alhamdulillah* sudah meninggal, kalau belum bisa ditarik-tarik lagi. Itu yang pertama.

Yang kedua, tadi mendalami Bapak Ichsan, ini wisata alam. Wisata alam kita banyak yang idol artinya tidak dilaksanakan. Saya kira sudah berapa kali diperingati tolong dicabut, mungkin teman-teman Komisi IV DPR RI untuk persiapan pensiun bisa diberikan ijinnyalah. Saya kira setuju untuk modal pensiun. Dan di Jawa Barat itu banyak sekali wisata alam yang liar dipungut, baik oleh oknum kita juga oleh Perum Perhutani, tolong itu ditertibkan mungkin dengan Gakkum ya, itu dikutib untuk pribadi-pribadi itu sudah lama, kita sulit untuk mengatasinya tapi saya kira sudah perlu ditindaklanjuti.

Untuk Halimun Salak ini tadi Ibu Nur, ini Halimun Salak ini dulu sudah atas permintaan Komisi IV DPR RI sudah mau ditertibkan. Buldoser sudah diatas, ternyata yang punya villa-villa itu tembok-tembok besar Ibu. Jadi ini mungkin masih Bapak Istanto sekarang Direktur Kepala Balainya sampai mau dipecat itu oleh Menteri, karena dia sudah pasang plat di rumah-rumahnya, tembok besar. Jadi kalau tembok besar belum dirubuhkan tidak mungkin penambang emas akan ditertibkan. Ini yang perlu kami sampaikan.

Selanjutnya mengenai WWF kemarin saya ketemu Bapak Kuntoro, saya memberikan masukan saja karena saya paham dulu kan kami yang menangani. Nah, dengan bergabungnya lingkungan hidup, kebetulan ini kada benturan. Dulu kita sama lingkungan hidup saja sering gesekan-gesekan soal ini, saya kira Badan BRG tahu ini, karena dulu di WWF kan, paham. Tapi kita tidak perlu anulah, karena ini akan menjadi ajang polemik yang cukup besar, tolong saran saya dibentuk timlah, tim internal daripada Kementerian karena ada kurang lebih 30 kegiatan WWF disitu, mana yang benar ya kita lanjutkan. Contohnya, Ujung Kulon sama tempatnya Bapak Sudin Lampung itukan perlu bantuan anggaran untuk patroli gajah dan seterusnya, Harimau Sumatera itu semua itu perlu. Kalau memang sudah diperlukan Ujung Kulon juga perlu, karena semua pada WA ke saya Bapak Sekjen, kalau memang itu baik dilanjutkan kalau setengah baik diperbaiki, kalau memang dia nakal kita pidanakan. Jadi ada ini saran-saran saya mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti.

Dan selanjutnya ini Bapak Bambang, ini perhutanan sosial sesuai dengan pesan Bapak Presiden minta tanam 1 jenis buah-buahan hamparannya 50 hektar itu. Tolong ada monumenlah, kalau Ibu Mega punya monument di Gunung Kidul kemarin kita tahu pohon jati 300 hektar, Pak SBY punya pohon Cemara di Kebumen 360 hektar, kenang-kenangan Bapak Jokowi apa, minimal Manggis misalnya 50 hektar.

Dan juga saya terus terang ini teman-teman Kehutanan dikritik kok kalah ya, walaupun sudah senior Ibu Mega masih mau tanam pohon. Ini terima kasih Bapak Sudin, ini kritiknya kepada saya, sebenarnya kalau saya

dijijinkan kemarin mau ikut nanam, tapi karena takut tidak diijijinkan oleh partai, sebenarnya saya ingin ikut nanam karena itu penting, itu sosialisasi kepada masyarakat. Kita selama di Komisi IV DPR RI ini belum pernah diajak menanam pohon mensosialisasikan, tolonglah periode 5 tahun kedepan kita adakan kegiatan, bukan ceremonial akan tetapi yang betul-betul kita menanam seperti coba Ibu Mega ke Banyuwangi nanam, Bandung nanam. Itukan saya dikritik ini di WA kapan yang lain Pak, ini kok kalah itu, tidak kalah ini diingatkan kembali oleh Ibu Mega. Terima kasih Bapak Sudin, karena gambar Bapak Sudin dan Bapak Mindo, Bapak Made disitu luar biasa itu, di photonya saya baca.

Saya kira itu jadi tidak perlu dijawab, saya kira ini masukan-masukan kedepan untuk kita lebih baik lagi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Kanjeng.

Tadi termasuk diingatkan jangan habis nuli dibuang Kanjeng ya. Saya setuju sekali apa yang disampaikan oleh semior di LHK, kendalanya tadi Lampung pun sama dengan Bapak Muslim. Yang kita harus koreksi adalah Undang-Undangnya, hutan lindung di bawah provinsi. Sedangkan Provinsi tidak mengurus hutan lindungnya. Ini menjadi tanggung jawab siapa, gajah itu dari taman nasional keluar karena tidak ada makanan, hutan lindungnya habis dibabat. Iniloh yang terjadi Bapak Muslim, ini bukan hanya kewajiban LHK, juga bukan Provinsi, bukan Kabupaten, ini kewajiban kita semua untuk menjaganya.

Silakan yang terakhir Bapak, Bapak baru datang 5 menit saya silakan Pak.

F-GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Baik, sekedar penyampaian ini Pak Pimpinan.

Saya sebenarnya dari pagi tadi seperti itu, kebetulan ketemu dengan Pimpinan di ruangan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya.

Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,
Bapak Sekjen dan Bapak dan Ibu Dirjen dan seluruh segenap jajaran di KLHK.

Saya memberikan apresiasi mendengarkan dari pagi tadi mengenai paparan dari masing-masing Dirjen kaitannya bagaimana pelestarian keanekaragaman hayati menjaga hutan sehingga lestari dan kemudian

memberikan dampak kualitas hidup kepada kita semua. Fokus akan saya coba arahkan kepada Dirjen Planologi Bapak Sigit barangkali. Pak, saya berasal dari Banyuwangi hari ini disama timbul keresahan yang luar biasa. Di mana ada status penurunan hutan dari hutan lindung, ada konservasi juga kemudian menjadi tambang. Tumpang Pitu itu diberikan dan itu hingga saat ini banyak ristensi dan penolakan dari masyarakat tetapi seolah-olah hingga hari ini kita tutup mata akan keretakan-keretakan sosial yang ada disana. Bahkan juga dari aparat juga dikerahkan disana untuk membungkam agar masyarakat setuju, padahal kita ketahui bersama bahwa ada bentang ekologi yang di Tumpang Pitu juga saya tambahkan, hari ini juga ada tambahan ijin konsensi terhadap PT. DSI Pak Ketua, yang lama belum tuntas, muncul lagi yang baru. Di mana juga terjadi adu domba terhadap pihak-pihak yang tidak setuju terhadap keberadaan PT. tambang yang ada disana. Apabila ini tidak ditangani secara serius maka Bapak dan Ibu sekalian, tentu kerusakan ekologi juga di depan mata, di mana Tumpang pitu dan Gunung Salah itu merupakan benteng alamiah apabila terjadi Tsunami maupun tanah longsor dan gempa yang ada disana.

Saya mohon ini dievaluasi bahkan dikoreksi, ada kajian, ada survey, dan telaah ulang terhadap perbedaan PT tambang emas yang ada di Banyuwangi. Kira-kira itu Bapak Pimpinan, mungkin satu saat kita agendakan untuk bisa datang kesana, kita melihat secara factual apa yang terjadi disana.

Demikian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Bapak Sudin yang baik hati.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Jangan lupakan Beijing.

Demikian pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI. Selanjutnya kami persilakan kepada Eselon I dan/atau Kepala BRG untuk menyampaikan jawabannya. Saya ingin jawabannya jelas, singkat, plus jawaban tertulis. Karena jawaban tertulis akan disimpan file oleh Anggota Komisi IV DPR RI. Jadi apa yang disampaikan kita simpan juga, supaya nanti waktu Rapat Kerja sama tidak dengan jawabannya. Dan yang lebih penting lagi, tadi teman-teman meminta ada realokasi anggaran untuk kepentingan rakyat. Kalau memang harus dilaksanakan ya laksanakan, disana tadi pengolahan sampah dananya hanya Rp130 sekian miliar, ini cukup apa, kan sungguh miris sekali. Sementara untuk persoalan sampah ini yang menjadi utama, apa tidak kita mungkin bikin terobosan sampah jadi energi listrik. Kita cari investor dari luar kalau yang lokal tidak ada. Saya sudah pernah mengunjungi tempat pengolahan sampah yang menjadi energi listrik di Kota Paris-Perancis. Tapi ya kendalanya itu kadang-kadang dipersulit oleh kita sendiri, oleh regulasi kita. Kenapa demikian? Contohnya, nanti

energi listrik dijual dengan harga yang murah, tidak sesuai dengan investasinya. Kadangkala juga mohon maaf ada oknum kepala daerah yang agak-agak mempersulit.

Ini menjadi bahan pikiran kita semua, kalau kita masih pakai sistem konvensional ya percuma saja sampai kapanpun tidak akan selesai. Jadi silakan dijawab teman-teman yang tadi merasa saya batasi 3 menit boleh pendalaman tapi jangan terlalu dalam.

Silakan.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak dan Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Terima kasih atas pandangan, arahan dan tanggapan serta pertanyaan. Dan catatan saya ada 8 Eselon I yang terkait dengan respon dari Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, termasuk yang diarahkan kepada Sekjen. Dan dari beberapa Eselon I ini memang yang paling banyak itu terkait dengan KSDAE, PSLB3, PDASHL dan beberapa yang lain itu hampir sama kurang lebih satu, dua tanggapan.

Ijinkan saya merespon terlebih dahulu terkait dengan beberapa tanggapan dari Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI. Yang pertama, khususnya Bapak Ichsan menyangkut Badan Layanan Umum. Dan ini termasuk sosialisasi juga pada kesempatan ini, bahwa dengan keluarnya Perpres Nomor 46 tentang Pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup sebagai tindaklanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan LH, ini menjadikan posisi Badan Layanan Umum sekarang sudah masuk di dalam Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Dan saat ini sudah berada di bawah Kementerian Keuangan, hanya dalam masa transisi untuk tahun 2020 BLU ini masih tetap dibiayai oleh APBN dan saat ini sedang dalam proses penyesuaian oleh dari Tupoksi, kemudian organisasi.

Dan beberapa kegiatan teknis dan BLU sama sekali tidak ada perubahan di dalam Tusinya dan bahkan ada satu direktur yang khusus menguatkan posisi BLU ini dan sekarang ini sedang dalam proses evaluasi yang sudah berjalan selama ini dan semua yang sudah dikomitmenkan, baik yang sudah bergulir maupun yang masih dalam proses ini tetap berjalan. Sehingga dengan demikian, terkait dengan penggunaan dana reboisasi yang selama ini dibiayai dari perintah Undang-Undang justru dengan BPD LH ini akan menjamin posisi BLU. Tidak harus dari DR tetapi memang dijamin dari BPD LH dan masyarakat tentunya akan semakin mudah difasilitasi oleh BLU karena pendanaannya justru sudah lebih tersedia dan dibawah langsung Kementerian Keuangan, sehingga kami saat ini sedang menata kembali bagaimana masa transisi selama 6 bulan ini agar tidak terjadi hal-hal yang

tidak diinginkan dan hanya menyesuaikan saja dengan Tusi dari perintah Peraturan Pemerintah untuk BLU. Dan BLU disini menjadi BPD LH itu bukan hanya soal masyarakat tapi justru bagaimana upaya pemulihan lingkungan hidup termasuk dampak dari pencemaran dan sebagainya ini nantinya bisa diharapkan ada komitmen dari dunia internasional untuk satu pintu melalui satu badan. Dan ini yang menjadi kekuatan kami Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk menggerakkan kembali kelembagaan KLHK karena pada prinsipnya secara keuangan itu di keuangan, secara teknis ada di Kementerian LHK. Dan berarti seluruh Tusi KLHK, baik program-program teknis yang ada di Dirjen-Dirjen yang boleh saya sebut Dirjen KSDAE, Dirjen PPKL, Dirjen PDASHL, Dirjen PSLB3, dan Dirjen-Dirjen yang memang menata kelola lingkungan hidup dengan niat yang besar untuk membangun kembali bagaimana LH ini dan Kehutanan ini *insya Allah* akan dijadikan kekuatan besar untuk kepercayaan dunia internasional bahwa hibah luar negeri akan menjadi satu pintu dan mampu membiayai seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di KLHK, tentunya termasuk di kementerian lain.

Jadi BPD LH ini Pak Ichsan, itu bukan miliknya KLHK tetapi Kementerian yang terkait dengan sektor-sektor yang dalam pembangunannya berdampak kepada kerusakan lingkungan, pencemaran dan juga termasuk yang lain-lain ini kita harapkan kedepan akan menggunakan dana yang besar ini mendukung APBN yang sekarang ini memang kita masih kecil. Itu yang menjadi point besar dari pertanyaan Bapak Ichsan dan nanti teman-teman dari Eseon I bisa membantu khususnya PDASHL dan Gakkum. Dan ini sudah disiapkan tentunya oleh teman-teman Eselon I.

Kemudian yang menyangkut data-data Pimpinan, mohon ijin Bapak dan Ibu yang saya hormati. Di awal kami sudah katakan bahwa itu sudah ditarik dan tidak perlu lagi ditanyakan. Dan kami bertanggungjawab penuh terhadap data-data itu dan justru dengan Rapat Dengar Pendapat ini sekali lagi banyak sekali masukan-masukan yang sudah kami catat. Dan justru dari Bapak Ibnu yang menguatkan kami disini di dalam menata kembali tata kelola yang disampaikan oleh Bapak Darori tadi, bahwa kedepan akan lebih baik lagi. Sebenarnya kami sudah punya program Pimpinan, bagaimana memahami aspirasi bukan hanya disini tetapi juga aspirasi yang besar justru mappingnya sekarang berbeda dengan pola kerja yang lalu. Jadi dengan satu Komisi disini, semua program yang kami paparkan tadi ada 9 Dirjen, 1 Badan, itu kami sudah ada mappingnya dan bahkan ketika memang ada masukan dari yang terhormat terhadap informasi kerusakan pencemaran dan sebagainya itu biasanya menjadi sasaran strategis kami ketika data-data dilapangan yang kami rencanakan diluar itu, apalagi yang berada di Komisi IV DPR RI. Jadi mohon maaf sekali lagi untuk Dirjen KSDAE yang tadi bahannya sudah beredar dan itu kami tarik kembali karena sudah kami siapkan secara terpadu, terintegrasi bahwa tidak hanya satu daerah hanya satu kegiatan tapi arahan Pimpinan kami ingin tidak hanya sekali satu program misalnya KSDAE tapi justru semua program harus berada terintegrasi di dalam satu Dapil. Dan lagi juga tidak hanya Dapil tadi bahkan Kabupaten dan Provinsi yang memang menjadi perhatian publik.

Jadi sekali lagi kami mohon diberikan kesempatan untuk nanti pada Rapat Dengar Pendapat bahkan Rapat Kerja dengan Menteri kami akan siapkan secara utuh tidak lagi special dan mohon maaf kami tarik dan itu sekali lagi bukan konsumsi yang harus diketahui. Dan kami sekali lagi mohon maaf Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Kemudian yang terkait dengan Sekjen juga ini yang Bapak Made Urip tanyakan, kami juga harus sampaikan terkait dengan isu strategis WWF. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya dalam forum yang terhormat ini sebagaimana yang Bapak Sudin sampaikan, bahwa nanti dalam Rapat Kerja Ibu Menteri akan menjelaskan secara detail bagaimana akhir dari kerja sama ini. Sebagai catatan tentunya kita hanya ingin mendorong *governing procedur* yang dalam hal ini kita mengedepankan tertib administrasi, tertib hukum dan tertib teknis. Secara makro kalau boleh saya sampaikan, bahwa sejak tahun 1998 memang sudah ada perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Dirjen bersama Pimpinan Yayasan WWF dan itulah yang menjadi catatan untuk evaluasi kami dan di dalam keputusan SK32 juga disebutkan dalam menimbang. Dan evaluasi ini memang tidak hanya untuk satu lembaga, tapi hampir seluruh lembaga yang sejak 5 tahun ini kami lakukan. Dan dalam setiap perjanjian kerja sama itu disebutkan 5 tahun sekali dievaluasi. Dan ini yang kami pakai untuk seluruh kerja sama internasional.

Dan memang yang paling duluan kita lakukan terhadap yayasan WWF, karena umurnya yang sudah paling lama sekali. Dan ini menjadi bagian penting untuk kami semua dengan di Pimpinan oleh Ibu Menteri dan teman-teman unit kerja Eselon I yang kita tahu juga bahwa kerja sama ini memang lebih banyak kepada program KSDAE, yaitu konservasi. Kalau dilihat dari SK yang sudah kita keluarkan sebenarnya kami ingin maju untuk melakukan langkah-langkah pasca keputusan ini. Dan kalau ditanyakan kenapa ada akhir dari kerja sama, sebenarnya di amar kedua sudah jelas sekali di dalam SK ini bahwa itulah yang sedang kita soroti bagaimana sebuah perjanjian kerja sama yang sudah tidak lagi scoop-nya seperti di tahun 1998 dan sekarang ini sudah ada regulasi yang menjelaskan tentang posisi kawasan konservasi inilah yang menjadi salah satu dasar bahwa terjadinya perluasan, terjadinya pengembangan, terjadinya lebih dari itu, itu tidak boleh terjadi. Dan ini justru yang menjadi bagian penting dari kami ketika memang kegiatan-kegiatan eksisting dilapangan....

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Saya hanya ingin memastikan Pak, jadi kalimat Bapak tadi saya coba cerna. Jadi yang benar kaitannya dengan WWF ini dievaluasi atau distop?

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Sebentar Ibu, saya belum selesai karena tidak bisa sepotong ijin Pimpinan. Di menimbang itu jelas hasil evaluasi dan hasil evaluasi berakhir dengan produk hukum akhir kerja sama. Evaluasi tidak hanya dilakukan hanya untuk WWF tapi seluruh kerja sama internasional selama 5 tahun ini. Kalau boleh saya sebut akan panjang, mungkin ada 50-an kerja sama internasional. Ketika kami menjaga kembali Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan juga PPTP dan Permen yang sudah dikeluarkan. Kita memang di depan ini harus yang didahulukan WWF, dan memang evaluasinya saya rasa sudah 20 tahun, 21 tahun, dan bahkan 22 tahun banyak kegiatan-kegiatan yang sudah melebihi dari *scoop* kerja sama dan itu yang kita lihat dilapangan kalau tidak segera dilakukan secara totalitas dan tidak membedakan dimana pun dan sementara Ditjen KSDAE mempunyai armada UPT yang harus kami koordinasikan secara utuh untuk melihat prinsip kerja sama luar negeri dalam kawasan konservasi akhir kerja sama ini melahirkan bagaimana tata kelola kawasan konservasi termasuk keanekaragaman hayati, yang jelas yayasan WWF lebih banyak kepada keanekaragaman hayati.

Kalau kita lihat perjalanan panjang bagaimana KLHK selama 5 tahun ini mewujudkan bagaimana Pemerintah hadir untuk dapat menjaga kawasan konservasi termasuk 26 juta ini kami memang harus menjadikan sesuatu hukum yang harus dikelola dengan cara-cara prinsip konservasi sesuai sekali lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ketika akhir kerja sama ini dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini untuk demi penguatan kelembagaan kawasan konservasi yang kami juga sudah miliki di seluruh Indonesia dan juga selain taman nasional kita juga sudah memiliki yang namanya kesatuan pengelolaan hutan konservasi non taman nasional. Itu yang sekarang sedang kita kuatkan bagaimana mengembalikan tata kelola kawasan konservasi memenuhi prinsip Undang-Undang, sehingga semuanya itu satu kesatuan tidak lagi ada di lapangan yang terjadi ada yang belum masuk *scoop* kerja sama 98. Dan bahkan ada juga yang dilakukan tanpa adanya hukum yang berlaku, tapi itu semua harus kami kemas sehingga yang paling penting sekarang ini kami lakukan langkah Bapak Pimpinan terhadap pertanyaan termasuk Bapak Made, apa yang harus kita lakukan.

Sebenarnya sejak 2019 awal kita sudah siapkan bagaimana mekanisme ini. Dan yang pasti sekarang kami sedang menyiapkan langkah-langkah termasuk bagaimana seluruh kerja sama yang ada di kawasan konservasi ini dilihat kembali, di catat kembali dan jangan sampai ada yang lepas dari evaluasi kita yang selama ini belum dilakukan. Jadi sejarah yang selama ini sudah kita lakukan kita juga punya tahapan-tahapan itu yang pasti dalam keputusan SK 32 ini ada ketiga belas, kedua belas dan ketiga belas inilah yang menjadi langkah-langkah kami dan bagaimana sebuah akhir itu juga tetap harus dilakukan evaluasi dan audit. Sehingga berikanlah kesempatan kami untuk segera melakukan langkah-langkah khususnya masa transisi selama 6 bulan dan bahkan disini disebutkan sampai April 2020 kita

semua sudah harus melakukan di KLHK sendiri bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada dilapangan.

Informasi soal keanekaragaman hayati, kita juga akan menguatkan kembali bagaimana taman nasional-taman nasional yang sudah umurnya lama sekali dengan resort-resort yang ada kita harapkan nantinya akan menjadi catatan bagaimana posisi KLHK untuk dalam kesempatan ini kami ingin ada peningkatan lebih lagi anggaran, karena selama ini masih destinasi wisata tapi dua hal besar bagaimana kawasan konservasi ini harus kuat dan termasuk keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia tetap menjadi satu bagian yang kokoh untuk kita kelola kembali dengan *reader* Kementerian LHK. Dan kalau memang diperlukan kerja sama dalam kaitannya dengan hal-hal tersebut itu tentunya peraturan perundangan kita juga mengatur itu Pimpinan dan bahkan boleh saya sampaikan pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah kita sekarang juga kita sedang kuasai untuk disempurnakan termasuk Permen-permen yang sebenarnya sudah ada, yaitu Permen Nomor 44 tentang bagaimana kerja sama yang baik itu.

Jadi sekali lagi secara makro dalam kaitan ini ijinakan Kementerian LHK menata saat ini untuk langkah-langkah kedepan karena yang pasti seluruh Indonesia kami harus evaluasi untuk aset-aset, hibah-hibah yang masih dalam catatan kita dan itu memerlukan audit supaya suatu saat nanti kerja sama yang di tempat lain tidak terjadi seperti ini. Jadi mohon maaf, kalau SK 32 ini yang sudah diberlakukan sejak 5 Oktober itu sebenarnya masa transisi sampai 31 Desember kita sudah infokan dan masa sekarang sekalipun itu berlaku ditetapkan tanggal 10 tapi sebenarnya proses ini sudah berjalan. Jadi sekali lagi dalam Rapat Dengar Pendapat ini apa yang kami jelaskan tadi justru kami mohon dukungan kepada Pimpinan, ketika kami sekarang ingin menata kelola kembali seluruh kawasan yang menjadi sumber dari segala sumber kehidupan, amanah konstitusi kami ingin hadir untuk mengelola. Dan untuk kedepan harus ditata kelola ulang karena tertib administrasi, tertib hukum, tertib teknis tidak bisa sampai nanti baru dibiarkan. Jadi SK ini menjadi kekuatan kita semua dan sekarang sedang berjalan tahapan-tahapan itu termasuk bagaimana menjamin 2020 ini ketika kita harus menata seluruh lembaga kita khususnya UPT yang mengelola kawasan konservasi termasuk TSL-TSL yang menjadi prioritas.

Satu lagi Pimpinan, kita 5 tahun ini bersyukur pengelolaan TN atau kawasan-kawasan konservasi dengan prioritas nasional justru PNPB kita meningkat drastis dari taman nasional dan kawasan konservasi. Sehingga dengan demikian harapannya nanti justru penguatan kawasan dan bagaimana tata kelola keanekaragaman hayati khususnya TSL justru bisa kita peroleh dari nilai yang kita miliki. Jadi disinilah makna kerja sama dan mohon maaf kalau tidak terlalu rinci nanti Ibu Menteri akan sampaikan secara rinci dalam Rapat Kerja dan yang pasti dari pertanyaan Bapak dan Ibu kami sekarang sedang melakukan langkah-langkah pasca SK 32 untuk bisa menjamin eksistensi dilapangan semuanya tetap berada dalam hukum yang ada di negara ini.

KETUA RAPAT:

Bapak Sekjen, mungkin pertanyaannya apakah sama WWF ini diputus di tengah jalan atau memang masa kerja samanya sudah habis tidak diperpanjang.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Ini akhir Pak, berarti berakhir.

KETUA RAPAT:

Oh, ini berarti berarti tidak diperpanjang lagi.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Iya.

KETUA RAPAT:

Harus jelas jawabnya.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Loh, kan tadi Bapak tanyanya kan kenapa ada SK, itu jawabannya. Kalau dilihat dari SK ini jelas berakhir Pak, yayasan itu dengan tahun 98 berakhir.

KETUA RAPAT:

Berarti sudah berakhir tidak diperpanjang, di karenakan nanti penjelasan lebih detailnya disampaikan pada Rapat Kerja.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Bapak Ketua, boleh bertanya.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Pak Sekjen, tadi yang dipaparkan bahwa penerimaan PNPB tadi sudah dianggap cukup lumayan berarti ada peningkatan apresiasi.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Boleh ditambah Ibu, PNPB sektor LHK ini justru meningkat jauh dibandingkan dengan rencana. Di 2018 kita sudah sampai menyentuh hampir 5,3 triliun dan 2019 juga sama.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Pertanyaan gini Pak Sekjen, ya luar biasa ya apresiasi. Pertanyaan saya sebanding tidak dengan dampak-dampak yang terjadi saat ini, baik itu bencana, kebakaran hutany disebabkan oleh pihak-pihak lain korporasi. Menurut Bapak Sekjen seperti apa.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Belum sebanding, kita hanya 5 triliun kemudian kita hanya terima 9 triliun itupun dikurangi dari gaji operasional, jadi impas. Sekarang 4,9 itu prioritas nasional, prioritas bidang dan kita terima sekarang rata-rata 5 triliun itupun sudah peningkatan dari Ditjen PKTL khususnya tambang. Dari 6 tahun yang lalu yang hanya 400 miliar sekarang sudah hampir 1 koma dan bahkan 2 triliun 2019 ini. Itulah dampak dari kita hadir untuk mengevaluasi perijinan. Itu Pimpinan dari Sekjen, untuk yang lainnya mungkin secara cepat Pak Dirjen....

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Ketua, boleh sedikit saya mau tanya.

KETUA RAPAT:

Oh, boleh Pak Ichsan.

F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Sedikit saja.

Pak Sekjen, terkait dengan Badan Pengolahan Dana Lingkungan Hidup inikan BLU. Artinya, sesungguhnya inikan berasal dari salah satu sumbernya kan dari hibah dan lain sebagainya kedepan. Saya sebenarnya mau minta tolong ini dan kita berharap di Komisi IV DPR RI ini juga mendapatkan laporan terkait dengan BLU. Karena ini bagaimanapun tetap adalah kewenangan dari inikan sumber penerimaan negara juga sebenarnya. Hibah itukan salah satu menurut saya APBN itu adalah dari salah satu sumber penerimaan negara. Nah, artinya begini kita ingin agar BLU ini betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Jadi saya minta tolong sama Bapak Sekjen agar BLU ini juga diberikan sosialisasi secara massif kepada masyarakat terutama kepada kita, karena bagaimana pun ini pemafaatannya kan menarik sebenarnya. Saya mendapat kabar bahwa BLU ini bisa

digunakan untuk pengelolaan kawasan konservasi terutama di zona pemanfaatan. Nah, artinya banyak sekali masyarakat yang tidak tahu. Saya ingat sekali Ibu Menteri pernah menyampaikan bahwa untuk pengelolaan kawasan konservasi terutama di zona pemanfaatan itu, itu akan mengutamakan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Nah, kalau kemudian ini ada BLU inikan masyarakat bisa juga menerima manfaat. Apalagi kemudian Bapak Sekjen mengatakan tadi PNBP dari sektor LHK itu meningkat drastis. Nah, hal yang seperti itu kemudian memberikan dampak bagi publik.

Nah, yang kedua secara logika saya mengatakan bahwa kalau PNBP LHK naik semestinya anggaran APBN juga naik, karena bagaimana pun Kementerian LHK ini, ini memberikan kontribusi buat negara. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan misalnya 5 tahun yang lalu ini agak susah juga saya PNBP-nya turun tapi APBN-nya naik. Tapi kalau kemudian di LHK PNBP-nya naik, anggaran LHK-nya tetap stagnan. Secara logic bagi saya itu tidak logis di mata saya, tidak simetris lah kira-kira gitu. Artinya, ada sesuatu yang salah ini kenapa kemudian anggaran LHK setiap tahun itu stagnan sedangkan PNBP-nya naik terus, bahkan tadi Bapak Sekjen mengatakan kenaikannya cukup signifikan.

Nah, ini harus menjadi catatan bagi kita bahwa sebenarnya di Komisi IV DPR RI ini yang memberikan kontribusi besar terhadap PNBP itu adalah sektor dalam hal ini Kementerian LHK. Nah, ini harus menjadi catatan Bapak Sekjen. Tolong sampaikan kepada Ibu Menteri, kok anggaran setiap saya lihat setiap tahun ini 6 triliun terus, 6,3 tidak pernah naik-naik tapi PNBP-nya naik terus. Logika saya tidak nyambung begitu, begitu maksud saya.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya, Bapak Ichsan jangan hanya ngomong saja. Melalui Fraksi Golkar diusulkan supaya naik, kalau Bapak Ichsan ngomong saja disini tapi tidak ada langkah konkrit ya tidak ada gunanya.

Ya, siapa yang mau menjawab duluan, singkat tapi nanti tolong dibuat jawaban tertulis juga seperti pesan saya tadi.

Silakan.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Terima kasih Pimpinan.

Terima kasih Bapak Ichsan, ini menjadi kekuatan untuk 2020 karena kita juga akan semakin meningkat lagi dan mohon dukungan untuk penambahan alokasi anggaran di hampir semua program berbasis masyarakat. Ijin Pimpinan, kalau nanti tertulisnya akan disiapkan tentunya

beberapa Dirjen akan merespon dari beberapa pertanyaan yang sama dan saya persilakan untuk yang pertama melanjutkan saya yang sudah menjelaskan tentang konservasi ini Bapak Dirjen KSDAE, singkat-singkat saja karena waktu. Nanti dilanjutkan dengan Dirjen yang terkait dengan waktu yang singkat juga.

**DIRJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM KLHK
(Ir. WIRATNO, M.Sc.):**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Satu, terkait dengan 900 desa akan kami siapkan datanya dan kami sudah menyiapkan data sebaran 6000 desa di 27,4 juta kawasan konservasi yang ada data desa, kecamatan dan kabupaten. Kami akan siapkan untuk para Anggota Dewan.

Yang kedua, yang terkait dengan TN Komodo Bapak. Terima kasih, TN Komodo direncanakan kondisinya sekarang itu turisnya 173 ribu orang pada tahun 2018, 173 ribu dari hampir 113 negara. Jadi sangat banyak sekali pengunjungnya dan dengan PNBP Rp30 miliar tahun 2019, sekitar Rp30 miliar. Kemudian total PNBP dari wisata alam itu Rp165 miliar.

Terkait dengan investasi dan konservasi kami sampaikan pada saat ini di TN Komodo memang ada zona, di taman nasional ada sistem zonasi, zona pemanfaatan itu bisa dijadikan untuk pengembangan wisata alam. Ada dua pengembangan wisata alam yang berbasis masyarakat dan pengembangan wisata alam yang berbasis pihak swasta. Di Pulau Padar dan Rinca sudah ada perijinan namun belum beroperasi Bapak. Kemudian berkembang lagi tentang....

KETUA RAPAT:

Bapak Dirjen, sudah berapa lama perijinannya dikeluarkan.

**DIRJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM KLHK
(Ir. WIRATNO, M.Sc.):**

Perijinannya sudah sejak 2015 Bapak.

KETUA RAPAT:

Kalau sudah 2015 dicabut saja Pak, karena kan ada peraturan yang mengatakan harus ada laporan per triwulan. Kalau sudah tidak 2015 dicabut saja, berarti investor tersebut mohon maaf ini, mohon maaf saya katakan mencari ijin kemudian mencari investor. Kalau begitu dicabut saja Pak, kita Komisi IV DPR RI merekomendasikan termasuk yang lain juga karena saya dengar banyak sekali Pak. Mohon maaf ada juga mantan-mantan yang bermain begitu ada. harapan saya tidak usah Pak, cari investor yang serius punya duit gak kamu, kalau punya duit ayo kerja sama kalau tidak ya jangan

Pak. Jangan kantornya hanya sepetak tapi alamatnya Gedung ini, Jalan MH Thamrin, tidak tahunya cuma 30 meter persegi. Ini banyak Pak.

**DIRJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM KLHK
(Ir. WIRATNO, M.Sc.):**

Baik, yang pada sudah peringatan kedua Pak, jadi semua akan kita evaluasi. Saat ini sedang dievaluasi, ada peringatan satu, dua, ada yang sudah dicabut.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Pak Ketua, interupsi.

Pak, pertanyaan saya itu dasar ilmiahnya dari mana sehingga kawasan konservasi di 3 pulau boleh ada ijin investasi. Itu pertanyaan saya, karena saya katakan tadi areal di kawasan konservasi ini yang tinggal disitu Komodo. Komodo ini bukan makhluk biasa, ini binatang purbakala, apakah sudah dilakukan study secara serius soal ini. Jadi bukan sekedar alasan orang sudah investasi, investasi itu tidak segera dijalankan, *not*, tetapi ada persoalan yang lebih prinsipil dari itu yang saya ingin tahu kenapa boleh investasi di kawasan konservasi itu. Saya tadi katakan taman nasional itu paradigma dasar saya itu adalah *nature*, sementara di darat itu *culture*. Nah, yang saya ingin tahu ini kenapa itu boleh Pak.

Yang kedua, pendekatan yang digunakan oleh KLHK terkesan sangat sentralistik, tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi publik dalam proses diskusi terkait dengan hal ini. Karena itu, masih ada penolakan sampai hari ini Pak, masih ada penolakan Pak, sampai detik ini saya sampaikan saya bicarakan.

Yang berikut, di darat saya singgung tambahan ada hutan yang namanya Bowosi, seluas 400 hektar. Itu hutan sebagai penyangga ekosistem Kota Laboan Bajo itu dialih fungsikan ke Badan Otoritas Pariwisata untuk dikembangkan bukan eko wisata, mau dibuat pariwisata buatan manusia. Apakah ini juga sudah dikaji, sudah dipikirkan alih fungsi lahan ini. Mengingat hari ini Kota Laboan Bajo saja bicara air bersih saja susah minta ampun Pak. Nah, inikan ada problem, oke kita orientasinya provit, tadi di sebut 25 miliar. Saya mau tanya lagi, orang NTT lebih khusus Manggarai Barat dapat apa. Setiap hari perairan Komodo itu satu kapal Pinishi yang namanya hotel terapung mereka berlayar disitu puluhan juta, bahkan kalau satu minggu bisa ratusan juta. Berapa penerimaan yang didapat oleh Kabupaten Manggarai Barat. Mohon maaf ini, jangan sampai justru desentralisasi dan otonomi daerah ini sama sekali tidak ada dampak buat daerah Pak. Dan kemiskinan di Manggarai Barat terus tetap ada.

Nah, karena itu terus terang selama ini Bapak belum bisa menjelaskan dan diterima akal sehat saya soal kajian kenapa harus ada investasi di lahan konservasi saya akan tetap pada posisi seperti ini Pak. Saya ingin mendapatkan itu Pak, jadi ini beda Pak. Kita pergi ke Gili Terawangan disana

tidak ada Komodo, boleh saja pulau disitu. Ada Gili Air boleh saja dibuat bule datang, mereka buat hotel disitu, bangun segala macam itu yes. Tetapi di Rinca dan Komodo itu habitat tempat hidup Komodo. Sudah ada belum disitu kajian, saya ingin tahu soal itu Pak, kira-kira kalau manusia banyak sekali yang hadir sampai ratusan ribu disitu, dibangun hotel, dibangun resort yang banyak, kira-kira mengganggu atau tidak, saya ingin tahu itu Pak. Nah, itu yang tidak dijawab oleh Bapak-bapak sekalian.

KETUA RAPAT:

Cukup, tolong Bapak Dirjen dijawab supaya nanti malam Ansy Lema tidurnya nyenyak.

**DIRJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM KLHK
(Ir. WIRATNO, M.Sc.):**

Siap Bapak Ansy.

Oleh karena itu, Bapak Gubernur bersama Kementerian LHK mencanangkan wisata premium. Jadi nanti di Pulau Komodo tidak boleh lagi wisata yang biasa, wisata khusus yang dibatasi pengunjungnya. Perlu kami sampaikan di Komodo ada 40 lembah yang ada Komodonya dan di Loh Liang adalah hanya salah satu lembah yang

KETUA RAPAT:

Tidak, saya agak kurang mengerti apa yang dimaksud premium dan tidak biasa pengunjungnya.

**DIRJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM KLHK
(Ir. WIRATNO, M.Sc.):**

Baik Bapak, boleh Bapak Sekjen kami sampaikan wisata premium ini?

KETUA RAPAT:

Harus disampaikan di forum ini.

**DIRJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM KLHK
(Ir. WIRATNO, M.Sc.):**

Baik, ini masih dalam kajian Bapak, nanti kami sampaikan juga. Pada intinya dibatasi pengunjung tidak seperti saat ini Bapak Sudin, yang wisata premium. Nanti wisata premium itu masih dalam wacana itu wisata yang khusus bisa melihat Komodo yang di alam liar bukan Komodo yang hanya sekedar melihat di jalan trailnya. Kemudian juga pengunjung, keselamatan pengunjung juga ketika perairan kita snorkeling diving itu juga akan dijamin keselamatan, kenyamanannya. Jadi wisata khusus yang intinya pengunjungnya dibatasi Bapak.

KETUA RAPAT:

Jadi dengan istilah kata lain kalau ente miskin jangan ke Komodo. Jadi premium saja yang punya duit yang boleh ke Komodo, kalau yang miskin melihat cicak di dinding saja, taman mini ya bolehlah.

Begini loh, saya paham Pak, saya bukan tidak paham, arahnya kemana-kemana saya sangat paham. Tapi tadi yang punya Dapil mengatakan kalau Bapak tidak bisa menjawab hari ini nanti waktu Rapat Kerja tolong dijawab secara jelas. Apa kajian ilmiahnya dan lain-lainnya, begitu Bapak Hansi Lema.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Betul Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Jadi nanti diberikan jawaban, saya paham Pak, kenapa jadi wisata premium, apa-apa saya paham. Bagaimana pun kita orang Indonesia harus punya jiwa nasionalisme. Jangan Cuma di mulut saja nasionalismenya, tapi giliran impor sampah plastik ya pada diam.

Lanjut siapa lagi Bapak Sekjen yang akan menjawab.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Berikutnya Ibu Vivin yang lumayan banyak hari ini sampah.

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK (ROSA VIVIEN RATNAWATI, S.H., M.Sc.):

Terima kasih Bapak Sekjen.

Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Secara detail akan kami jawab tertulis, akan tetapi ada satu hal besar, dua hal besar yang akan kami sampaikan yaitu tentang pengelolaan sampah. Kalau yang tadi yang terhormat Bapak Hansi Lema tanya *road map*, itu sekaligus kami jawab untuk Bapak, Ibu yang lain. Dan yang kedua, yang terkait dengan bagaimana penanganan sampah impor.

Yang pertama, tentang pengelolaan sampah. Terima kasih banyak masukan terkait dengan bagaimana pengelolaan sampah di Indonesia. Memang di Indonesia itu satu tahun menghasilkan 65,8 juta ton sampah dari masyarakat Indonesia dengan hitungan satu orang menghasilkan 0,7 kilo gram per hari per orang. Kalau di kota kecil kurang leih 0,4-0,5 per hari per orang. Dan untuk mengatasi persoalan tersebut maka memang single respon

itu tidak bisa dilakukan, sehingga saat ini *policy* yang dibangun oleh Pemerintah Indonesia pendekatannya ada 3. Yang pertama adalah kita menggunakan pendekatan *last west*, artinya mengurangi sampah untuk dibuang ke TPA. Kami memberikan apresiasi kepada Komisi IV DPR RI karena sudah tidak pakai botol plastik dan sebagainya, ini yang namanya *last west*. Ada 28 daerah sekarang mengeluarkan peraturan untuk mengurangi sampah plastik kreseknya yang dikurangi, kantong kresek tidak digunakan lagi di retail modern dan pasar modern, itu yang pertama adalah *last west*, penggunaan tumbler dan saya menghargai Bapak Sudin pakai tumbler merah, terima kasih Pak, itu sudah mengurangi Pak. Itu yang pertama *last west*.

Yang kedua, pendekatannya adalah *circuler ekonomi*. Jadi sampah itu tidak dibuang ke TPA tapi digunakan kembali, didaur ulang. Dan itulah yang terjadi sebetulnya pada kasus sampah impor kita. Indonesia membutuhkan 6 juta *recycle paper* setahun dan ternyata dalam negeri itu hanya bisa memasok 3 juta per tahun, sehingga 3 jutanya di ambil dari impor Pak. Oleh karena itu, kami mohon Bapak dan Ibu Komisi IV DPR RI bisa mendorong konstituennya di daerah untuk bagaimana kita mengelola sampah dan mereka akan mendapatkan manfaat ekonomi. Tadi yang seperti sudah disampaikan oleh ba dan Ibu sekalian, dan kami siap.

KETUA RAPAT:

Ibu Vivin, satu hal jadi kita masih membutuhkan impor kertas 3 juta ton kertas. Itu pengawasannya bagaimana di dalam container, sementara apa masih percaya sama Sucopindo. Karena Sucopindo ini secara jujur milik BUMN tetapi kan monopoli, tidak ada yang transparan. Maka nanti juga kita akan rapat gabungan, mungkin waktunya agak lama dulu karena kita membahas anggaran minggu depan, minggu depannya lagi setekah itu baru kita panggil.

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK (ROSA VIVIEN RATNAWATI, S.H., M.Sc.):

Siap, terima kasih.

Jadi Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian itu kuncinya Pak, karena mereka yang membuat *policy* dan untuk yang surveyor itu ada di Kementerian Perdagangan. Dan saat ini sudah diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2019 memperbaiki bagaimana mekanisme importasi scrap plastik, scrap kertas dari luar negeri ke dalam negeri termasuk bagaimana memilih surveyor dan bagaimana mengeceknya. Nah, mungkin nanti kalau bisa rapat bareng itu bagus sekali, untuk kita bisa minta penjelasan kepada sektor-sektor tersebut.

Dan yang ketiga, pendekatan dalam pengelolaan sampah itu adalah dengan teknologi. Jadi kalau Bapak dan Ibu, tadi sebut Singapura, Singapura itu adalah negara kecil, sehingga dia sampahnya selesai dengan insinirator yang insiniratornya dijadikan listrik. Tadi Bapak Sudin juga sampaikan tadi bahwa ada persoalan, masih ada persoalan di Indonesia tentang jual beli

listriaknya. Dan untuk ini Bapak Presiden sudah menunjuk 12 kota untuk didirikan pembangkit listrik tenaga sampah termasuk di DKI Jakarta, Provinsi Bali dan lain-lain untuk kemudian menghabiskan sampah-sampah yang ada di kota-kota besar. Dan yang lain misalnya dengan teknologi bagaimana *landfield* atau TPA-nya itu sanitari *landfield* misalnya. Dan tadi saya mau jawab Sari Mukti tapi Bapak Yadi sudah tidak ada, jadi nanti tertulis saja.

KETUA RAPAT:

Kalau Bapak Yadi datang dan pulang tanpa pamit.

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK (ROSA VIVIEN RATNAWATI, S.H., M.Sc.):

Dan yang lain tentang sampah impor, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa sedang diperbaiki bagaimana mekanismenya dan juga peraturan Menteri-nya, terutama peraturan Menteri Perdagangan. Dan yang lain adalah tadi ada pertanyaan tentang Merkuri, kemudian ada Pestisida, memang kalau untuk Merkuri dan Pestisida itu masuk di dalam tugas-tugas kami terkait dengan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Untuk merkuri sudah dikeluarkan Peraturan Presiden Bapak dan Ibu sekalian untuk rencana aksi nasional pengurangan dan penghapusan merkuri. Ada 4 jenis yang akan dihapus, yaitu yang pertama manufaktur jadi kalau misalnya lampu dan sebagainya itu jangan ada yang pakai merkuri. Kemudian yang kedua, kesehatan, alat-alat kesehatan tahun ini terakhir harus ditarik, seperti thermometer, tensimeter dan amalgam gigi dan kemudian energi dan terakhir penambangan emas skala kecil yang ada di daerah-daerah itu sudah dilarang memakai merkuri untuk tambang emasnya.

Demikian Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu sekalian, nanti kami akan sampaikan secara tertulis pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian.

Terimakasih.

KETUA RAPAT:

Ibu Dirjen, kalau kita bicara masalah tadi pengurangan penggunaan plastik. Kemarin Ibu ke Madrid tidak?

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KLHK (ROSA VIVIEN RATNAWATI, S.H., M.Sc.):

Tidak.

KETUA RAPAT:

Yang ke Madrid siapa di sini, siapa yang pergi ke Madrid?

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Kepala PPI sama....

KETUA RAPAT:

Kalau belanja pakai kantong plastik tidak? Masih kan.

Nah, di Madrid sendiri mengadakan COP tapi masih menggunakan kantong plastik. Ini yang tidak masuk akal kadang-kadang, sementara mereka complain ke kita masalah penggunaan plastik. Ini loh Bapak Dirjen Gakkum, apabila yang masih sengketa 1.070 kontainer ini, tidak bisa di-reekspor atau yang dilakukan oleh LHK. Supaya jelas, apa nanti kita masukkan penjara pemiliknya atau bagaimana, supaya jelas jawabannya.

DIRJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KLHK (Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com., MPM.):

Terima kasih Bapak Sudin.

Tadi disampaikan mekanisme reeksportir itu ada dua, B to B (*business to business*) atau menggunakan mekanisme G to G, yaitu convention Basel. Jadi di dalam kondisi Basel di situ pergerakan limbah itu harus persetujuan dari negara kita. Jadi ini bisa kita lihat kesana, saya tahu di tempat sudah dilakukan dengan Slovenia. Itu bisa dilakukan itu, tapi kalau ini menjadi tidak bisa kita lakukan dengan menggunakan 2 mekanisme ini ya penegakan hukum harus kita lakukan. konsekuensinya adalah penegakan hukum pidana, seperti yang kami lakukan terkait dengan dua warga negara Singapura tadi. Di mana dua warga negara Singapura itu beda case-nya, case-nya di sana mereka tanpa ijin masuk. Jadi tidak ada ijin sama sekali, kalau disinkan

KETUA RAPAT:

Tapi tanpa ijin sudah keluar toh?

DIRJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KLHK (Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com., MPM.):

Ya keluar dia ini, kami dapat laporan dari Bea Cukai kami masuk.

KETUA RAPAT:

Tidak, sudah keluar dari kawasan berikat kan?

DIRJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KLHK (Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com., MPM.):

Di kawasan berikat.

KETUA RAPAT:

Yang 62?

**DIRJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KLHK (Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com., MPM.):**

63 di Priok di kawasan berikat, di sana kawasan berikat juga yang di Tangerang.

KETUA RAPAT:

Berapa banyak yang di Tangerang?

**DIRJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KLHK (Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com., MPM.):**

24.

KETUA RAPAT:

Coba nanti kita sidak yang ke 24 deh.

**DIRJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KLHK (Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com., MPM.):**

Tapi 24 sudah dibuka di containernya.

KETUA RAPAT:

Sudah dibuka?

**DIRJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KLHK (Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com., MPM.):**

Sudah dibuka.

KETUA RAPAT:

Apakah boleh?

**DIRJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KLHK (Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com., MPM.):**

Nah, itu dari Bea Cukainya Pak.

KETUA RAPAT:

Ya nanti Bea Cukainya kita panggil kesini, karena saya dapat infonya beda lagi ini, nanti saya jelaskan.

**DIRJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KLHK (Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com., MPM.):**

Mohon ijin Pak, jadi kalau yang 24 itu saya datang langsung kelapangan pengecekan itu ya memang sudah dibuka dan ditempatkan diluar juga. Nah, ini yang kami lakukan. Sekarang bagaimana konsekuensinya, kita selaku penegakan hukum nanti tentu harus dimusnahkan barang buktinya.

KETUA RAPAT:

Biaya pemusnahannya?

**DIRJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KLHK (Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com., MPM.):**

Ini yang harus kita masukkan di dalam tuntutan nanti.

KETUA RAPAT:

Oke, tidak saya pikir tadi Bapak Dirjen ngomong dimusnahkan pabriknya gitu, ternyata yang tertangkapnya tadi.

Oke, terima kasih.

Selanjutnya siapa Bapak Sekjen.

**SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir.
BAMBANG HENDROYONO):**

Dirjen PDASHL, banjir dan tanah longsor.

**Pjt. DIRJEN PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN
LINDUNG KLHK (Ir. HUDOYO, M.M.):**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI.

Ijinkan kami menyampaikan beberapa klarifikasi tentang kegiatan yang telah dilakukan oleh Ditjen PDASHL. Bapak Ichsan, jadi KLHK telah berbuat banyak di Suka Jaya, ada rencana operasi disana yang sampai dengan pasca nanti 2 tahun yang mungkin nanti bisa kita sampaikan secara tertulis. Tapi intinya bahwa kami melaksanakan RHL vegetative Pak, disana ada penanaman pohon, ada vetifer. Kita sudah melakukan analisis Pak, nanti kalau saya cerita nanti bisa panjang. Tapi juga kami selain penanaman pohon vertifer juga kami melaksanakan kebun bibit desa. Nah, ini yang vetifer, ini yang sudah kita lakukan kemarin. Ini hanya simulasi saja Pak, itu yang sebelah kiri sebelum dan ini sesudah, tapi hasil-hasil dari kegiatan di Suka Jaya nanti akan kita sampaikan kepada Bapak.

Kami juga membuat sipil teknis, slide selanjutnya. Nah, ini Pak, disana kami telah melakukan galiplak ini hanya waktu itu sebelum dilaksanakan tapi hasilnya ada sekarang, kemarin yang ditinjau Presiden. Jadi ada galiplak, ada DAM Penahan, ada egohidrolikal sudah kita bangun disana. Kami telah membuat rencana operasi per desa Pak, di seluruh kecamatan Suka Jaya, contohnya ini dimana kami akan membangun DAM Penahan, dimana kami akan membangun galiplak dan membuat kebun bibit desa disitu, sampai kegiatan RHL vegetative itu 80 hektar, galiplak 24 unit, DAM Penahan 8 unit dan kebun bibit desa 1 unit itu untuk desa Banjar Sari. Ini seluruh desa sudah kita petakan Pak, nanti kita akan sampaikan secara tertulis.

Kemudian untuk Bapak Suhardi, Sulbar memang sudah ada di daftar ini. Jadi ada RHL-nya 1.250 hektar, mangrove-nya 75 hektar, ada bibit persemaian permanen 700 ribu hektar, kemudian untuk KBR 10 unit dan bibit produktif 30 ribu hektar. Di buku ini sudah ada Pak, nanti kami akan sampaikan halamannya.

Ibu Aeni mohon maaf, mau tidak mau Banten itu masuk DAS Ciliwung karena kami bekerja atas DAS. Tapi apabila dicermati disana bahwa kami akan melaksanakan juga pemulihan pasca bencana di Banten itu untuk RHL-nya 1.265 hektar, kemudian DAM Penahannya 137 unit. Nanti akan kami sampaikan juga Bu, seperti ini galiplak 404, dan bibit produktif 155 ribu batang. Dan ini KBR-nya 9 unit. Ini nanti akan kita sampaikan Bu, khusus untuk kebun bibit produktif nanti kita akan menunjang Ibu apabila dari tempat Ibu ada yang membutuhkan dimana akan kami kirim ke tempat ditunjuk oleh Ibu.

Kemudian saya terima kasih Bapak Abdullah, KBR memang 50 juta bahwa ini standarnya masih terlalu rendah, iya mungkin. Sehingga kami satu zonasi untuk Jawa itu bibit 1 KBR itu 40 ribu batang, tapi untuk luar Jawa bisa jadi hanya 20 ribu batang. Jadi Maluku bisa jadi mungkin kalau memang itu harganya tidak masuk bisa diturunkan Pak, tapi standar kami untuk KBR memang hanya 50 juta. Tapi mungkin nanti dari sistem zonasi ini akan kita perbaiki untuk, karena mungkin disana di Maluku untuk transportasi sangat mahal sehingga ini akan kita sesuaikan. Tapi terima kasih masukannya Pak.

F-NasDem (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Interupsi sebentar Pak.

KETUA RAPAT:

Saya ingin menambahkan sedikit Pak Tuasikal, tadi kalau beliau complain ya wajar karena transportasinya mahal sekali. Jadi harus juga segera direvisi namanya biaya kemahalan, tunjangan kemahalan. Karena coba bayangkan dari pulau ke satu pulau saja kan memakan waktu sekian jam. Jadi wajar kalau berbeda dengan kabupaten lain.

Mau menambahkan Pak? singkat, jelas.

F-NasDem (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Begini Pimpinan, saya kira ini bukan soal Maluku, tapi inikan juga soal daerah-daerah lain. Perencanaan untuk 20 ribu pohon, kalau 20 ribu pohon ongkos gali tanah kalau 2000 saja sudah 40 ribu. Nah, bagaimana dengan inikan bibitnya bukan dari Kementerian Pak, bibitnya ini dicari juga oleh masyarakat. Dicari oleh masyarakat setelah itu ditanam oleh masyarakat, lalu setelah itu dipelihara oleh masyarakat dan setelah ditanam yang hidup baru dibayar. Nah, ini resikonya, resikonya ini saya minta cuman dievaluasi saja karena ini kalau tetap jalan, lalu pengawasan semakin baik itu maka saya pastikan bahwa masyarakat banyak yang masuk penjara. Dari sisi perencanaan Pak, bukan soal di Maluku, saya kira di Jawa pun demikian. Kalau ini di Jawa di hamparan yang ada di Jawa pun tidak mungkin jalan. Kalau ini jalan saya yakin kalau umpamanya ada pemeriksaan pasti semuanya kena, dan saya kira agak repot. Saya inikan di Maluku saya juga awasi, kalau di Maluku itu ada 13 kelompok itu maka 13 kali 20 dapat 260 hektar. Kalau sudah kali dua atau tiga berarti sudah di atas 500 hektar. Apakah 500 hektar ini apa tidak, ini bukan di Maluku saja Pak. Saya tanya apa NTT juga ada, ada sekian, ada 10, apa ada 200 hektar untuk siap ditanam apa tidak.

Maksud saya itu bukan soal itu, kalau umpamanya ini tidak bisa itu maka segera dievaluasi kalau tidak ini akan sangat cukup rawan. Jadi Bapak Ketua, kalau 20 ribu ditanam 25 hektar tidak mungkin. Itu berarti ditanam pun paling Cuma berapa bibit, sekitar maksimal menurut peneliti saya itu antara 10-15 ribu, yang lain itu mau dikemanakan.

KETUA RAPAT:

Oke, paham.

Terima kasih, Bapak Dirjen ini tolong menjadi perhatian yang sangat khusus sekali. Jangan sampai program dibuat, rakyat tidak bisa menjalankan, rakyat kena masalah atau rakyat membohong, jangan sampai. Rakyat juga mau hidup nyaman, maka yang saya sarankan dari awal tadi rapat tolong kalau bisa buah-buahanlah.

Ada lagi Pak Sekjen.

Pjt. DIRJEN PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG KLHK (Ir. HUDOYO, M.M.):

Satu lagi jawaban, terima kasih Bapak.

Khusus untuk Bapak Ansy Lema, mohon maaf Pak, ini khususnya Dapil NTT kami di Laboan Bajo itu mendapat perintah dari Presiden untuk membangun persemaian modern Pak. Jadi kami ijin dulu kepada Bapak, jadi persemaian modern ini digunakan untuk mem-*back up* penghijauan di daerah wisata prioritas Laboan Bajo dan sekitarnya. Dan kami telah mendapatkan

areal 30 hektar yang disitu rata-rata yang tidak berhutan yang akan kami bangun persemaian yang untuk seluruh jenis tanaman.

Kemudian kami juga mendapat perintah yang kedua, yaitu menanami Pulau Bajo itu untuk tanaman-tanaman *iconic*. Itu bisa disitu Tabuh Buya, Jakaranda atau yang terahir Sakura Sumba, sehingga pada saat musin berbunga dilihat dari jauh itu sudah nampak disitu atau flamboyan. Ini perintah presiden Pak, karena disitu pulau itu fungsinya areal penggunaan lain jadi kami mohon nanti dukungan Bapak dan Pemda untuk melaksanakan perintah itu.

Demikian Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kapan kebun bibit itu mau dibangunnya.

Pit. DIRJEN PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG KLHK (Ir. HUDOYO, M.M.):

Di 2020 Pak, mulai pembangunannya.

KETUA RAPAT:

2020 jadi saya ingatkan itu Dapilnya Bapak Hansi Lema tolong waktu peletakan batu pertama beliau diajak. Bahwa beliau sebagai Anggota Dewan asal NTT ada gunannya di tempatkan di Komisi IV DPR RI.

Selanjutnya Bapak Sekjen.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Dirjen PSKL Bapak terkait Madiun.

DIRJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN (Dr. Ir. BAMBANG SUPRIYANTO, M.Sc.):

Baik, terima kasih Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, Bapak Sekjen.

Ijinkan secara singkat bahwa jawaban akan kami sampaikan secara tertulis mengenai data capaian perhutanan sosial hingga 31 Desember, sampai tingkat provinsi kabupaten sampai desa. Kita sudah punya capaiannya adalah 4,048 juta hektar ada di 6.411 lokasi di Indonesia dan yang terlibat ada 815 ribu KK.

Kemudian yang paling penting adalah ketika distribusi akses telah diberikan, maka karena ini adalah merupakan program nasional kita bekerja sama dengan penyuluhan Bapak dan Ibu bahwa lokasi itu didampingi oleh

penyuluh untuk membuat rencana kerja usaha, ada kesepakatan ruang daerah yang dilindungi dan ada daerah yang dimanfaatkan untuk *agroforestry* dengan komoditas yang disarankan oleh Bapak Darori, Bapak Dirjen komoditasnya itu tertentu yang mempunyai *skill of economy*, kalau Manggis ya Manggis, Duren ya Duren.

Dalam kaitan itu maka setelah kelompok masyarakat mempunyai rencana, maka ada investasi yang bisa diberikan dari Pemerintah dalam bentuk Bank Pesona tadi Pak. Yang bisa nanti terima kasih dibantu penyalurannya melalui Bapak dan Ibu sekalian.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Interupsi Bapak Ketua.

Saya melihat bahwa anggaran di Bank Pesona ini hanya Rp22,6 miliar 452 paket. Ini kecil sekali, di satu sisi masyarakat butuh banyak ini. Oleh karena itu Bapak Sekjen, kalau bisa khusus untuk Bank Pesona ini....

KETUA RAPAT:

Bukan kalau bisa tapi harus bisa.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Harus bisa, terima kasih Bapak Ketua.

DIRJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN (Dr. Ir. BAMBANG SUPRIYANTO, M.Sc.):

Baik, saya akan menyampaikan itu, terima kasih Bapak Suhardi Duka dan juga Bapak Made Urip tadi yang sudah menyampaikan.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Interupsi Ketua, boleh jadi Bapak Sekjen ini sungkan kalau belum ngasaran, *monggo* ngasaran bergantian. Tidak skors akan tetapi bergantian Sholat Ashar, *monggo*.

DIRJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN (Dr. Ir. BAMBANG SUPRIYANTO, M.Sc.):

Baik, saya lanjutkan Pak.

Baik, ini yang pertama, terima kasih Bapak Suhardi Duka dan Bapak Made Urip. Barangkali untuk memperjuangkan untuk penambahan anggaran di dalam konteks Bank Pesonanya.

Kemudian yang kedua, Bapak Ibnu Multazam. Tadi untuk....

KETUA RAPAT:

Sudah pulang Pak, tidak perlu dijawab.

DIRJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN (Dr. Ir. BAMBANG SUPRIYANTO, M.Sc.):

Oh, tidak usah dijawab.

Baik, terima kasih.

Kemudian Pak Muhtarom....

KETUA RAPAT:

Bapak Dirjen bagaimana tahu namanya saja tidak jelas, bagaimana Dapilnya nanti. Wah, iki payah mbah.

DIRJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN (Dr. Ir. BAMBANG SUPRIYANTO, M.Sc.):

Baik, terima kasih Bapak Bupati Madiun yang saya hormati.

Mohon maaf ya Pak, terkait dengan tadi mengenai aspirasi sudah kami terima Pak, barangkali nanti akan kami cek untuk LMDH. Tapi pada prinsipnya begini, bahwa ada dua skema yang bisa diberikan dalam konteks perhutanan sosial di Jawa. Yang pertama adalah IPHPS itu apabila tutupan lahannya kurang dari 10%. Jadi artinya, kalau gundul itu adalah polanya IPHPS. Kemudian kalau hutannya masih lebih dan itu ada kerja sama ada Perum Perhutani itu LMDH masih bisa dalam bentuk perhutanan sosial namanya Kulin Kaka.

Nah, yang paling terpenting sebetulnya LMDH-nya itu bertransformasi karena ada isu kalau di Jawa itu garapannya kecil Pak, karena lahannya sangat terbatas maka kalau bisa kita upayakan bisa 1 atau 2 hektar per KK-nya, supaya aksesnya itu bisa menjadi lebih baik.

Kemudian yang kedua, kita ingin memastikan bahwa subjeknya untuk LMDH itu adalah masyarakat setempat bukan masyarakat yang diluar desa tersebut, ini menjadi penting. Kemudian objeknya itu adalah hutan negara. Nah, dalam kaitan usulan yang ada pihak yang dari luar tadi itu ada mekanisme bahwa ketika usulan perhutanan sosial, baik IPHPS maupun Kulin Kaka setelah kami terima akan dicek melalui verifikasi administrasi dan verifikasi teknis. Jadi harapannya konfliknya itu tidak terjadi.

Kemudian tadi usulan 40 Kulin Kaka Pak, betul Pak, 15 itu sudah kita verifikasi teknis, 13 lolos Pak, dua ini ternyata ada dalam satu lokasi terdapat dua pengusul. Nah, nampaknya negara harus memberikan fasilitasi apakah itu nanti akan dikomunikasikan, bisa dijadikan satu kelompok masyarakatnya, sehingga bisa mengelola secara bersama-sama. Ini masih dalam proses dalam konteks itu.

Kemudian yang terakhir Bapak Darori....

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Sebentar Pak, sebelum ke Pak Darori Pak Ketua.

Saya hanya mau mendalami saja, ini masyarakat yang kerja sama dengan pemanfaatan lahan Perhutani itu kadangkala kan tanaman pangan juga ya. Ada jagung sekarang ini di Madiun masuk ke Porang, itu semua membutuhkan pupuk. Nah, persoalan pupuk ini pernah tidak di RDKK-kan dari kerja sama antara Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Pertanian. Kalau tidak, tidak bisa beli pupuk Pak, ribut lagi nanti Pemerintah Pusat salah semua. Biar jelas dari awal kita ketahui, memang kamu tidak dapat pupuk bersubsidi, sudah bagus dapat tanah, kira-kira kan begitu Pak.

Terima kasih Pak.

DIRJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN (Dr. Ir. BAMBANG SUPRIYANTO, M.Sc.):

Baik, terima kasih Bapak atas masukannya.

Kami catat dan kami tindaklanjuti.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Ijin Bapak, ijin Ketua.

KETUA RAPAT:

Inggeh.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Begini Pak, yang penting karena kemitraan LMDH dengan Perhutani ini sudah lama, ini ada prioritas yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan sampai tumpang tindih, karena ini saling *claim*, ini potensi konflik horizontalnya akan saling *claim* dan kemudian ini kita yang tidak suka yang itunya.

Kemudian terkait data dari Perhutani ini sebenarnya berapa sih yang bisa dialih fungsikan kemudian masuk ke RDKK yang pada akhirnya mendapatkan pupuk subsidi. Karena ini saling punya kepentingan bahwa pihak kehutanan ini tidak mau lahannya ini alih fungsi terlalu banyak, tapi pihak Pesanggem atau pihak penggarap bawah tegakan yang sudah tidak efektif ini maunya daftar banyak, karena biar mendapatkan pupuk subsidi. Nah, ini bagaimana jangan sampai nanti pihak kehutana dirugikan karena alih fungsinya terlalu banyak karena didesak oleh masyarakat Pesanggem dalam kepentingan untuk mendapatkan pupuk subsidi.

Terima kasih ketua.

DIRJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN (Dr. Ir. BAMBANG SUPRIYANTO, M.Sc.):

Baik, terima kasih Pak.

Pada prinsipnya pada waktu verifikasi teknis mengenai objek tanah yang dimohon itu akan dicek di keduanya. Kalau itu masih *overlapping* kita fasilitasi proses apakah itu bisa dibagi menjadi dua atau digabung menjadi satu, itu adalah proses-proses yang selalu kita lakukan.

Nah, kemudian kaitannya dengan pupuk, ini sangat penting Pak, dengan Bapak Darori juga sekaligus. Bahwa ketika pendampingan membuat RKU, kemudian maaf kebun bibit pun boleh masuk di perhutanan sosial Pak. Jadi kami sudah bekerja sama sejak tahun lalu, bahwa bibit-bibit itu bisa ditanam lokasi perhutanan sosial karena subjeknya jelas, objeknya juga jelas. Nah, dengan RKU Pak, Rencana Kerja Usaha yang didadampingi oleh penyuluh tadi itu menjadi modelitas untuk mendapatkan bibit gratis tadi Pak, baik dari Kementerian LHK maupun dari Kementerian yang lain. Karena prinsipnya bahwa perhutanan sosial itu polanya adalah *agroforestry* atau *silvofisheries* atau silvo fastural Pak. Jadi dimungkinkan ada kerja sama untuk bibit misalkan di Muara Gembong hutan produksi, kalau tambak itu berarti dengan KKP, itu dari benih vaname. Kemudian kalau jagung dengan jati atau dengan jabon itu jati jabonnya dari Pak Dirjen PDASHL, kemudian untuk jagungnya dari pertanian termasuk untuk pupuknya.

Demikian Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ada lagi Bapak Sekjen?

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Satu Pak, Dirjen PPKL mau merespon.

KETUA RAPAT:

Silakan.

DIRJEN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN KLHK (Drs. M.R. KARLIANSYAH, M.Sc.):

Terima kasih Bapak Sekjen.

Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota yang terhormat.

Ini kami mohon ijin untuk memberikan penjelasan terhadap Bapak Made Urip, Bapak Sutrisno dan Bapak Slamet. Pertama, terima kasih dukungan untuk rehabilitasi lahan pasca tambang. Tapi yang ingin kami sampaikan adalah bahwa rehabilitasi yang kami lakukan dengan menggunakan APBN adalah untuk lahan-lahan yang bekas tambang rakyat Pak, jadi bukan perusahaan. Yang perusahaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya perusahaan yang bersangkutan.

Terima kasih Bapak.

KETUA RAPAT:

Jadi saya juga minta bantuan kepada Eselon I untuk menyiapkan data, data tambang-tambang perusahaan swasta yang sudah reklamasi maupun yang belum, supaya kita ada gregetnya. Nanti dalam Rapat Kerja saya minta disertakan lokasi termasuk titik koordinatnya, nama PT-nya. Mungkin nanti kita buat spesifik atau waktu kunjungan kerja reses kita akan mengunjunginya.

Ada lagi Bapak Sekjen.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Bisa tertulis Pak, karena data-data ini dan PP2SDM tadi salah ketik saja, Rejang Lembong.

KETUA RAPAT:

Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Kanjeng mau ngomong?

Silakan.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H DARORI WONODIPURO, M.M.):

Ada yang lupa Bapak Sigit, kemarin kami Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Perkebunan juga dengan para asosiasi kelapa sawit. Melaporkan bahwa ada 800 ribu hektar kebun sawit rakyat telah diputihkan oleh Bapak Sigit, ini tolong jangan sampai salah di atas ada orang yang bisa salah paham. Dan masih ada lagi 1,2 juta lagi katanya masih proses, ini apa betul? Saya kira ini tidak betul, jangan sampai Dirjen melempar bola tapi sebenarnya tidak bener itu. 800 ribu hektar kebun sawit rakyat sudah diputihkan itu Dirjen Perkebunan yang bicara diruangan ini.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Tolong langsung direspon dan kita nanti buat keputusan bersama kita undang rapat gabungan antara Dirjen Perkebunan dengan Planologi.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Ijin Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Saya?

KETUA RAPAT:

Iya, Bapak yang ngomong kok.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Itu ada yang anu Pak, itu juga nyala itu.

KETUA RAPAT:

Bapak dulu, Bapak yang lebih tua Pak.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Siap, masih muda yang bawah.

Tadi belum dijawab kaitannya dengan galian C, 58 galian C yang ada di Mojokerto. Mohon ada respon.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kalau tidak salah galian C ini, provinsi ya yang mengeluarkan.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Gakkum Pak.

KETUA RAPAT:

Tapi untuk Amdalnya?

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Bupati Pak, Walikota.

KETUA RAPAT:

Tidak, sudah tidak di Kabupaten Kota Madya?

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Tidak, amdalnya Pak.

KETUA RAPAT:

Amdalnya.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Iya, UP memang provinsi Pak.

KETUA RAPAT:

Coba dijawab dulu, siapa yang menjawab pertanyaan Mbah Tarom tadi.

DIRJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KLHK (Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com., MPM.):

Terima kasih Pak Pimpinan.

Mungkin saya menjelaskan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan galian C, Pak Muhtarom. Inikan ada dua jenis mungkin, ada yang tidak ada ijinnya, ada yang punya ijin. Tentu yang tidak punya ijin nanti kita akan bicarakan bagaimana langkah-langkahnya karena kami juga baru menertibkan juga beberapa bulan yang lalu di Cileungsi Pak, ada sekitar 44 hektar kawasan tambang disana juga sedang kita proses karena ada penyitaan alat berat dan sekarang.

Sekarang berkaitan dengan ijin Pak, ijin itu sebenarnya Bupati itu masih punya kewenangan Pak, karena Bupati kan yang mengeluarkan ijin lingkungannya. Kalau tidak ada ijin lingkungan kan tidak mungkin ada IUP Pak. namun, sering sekali pemberi ijin lingkungan itu tidak meng-exercise power-nya Pak, dia melemparkan ke tempat lain. seharusnya kalau didatangkan kemudian dilihat ijin lingkungan tidak ada cabut ijin lingkungan kan cabut juga ijin IUP-nya. Ini yang mungkin Pak, yang belum banyak dilakukan oleh pihak Bupati maupun Walikota yang memberikan ijin lingkungannya.

Kami sering menyampaikan kepada mereka bahwa ini IUP kadang-kadang apakah ini pusat. Kami sampaikan juga karena ... pertama pusat juga, tapi ijin lingkungan daerah tetap. Persoalan yang terjadi kan lebih banyak persoalan-persoalan lingkungannya bukan persoalan royaltinya. Kami melihat bahwa ini bisa dilakukan Pak, yang di Mojokerto dan sebagainya. Dan juga bisa menjadi perhatian kita bersama-sama Pak, mungkin kalau memang kita harus lihat satu per satu kita akan lihat permasalahan ini Bapak Muhtarom.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Pak Dirjen, kaitannya dengan peninjauan kembali regulasi bahwa kewenangan ini ada di provinsi. Karena yang terdampak itu daerah, provinsi seolah-olah tidak bertanggungjawab.

DIRJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KLHK (Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com., MPM.):

Terima kasih Pak, kalau IUP kan itu di Peraturan Pemerintah, untuk IUP kan dipindahkan dari Kabupaten Kota. Ijin pertambangan dipindahkan itu di Peraturan Pemerintah Pak. Tapi sebenarnya kami sampaikan tadi Pemda, Bupati, Walikota masih punya kewenangan untuk dampaknya, karena mereka pegang kewenangan untuk pengawasan ijin lingkungannya. Yang masalahnya tidak diawasi, ini tantangan besar berkaitan dengan pertambangan. Bupati, Walikota itu mempunyai kewenangan Pak, tapi mereka tidak ada pejabat pengawasannya tidak ada, penyidiknya juga tidak ada, sehingga tidak di *enforce*, akhirnya semua persoalan itu sering ditangani dari Jakarta. Ini tantangan yang cukup besar kita hadapi sama-sama Pak, berkaitan kapasitas pelaksanaan itu.

Kemudian boleh Pak, saya nyampaikan dengan Bapak Ichsan tadi Pak Sekjen. Ya Pak Ichsan, kami sedang menyiapkan rencana operasi untuk penutupan tambang yang ada di Taman Gunung Halimun Salak Pak. Ini memang tidak mudah karena kami sudah melakukan operasi intelijen cukup lama disana, banyak sekali pelaku-pelaku disana. Tapi kami sedang persiapan Pak, nanti kami juga akan bicarakan bagaimana mitigasi dampak-dampak yang akan terjadi, karena ini akan kita lakukan.

Yang ketiga, berkaitan dengan Ibu Riezky, memang yang baru kita tindak baru satu Bu, penegakkan hukum. Tadikan kami sampaikan mekanisme yang akan kita lakukan berkaitan dengan impor sampah ilegal kan reekspor. Reekspor dulu, tapi kalau dia tidak reekspor baru kita akan masuk. Jadi dari semua case ini yang sekarang dilakukan kami baru ngambil satu untuk sampah impor ilegal, kalau kasus lain kan banyak, tapi untuk itu baru kami lakukan baru satu. Tapi kemungkinan akan kita lakukan tergantung nanti tindak lanjut dari reekspor ini.

Kemudian Bapak Slamet, berkaitan dengan kegiatan ada tidak tindakan kita terhadap kegiatan tambang di kawasan hutan itu banyak Pak, kita lakukan. Kami akan siapkan data-datanya Pak, operasi kami lakukan, tindakan kami lakukan berkaitan dengan tambang-tambang ilegal. Namun,

memang persoalannya besar sekali, kapasitas kami tidak cukup untuk menangani yang sebegitu besar ini. Jadi kami mohon dukungannya selalu untuk menangani kasus-kasus seperti ini.

Termasuk Bapak Suhardi tadi, untuk kegiatan di Sulawesi Barat tadi. Kami akan siap Pak, bersama-sama dengan Bapak untuk meninjau lokasi yang Bapak sampaikan tadi.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi bukan kurang daya tapi kurang duit dan kurang personal, gitu Pak. Ngomong saja terang-terangan Pak, duit operasional kurang, tenaga kurang, maka belum tertangani sebagian besar.

Pak Sumail dulu, Mbak Alien nanti.

F-GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Baik, terima kasih.

Mohon direspon Bapak Dirjen, tadi apa yang sudah saya sampaikan kaitannya dengan aktifitas tambang yang di Banyuwangi hingga hari ini banyak menimbulkan keresahan Pak. Kriminalisasi terjadi di beberapa tempat, masyarakat-masyarakat yang resisten. Saya kira kenapa saya harus mendapatkan respon dari Bapak, karena juga mereka paham karena saat inikan mereka mengikuti perkembangan rapat-rapat penting di Dewan, hingga nanti kita bisa informasikan yang memberdayai kepada mereka.

Saya kira catatan ini Pak Pimpinan, Bapak Sudin, sekali lagi perlu saya sampaikan mungkin, bukan hanya mungkin tapi bisa dipastikan bahwa kita datang kesana untuk meninjau apa sebenarnya yang terjadi disana kaitannya dengan status alih fungsi hutan dan Kementerian Lingkungan Hidup secara keseluruhan.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Mbak Alien, singkat.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Baik, terima kasih Bapak Ketua.

Tadi saya mau sampaikan dan menanggapi apa yang disampaikan Bapak Dirjen Gakkum tadi soal ijin pertambangan terus juga tentang galian C. Ini memang sangat terjadi banyak masalah dan kadang-kadang, terkadang itu ijin IUP pertambangan itu keluar tanpa adanya persetujuan dari Kabupaten atau Kota tersebut. Dan banyak sekali case yang keluar dan ditangani oleh

pusat *ending-ending*-nya adalah kadang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan.

KETUA RAPAT:

Maksudnya?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Maksudnya gini Ketua, sudah jelas ijin galian C harus ada persetujuan dari Pemda atau rekomendasi dari Kabupaten. Disitu ada rekomendasi dari Bupati, tapi IUP tersebut walaupun tidak ada rekomendasi dari kabupaten tersebut kadang IUP itu sudah keluar Ketua.

KETUA RAPAT:

Ada contohnya biar nanti ditindaklanjuti.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Tidak.

KETUA RAPAT:

Tidak, supaya kalau kita melontarkan kasus kita wajib bertanggungjawab, bahwa di provinsi ini ada yang mengeluarkan IUP tanpa rekomendasi dari Bupati.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Itu di provinsi saya pun terjadi.

KETUA RAPAT:

Oke, nanti Bapak Roy tolong ditindaklanjuti.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Kunspek juga bisa Bapak.

Terima kasih Bapak.

KETUA RAPAT:

Mungkin ada lagi.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Dirjen PKTL terakhir Pak, merespon.

KETUA RAPAT:

Iya, silakan.

DIRJEN PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN KLHK (Prof. Dr. Ir. SIGIT HARDWINARTO, M.M.):

Mohon ijin Bapak Pimpinan.

Tadi menurut arahan senior Bapak Darori ya, Bapak Darori mengingatkan yang pertama juga masukan Bapak Pimpinan juga terkait perubahan ijin pinjam pakai, kalau bisa diusulkan juga ada ijin sewa pakai. Tentu saja masukannya sangat bagus, dan ini nanti akan kami tindaklanjuti dengan pembahasan. Karena mumpung sekarang juga lagi ramai-ramainya Omnibus Law juga, juga di kehutanan juga ada penyesuaian beberapa peraturan. Oleh karena itu, ini adalah saran yang sangat bagus nanti kita akan bahas bersama dengan Bapak Sekjen.

Untuk ini juga sekaligus usulan yang kedua Bapak Darori, tadi terkait dengan tukar menukar kawasan hutan yang perbandingannya 1 banding 2 itu. Memang itu filosofinya itu kenapa 1 banding 2 ini karena tempatnya di Jawa itu secara umum kalau untuk komersial 1 banding 2, kalau di luar Jawa 1 banding 1, karena tutupan lahannya masih banyak. Tentu saja setelah melihat harga tanah yang semakin berbeda, misalkan beli di Jakarta 1 hektar nanti diganti di Gunung Kidul karena 1 hektar yang rugi, kita harus mulai lebih kritis saya kira ini nanti yang akan kami bahas untuk berikutnya untuk menyesuaikan aturan berikutnya sehingga semuanya mudah-mudahan bisa diakomodasikan untuk....

KETUA RAPAT:

Bapak Dirjen, usulan Bapak Kanjeng tadi ada kurang sebetulnya.

DIRJEN PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN KLHK (Prof. Dr. Ir. SIGIT HARDWINARTO, M.M.):

Apa Pak?

KETUA RAPAT:

Kalau beliau mengatakan sesuai NJOP, kalau saya beda. NJOP plus pakai appraisal untuk harga tanah, karena biasanya NJOP lebih rendah dibandingkan harga pasar. Cobalah dicek silakan, ini jangan sampai kasus di Kabupaten Kerawang terjadi lagi. Paham toh Pak, yang tukar menukar, Bapak paham? Itu saja yang saya ingatkan. Pak Kanjeng pasti ingat, karena waktu tukar menukar beliau masih jadi Dirjen. Begitu Pak, yang Kabupaten Kerawang kan Pak. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi.

Ada lagi Pak Sekjen?

DIRJEN PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN KLHK (Prof. Dr. Ir. SIGIT HARDWINARTO, M.M.):

Saya masih satu lagi Pak, sampai Pak Sumail mengingatkan dua kali, tadi saya mau menanggapi Pak. Untuk Sumail ya, tentu saja memang waktu di Komisi VII DPR RI dulu pernah ditindaklanjuti oleh Bapak Gus Wirawan juga ya, ngajak saya tapi di daerah yang sebelah utaranya Pak. Tentu saja terkait dengan ijin Tumpang Pitu ini karena ada tanda kutib mungkin salah alih fungsi lahan dan sebagainya, tentu saja karena ada informasi dari Bapak....

KETUA RAPAT:

Pak Dirjen, jangan bilang salah fungsi lahan. Bapak terbuka saja supaya semuanya transparan. Jangan bilang salah tumpang, jangan Pak, saya tahu Bapak ada yang mau disampaikan. Sampaikan saja terbuka supaya masyarakat tahu bahwa ini ada yang ini, ada yang ini.

Silakan tidak apa-apa.

DIRJEN PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN KLHK (Prof. Dr. Ir. SIGIT HARDWINARTO, M.M.):

Oleh karena itu, benar Pak, kami akan mengumpulkan ininya Pak, ininya dulu datanya dari Bapak Sumail dengan kita, nanti kami segera kita lakukan yang tumpang tindih dimana dan sebagainya. Karena masalah ini harus benar-benar fix Pak, kita tidak mau keliru juga baru kita lakukan telaahan, baru kita laporkan kepada Bapak, hasil yang sebenarnya seperti apa gitu.

F-GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Ijin interaktif.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Maksud saya begini Pak, jadi satu perijinan yang sudah mulai diupayakan disana, sudah mulai ada eksploitasi, eksplorasi itu juga belum *clear* dengan masyarakat dan saya dengar juga dengan Kementerian Kehutanan kaitannya dengan tukar guling atau tukar tambah dan lain sebagainya apalah namanya itu. Muncul lagi kemudian ijin baru yang notabene juga anak perusahaan yang eksisting sekarang ini Pak.

Yang terjadi juga disana sekarang ini karena penolakannya begitu massif, sehingga terjadilah kriminalisasi terhadap masyarakat itu, bahkan diadu domba mana orang yang sudah kerja di dalam dengan masyarakat yang setempat. Nah, tujuan kita, tujuan Pemerintah bagaimana sumber daya alam yang ada di baik atas, dalam dan mana pun itu sebesar-besarnya untuk

kemakmuran rakyat. Tapi nyatanya hari ini bukan kemakmuran, tetapi kegaduhan dan kesengsaraan Pak. Ini mohon karena bagian domain dari KLHK untuk segera dituntaskan saya kira Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi begini Pak Sumail, singkatnya.

Nanti kita atura kunjungan spesifik, Bapak yang mimpin kesana kita cek langsung, baik kepada masyarakat apakah merugikan masyarakat, sementara perusahaannya kaya masyarakatnya tambah miskin. Jadi jangan diperpanjang, kita atur waktu kunjungan spesifik. Tolong itu dicatat sekretariat.

Ada lagi Bapak Sekjen? Karena saya mau sholat.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Sudah cukup Pak.

KETUA RAPAT:

Cukup.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Cukup, terima kasih kepada Eselon I dan Kepala BRG yang telah menyampaikan jawabannya.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Dalam dialog, diskusi, saran, dan masukan Anggota Komisi IV DPR RI sebelum acara ini kita akhiri, kami bacakan rancangan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat pada hari ini. Tolong Anggota dijawab dan Sekjen dijawab pakai itu.

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas rencana program dan kegiatan tahun anggaran 2020 per Eselon I pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pada Badan Restorasi Gambut, terutama terkait program pemberdayaan masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan.

Anggota?

Pemerintah?

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Setuju Pimpinan.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut untuk melakukan revisi atas rencana program dan kegiatan tahun anggaran 2020 pada masing-masing Eselon I, terutama terkait program pemberdayaan masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan.

Karena tadi ada Anggota Dewan yang komplain kok wilayahnya tidak ada program.

Anggota?

Pemerintah?

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Setuju Pak.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi IV DPR RI mendukung dilaksanakannya perubahan komposisi pagu anggaran pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jika diperlukan sejauh perubahan dimaksud diprioritaskan kepada program yang mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat di dalam di luar kawasan hutan.

Anggota?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ketua, point 3 sama point 2 apa bedanya? Kalau boleh tahu, menurut saya sama saja point 2 dengan point 3. Lebih baik point 3 saja dimasukkan.

KETUA RAPAT:

Jadi kalau yang ketiga ini pemindahan dari Dirjen ini kesini, realokasi.
Pemerintah?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Intinya realokasi saja itu?

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Iya, sesuai ketentuan perubahan pagu antara Eselon I memang harus disetujui oleh DPR RI.

KETUA RAPAT:

Maka kami kan mendukung, yang enak kan Bapak.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Siap.

KETUA RAPAT:

Yang penting kata teman-teman tadi nanti ke Dapilnya dikasih motor untuk angkut sampah oleh Ibu Vivin.

Setuju Pemerintah?

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO) :

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan impor plastik dan kertas. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindak tegas oknum pelaku impor sampah limbah dan bahan beracun berbahaya.

Anggota?

Pemerintah?

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Untung tidak ada Bapak Haerudin.

5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data pemegang ijin tambang swasta/BUMN yang telah mengadakan kegiatan eksploitasi tambang, baik yang telah maupun belum melaksanakan kewajiban reklamasi tambang dan menyampaikan data dimaksud kepada Komisi IV DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan datang.

Anggota?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ketua, sepengetahuan saya tadi bukan hanya data ijin tambang tapi ada beberapa data yang lain yang diminta tadi sepengetahuan saya. Jadi kita masukkan saja sekalian disana.

KETUA RAPAT:

Jadi apa lagi maksudnya disampaikan dong jangan nyuruh-nyuruh saja, ini Pimpinan ini.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Oh, Bapak Pimpinan, lupa saya mohon maaf.

Seperti bukan hanya data pemegang ijin tambang, tadi sepengetahuan saya tadi ada permintaan data yang lain, data perhutanan sosial misalnya tadikan. Saya mohon maaf tadi, tapi sepengetahuan saya bukan hanya itu. Artinya ini nanti menjadi data bagi kita pada saat Rapat Kerja dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

KETUA RAPAT:

Coba Pak Ichsan, redaksinya dimasukkan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Oh, sudah jenuh Bapak Ketua. Ya data perhutanan sosial.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Di halaman 10 dan 11.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Perkebunan Pak.

KETUA RAPAT:

Kenapa tidak dipindahin saja dibuat saja nomor 6.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Gak, biar sekalian.

KETUA RAPAT:

Inikan bicara reklamasi, lahan yang rusak direklamasi oleh pemegang tambang, kalau yang itukan beda lagi yang keenam.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ya, sudah artinya intinya bukan hanya data ini yang kita inginkan.

KETUA RAPAT:

Oke, 6 dibuat lagi yang 5 setuju Bapak Sekjen?

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Nomenklatur saja Pak, kita tidak mengenal pemegang ijin tambang swasta, ada pemegang ijin pinjam pakai kawasan.

KETUA RAPAT:

Oke, rekdaksinya dirubah "bagi pemegang pinjam pakai".

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

"ijin pinjam pakai".

KETUA RAPAT:

Karena yang mengeluarkan itu ESDM ya, IUP-nya ESDM.

Anggota?

Pemerintah? Dibaca dulu.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Setuju Pak.

KETUA RAPAT:

Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Pak Ketua, ini point apa yang mau dimasukkan disini. Kalau terlalu umum seperti ini pertanyaannya pelepasan mulai tahun kapan. Kabinet inikan baru bekerja belum 3 bulan, supaya lebih jelas.

KETUA RAPAT:

Ya, kita buat saja dulu 2015-2020 saja.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Biar ada pointnya gitu ya

KETUA RAPAT:

Iya, setuju.

Tolong Anggota dan Pemerintah baca dulu yang jelas, nanti saya bacakan ulang.

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data perhutanan sosial dan data pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan selama tahun 2015-2019 dan menyampaikan data yang dimaksud kepada Komisi IV DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan datang.

Anggota?

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Masih belum sempurna Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya, masukan Bapak Mindo.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Inikan mungkin dimaksudkan inikan untuk pengawasan. Jadi kalau untuk pengawasan harus jelas, kecamatannya, kabupatennya, kan begitu. jangan nanti hanya tahun sekian sekian banyak, tahun sekian sekian banyak, memenuhi kesimpulan ini. Tapi yang dimaksudkan oleh Anggota supaya dia bisa melakukan pengawasan kalau itu terjadi Dapilnya Ichsan misalnya di kecamatan, eh ternyata tidak jadi buat rakyat akhirnya diambil alih oleh pengusaha, kira-kira kan begitu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi masukkan kata lokasinya.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Tambahin saja secara rinci begitu ya, yang dimaksud dengan Bapak Mindo itu betul Pak Ketua, secara rinci dengan lokasi. Secara rinci itu maksudnya secara tidak tertulis itu yang dimaksud Bapak Mindo tadi, tapi kita punya kesepahaman bersama disini bahwa yang dimaksud dengan point 6 itu adalah itu. Kalau ditambahin kecamatan, desa dan sebagainya mungkin tidak terlalu, ini menarik Pak.

KETUA RAPAT:

Secara rinci kan mengerti lah.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pemahaman disini kita ini.

KETUA RAPAT:

Anggota sudah ada lagi masukan?

Pemerintah?

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Kalau boleh ditambah saja Pak, dengan rincian per provinsi dan kabupaten Pak.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Pak Ketua, point 6 ini apa tidak ditambahkan ijin kaitan data perhutanan sosial.

KETUA RAPAT:

Ya kalau sudah rinci tidak ada luasannya ya kita jadikan tempat teman sampah yang di Tanjung Priuk nanti. Kalau rinci kan berarti semuanya jelas, termasuk luasan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Ketua, saya mau soal redaksional saja Pak Ketua. Data itu ya memang sudah rinci, data itu mengharuskan rinci, kalau tidak rinci bukan data. Jadi saya "Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data perhutanan sosial dan data pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan selama tahun 2015 sampai 2019 di Provinsi, Kabupaten dan Kota, bla, bla..."

KETUA RAPAT:

Tidak usah, secara rinci sudah jelas Pak, secara rinci itu meliputi Kabupaten, Provinsi, dan Kecamatan. Jadi tidak usah pakai dimasukkan Provinsinya lagi, tidak usah sudah.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Tadi saya mau usul kata rincinya dihilangkan Pak.

KETUA RAPAT:

Tidak bisa, kalau tidak rinci nanti dia bilang luasannya sekian sudah. Bapak bisa tahu kalau dibidang Sumatera Selatan pelapasan kawasan untuk perkebunan 800 ribu hektar, wilayah dimana? Lu cari sendiri disana, mau gitu.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Bukan Pak, karena data itu kan pasti rinci menurut saya.

KETUA RAPAT:

Belum tentu.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Kalau belum tentu berarti tidak kerja, kan data itu harus rinci.

KETUA RAPAT:

Oh, tidak juga, beda.

Pemerintah setuju?

F-PDIP (RIEKY APRILIA, S.H., M.H.):

Pimpinan, yang ilegalnya bagaimana Pak?

Kita juga butuh data yang legal dan tidak illegal.

KETUA RAPAT:

Masukkan, redaksinya bagaimana?

Saya tahu itu bisikan dari sebelahnya, masukkan saja. Kanjeng kalau ngajarin jangan sepotong-sepotong, biar komplis sekalian, redaksinya sekalian dimasukkan.

F-PDIP (RIEKY APRILIA, S.H., M.H.):

“Secara rinci, baik yang legal maupun illegal”.

KETUA RAPAT:

Tolong Pemerintah baca dulu, apa yang mau ditambahin dan dikurangi, karena ini adalah permintaan Anggota fungsinya untuk pengawasan. Dibaca dulu kalau ada yang keberatan dimana.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Data pelepasan kawasan hutan kami itu legal Pak.

KETUA RAPAT:

Tidak, mungkin yang dimaksud suhunya ini yang illegal pun dicantumkan, dilaporkan. Pak Sekjen kalau bicara illegal pasti ada, karena yang tahu Pak Roy sama saya berdua. Kalau yang legal saya rasa tidak perlu dimasukkan, yang perlu dicantumkan yang illegal. *Monggo* diusulkan, nanti kalau Anggota setuju kita ketok palu, kalau tidak ya kita bedah lagi.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Kalau bicara illegal Pak, kita sudah tahu bahwa ada perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan itu berarti tanpa pelepasan.

KETUA RAPAT:

Itu secara halus, ya Bapak atur redaksinya.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H DARORI WONODIPURO, M.M.):

Ketua, tambahan ya.

KETUA RAPAT:

Bapak ngajarinnya sedikit-sedikit tadi itu.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H DARORI WONODIPURO, M.M.):

Kata pelepasannya dihapus saja, jadi “data kawasan hutan untuk perkebunan illegal”.

Bagaimana Bapak Sekjen, cocok?

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Ya, betul Pak. Jadi jelas yang dimaksud.

KETUA RAPAT:

Tadi kanjeng ngasih tahu juniornya sedikit, giliran sudah gini baru keluar.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H DARORI WONODIPURO, M.M.):

Pelepasannya jangan muncul Pak, karena pelepasan itu kan data.

KETUA RAPAT:

Pemerintah kira-kira sudah baca jelas.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak, itu bukan Bapak Darori Pak, Ibu Kiki tadi.

KETUA RAPAT:

Ibu Kiki ya, terima kasih Ibu Kiki.

Sudah jelas dibaca, ada yang mau dirubah lagi Anggota?

Oke, saya bacakan.

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data perhutanan sosial dan data perkebunan dalam kawasan hutan, baik legal maupun illegal selama 2015 sampai 2019 secara rinci, dan menyampaikan data dimaksud kepada Komisi IV DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan datang.

Pemerintah?

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Ada sedikit Pak, karena inikan kita bicara yang dimaksud perkebunan dalam kawasan hutan itu yang disorotkan illegal. Kalau data kebun legal itu bukan di kita Pak. Yang ada di kita yaitu pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan. Kalau boleh Pak, seperti tadi “data perhutanan sosial, data pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan dan data perkebunan dalam kawasan hutan yang illegal”.

KETUA RAPAT:

Ya, sudah rubah saja.

Yang penting illegal mesti ditindaklanjuti.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

“Data perhutanan sosial, data pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan...”, kembali ke yang awal tadi Pak, “pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan”, supaya kelihatan dilapangan mana yang pelepasan lewat kita dan ada ternyata kebun masuk dalam kawasan hutan tanpa ijin, itulah yang illegal sama perkebunannya.

KETUA RAPAT:

Saya bacakan ulang lagi supaya jangan salah.

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data perhutanan sosial, data pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan dan data perkebunan dalam kawasan hutan yang illegal selama tahun 2015 sampai 2019 secara rinci, dan menyampaikan data yang dimaksud kepada Komisi IV DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan datang.

Anggota?

Pemerintah?

(RAPAT: SETUJU)

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Ketua, karena sudah diketok saya cuma mengingatkan saja, bahwa data ini betul-betul harus kita dapatkan pada saat sebelum Rapat Kerja. Jangan sampai berlarut-larut, karena nanti ada alasan lagi. Karena pengalaman kita kalau Bapak Mindo ingat, itu berlarut-larut data itu. Kita mengingatkan komitmen itu saja.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Pak Ketua, artinya kalau data itu belum ada ya belum berguna bertemu dengan Menteri untuk Rapat Kerja, kira-kira begitu.

KETUA RAPAT:

Saya paham, jadi makanya tadi dikatakan dalam Rapat Kerja, kalau datanya belum ada ya jangan Rapat Kerja dulu, kan begitu saja.

F-PD (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Pak Ketua, satu Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Masalah ini lagi, ini sudah selesai?

F-PD (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Sudah selesai.

KETUA RAPAT:

Apa lagi?

F-PD (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Mau tambahan Pak, tadikan saya mempertanyakan soal dasar kajian akademis terkait dengan Permen yang membolehkan dan tadi dikatakan bahwa....

KETUA RAPAT:

Tadi sudah disampaikan Pak Lema oleh Bapak Dirjen, nanti waktu Rapat Kerja akan datang kajiannya itu dibawa, kalau tidak kan gampang kita somasi saja.

F-PD (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Oke, terima kasih Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Itu saja, jadi Bapak dan Ibu Anggota yang terhormat.

Tadi semua Anggota sudah mendapatkan destinasi wisata alam 54 taman nasional Indonesia. Saya berharap apabila ada kunjungan kerja sempatkan kita meninjau 54 destinasi wisata ini. Karena apa? Disinilah salah satu fungsi pengawasan kita. Contoh, berapa kali saya ngomong disini kalau terjadi kebakaran di Gunung Bromo itu ya sudah habislah. Seharusnya

sebelum kebakaran paling tidak kita berpikir bagaimana menyiapkan tangki atau kalau tidak terbeli pemadam kebakaran ya siapkan mobil tangki yang ada pompanya. Itu yang usulan saya, termasuk juga di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, bagaimana orang mau patroli, patrolinya tidak ada speedboot-nya. Apa harus berenang, ini Bapak Sekjen harus jadi perhatian ini, karena mereka semua ngeluh. Saya mungkin ada 10 kali ngomong masalah ini.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Sebelum kami menutup Rapat Dengar Pendapat ini, kami persilakan saudara Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan kata penutup dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini.

Silakan.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO):

Pada kesempatan ini atas nama teman-teman pejabat eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan dan Anggota Kom IV DPR RI, yang selama Rapat Dengar Pendapat berjalan telah banyak memberikan arahan-arahan dan juga catatan-catatan dan juga bimbingan dalam kaitannya dengan peningkatan kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dan kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat ini, ada hal-hal yang kurang berkenan dan tentunya ini menjadi bahan perbaikan untuk kami semua dalam rangka kerja bermitra dengan Komisi IV DPR RI. Dan kami berkomitmen untuk menindaklanjuti semua putusan atau kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat ini sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Jadi kalau bisa selambat-lambatnya Jumat perubahan data yang tadi tolong diserahkan kepada Sekretariat. Jadi jumlahnya kurang lebih ada 54 supaya dibagikan, supaya nanti dalam Rapat Kerja jangan bertele-tele, bahwa sudah ada perubahan kalau tidak segera Anggota Komisi IV DPR RI minta tenaga ahlinya untuk menyampaikan keberatan tersebut kepada Dirjen masing-masing.

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah Rapat Dengar Pendapat pada hari ini. Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan, kekhilafan. Dengan mengucapkan *alhamdulillahirabil'amin*, kami tutup Rapat Dengar Pendapat ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.45 WIB)

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
NIP. 196301221991031001